

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran dan arah kebijakan dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur struktur dan pola tata ruang provinsi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
18. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJPD disusun berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. demokrasi;
 - c. berkeadilan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - f. transparansi;
 - g. keterbukaan;
 - h. otonomi daerah;
 - i. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - j. berkelanjutan;
 - k. berwawasan lingkungan;
 - l. efisien;
 - m. efektif.
- (2) RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RPJPN.

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPJPD meliputi :
 - a. gambaran umum kondisi daerah;
 - b. visi dan misi;
 - c. sasaran pokok pembangunan jangka panjang;
 - d. arah kebijakan pembangunan jangka panjang; dan
 - e. tahapan dan prioritas pembangunan.
- (2) Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- RPJMD I tahun 2005-2007;
 - RPJMD II tahun 2007-2012;
 - RPJMD III tahun 2013-2017;
 - RPJMD IV tahun 2018-2022; dan
 - RPJMD V tahun 2023-2025.

Pasal 5

RPJPD berfungsi sebagai :

- pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan.

Pasal 6

Prioritas pembangunan pada RPJPD periode berkenaan dijadikan sebagai dasar penyelarasan tujuan RPJMD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.
- Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah.
- Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup terhadap realisasi sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- DPRD dapat memberi masukan pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang belum memiliki RPJMD, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD.
- (2) Gubernur pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Jakarta merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yakni sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat keuangan dan jasa, kota internasional, serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat-pusat perusahaan multi nasional dan gerbang utama wisatawan manca Negara. Selain itu, Jakarta juga sebagai provinsi Daerah Khusus Ibukota yang terbagi dalam lima wilayah Kota Administratif dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang bukan merupakan Daerah Otonom.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah penduduk, yang semakin bertambah dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah daerah dan tahunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah, yang merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung terus menerus, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang, tanpa

mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, diperlukan penataan kembali dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, ketahanan sosial budaya, kualitas lingkungan hidup, kapasitas infrastruktur serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kekayaan intelektual.

Kurun waktu RPJPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2005-2025. Pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta I Tahun 2005-2007, RPJMD Provinsi DKI Jakarta II Tahun 2007-2012, RPJMD Provinsi DKI Jakarta III Tahun 2013-2017, RPJMD Provinsi DKI Jakarta IV Tahun 2018-2022 dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta V Tahun 2023-2025.

RPJPD Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD Provinsi DKI Jakarta memuat visi, misi dan strategi pembangunan daerah.

RPJMD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Provinsi DKI Jakarta. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Jakarta secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah untuk:

- (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- (c) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJPD diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Jakarta. Visi merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Jakarta, yaitu Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global.

Dengan terumuskannya visi pembangunan, selanjutnya disusun misi pembangunan, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang daerah lebih fokus pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner, seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner, serta unsur-unsur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi olah pikir dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua pemangku kepentingan masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 terdiri dari 7 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, muatan RPJPD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJPD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 serta Lampiran merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antarwilayah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka panjang harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi perencanaan jangka panjang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "otonomi daerah" adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka panjang yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "efisien" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cermat serta lebih berdaya guna dan berhasil guna

Huruf m

Yang dimaksud dengan "efektif" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan secara lebih tepat guna.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penyusunan visi, misi dan program calon gubernur dan wakil gubernur yang berpedoman pada RPJPD dimaksudkan agar visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur sekurang-kurangnya mengandung sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Pasal 6

Prioritas pembangunan periode berkenaan yang diselaraskan dengan tujuan RPJMD dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan bahwa visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih telah sesuai dengan prioritas pembangunan RPJPD periode berkenaan dan selaras dengan arah kebijakan RPJPD secara keseluruhan.

Pasal 7

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJPD dari masing-masing Kepala SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD dan harus dapat menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan RKPD dan Rancangan APBD tahun pertama adalah RKPD dan RAPBD tahun 2008, 2013, 2018, dan 2023.

Gubernur terpilih periode berikutnya tetap memiliki ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme APBD Perubahan.

Pasal 9

Cukup jelas

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2005-2025**

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH	1
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2005-2025	
PENJELASAN	10
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2005-2025	
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	1-3
1.4 Sistematika Penulisan	1-4
1.5 Maksud dan Tujuan	1-5
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	2-1
2.1.2 Topografi, Geologi, Hidrologi, dan Klimatologi	2-4
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	2-5
2.1.4 Kondisi Demografi	2-7
2.1.5 Penggunaan Lahan	2-10
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah	2-10
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-11
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2-11
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	2-15
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga	2-17
2.3 Aspek Pelayanan Umum	2-19
2.3.1 Pendidikan	2-19
2.3.2 Kesehatan	2-21
2.3.3 Pekerjaan Umum	2-23
2.3.4 Perumahan Rakyat	2-27
2.3.5 Penataan Ruang	2-28
2.3.6 Perhubungan	2-28
2.3.7 Lingkungan Hidup	2-30
2.3.8 Kependudukan dan Catatan Sipil	2-31
2.3.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-31
2.3.10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2-32
2.3.11 Sosial	2-32
2.3.12 Ketenagakerjaan	2-33
2.3.13 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	2-34
2.3.14 Penanaman Modal	2-35
2.3.15 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	2-35
2.3.16 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)	2-36
2.3.17 Komunikasi dan Informatika	2-37

2.3.18	Pariwisata	2-37
2.3.19	Perdagangan	2-39
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	2-40
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Makro	2-40
2.4.2	Kemampuan Keuangan Daerah	2-40
2.4.4	Fasilitas Infrastruktur	2-41
2.4.3	Iklim Investasi	2-42
2.4.5	Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia	2-43
2.4.6	Lingkungan Strategis Nasional, Regional, dan Global	2-43
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	3-1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	3-1
3.1.1	Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	3-1
3.1.2	Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam	3-4
3.1.3	Dinamika Sosial Budaya	3-5
3.1.4	Tata Kelola Pemerintahan	3-9
3.1.5	Ekonomi dan Investasi	3-10
3.2	Isu-isu Strategis	3-12
3.2.1	Pengembangan Sistem Transportasi	3-12
3.2.2	Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan	3-12
3.2.3	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3-13
3.2.4	Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim	3-13
3.2.5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	3-13
3.2.6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota	3-13
3.2.7	Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas	3-14
3.2.8	Peningkatan Kualitas Pendidikan	3-14
3.2.9	Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan	3-14
3.2.10	Pembangunan Budaya Multikultur	3-14
3.2.11	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	3-15
3.2.12	Penguatan Ketahanan Pangan	3-15
3.2.13	Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan	3-15
3.2.14	Peningkatan Daya Saing Global	3-15
3.2.15	Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi	3-16
3.2.16	Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja	3-16
3.2.17	Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah	3-16
3.2.18	Reformasi Birokrasi	3-16
3.2.19	Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kerjasama Internasional	3-17
3.2.20	Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia	3-17
3.2.21	Pembangunan Telematika Jakarta	3-17
BAB IV	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	4-1
4.1	Visi	4-1
4.2	Misi	4-2
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	5-1
5.1	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan	5-1
5.1.1	Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah	5-1
5.1.2	Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas	5-4
5.1.3	Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya	5-6
5.1.4	Misi 4 : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Sumber Daya Alam	5-8
5.1.5	Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan	5-9
5.1.6	Misi 6 : Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas Daerah	5-12

5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan	5-14
5.2.1 RPJMD ke-1 (2005-2007)	5-15
5.2.2 RPJMD ke-2 (2007-2012)	5-18
5.2.3 RPJMD ke-3 (2013-2017)	5-21
5.2.4 RPJMD ke-4 (2018-2022)	5-24
5.2.5 RPJMD ke-5 (2023-2025)	5-26
BAB VI KAJIDAH PELAKSANAAN	6-1
BAB VII PENUTUP	7-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta	2-2
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan	2-19
Tabel 2.3	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2007 - 2010	2-23
Tabel 2.4	Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi dan Jenis Status Jalan Tahun 2010	2-24
Tabel 2.5	Pemakaian Air Tanah Menurut Jenis Sumur Tahun 2008-2010	2-26
Tabel 2.6	Pendapatan dalam APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008-2012	2-41
Tabel 5.1	Tahapan dan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025	5-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	1-4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta	2-3
Gambar 2.2	Peta Tematik 13 Sungai di Provinsi DKI Jakarta	2-5
Gambar 2.3	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam	2-6
Gambar 2.4	Penurunan Tanah Jakarta dari Tahun ke Tahun	2-7
Gambar 2.5	Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011	2-8
Gambar 2.6	Jumlah Kelahiran dan Kematian Provinsi DKI Jakarta	2-8
Gambar 2.7	Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi Tahun 2007-2010	2-9
Gambar 2.8	Jumlah Penduduk Bodetabek Tahun 2010	2-9
Gambar 2.9	Peta Penggunaan Lahan Eksisting di Provinsi DKI Jakarta	2-10
Gambar 2.10	Peta Pusat Kegiatan Provinsi DKI Jakarta	2-11
Gambar 2.11	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi DKI Jakarta	2-12
Gambar 2.12	Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011	2-12
Gambar 2.13	Grafik Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta	2-13
Gambar 2.14	PDRB per Kapita DKI Jakarta atas Dasar Harga Berlaku	2-14
Gambar 2.15	Gambaran Kemiskinan di DKI Jakarta pada Periode 2007-2011	2-14
Gambar 2.16	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 - 2010	2-15
Gambar 2.17	Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta	2-16
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2007-2011	2-16
Gambar 2.19	Perkembangan Angka Kematian Bayi Tahun 2007-2010	2-17
Gambar 2.20	Jumlah Kegiatan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2011	2-18
Gambar 2.21	Angka Kelulusan SMA di Provinsi DKI Jakarta tahun 2007-2011	2-19
Gambar 2.22	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOP) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011	2-20
Gambar 2.23	Pemberian Kartu Gratis/Beasiswa Rawan Putus Sekolah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2011	2-21
Gambar 2.24	Total Pelayanan Kasus yang Ditangani Melalui Gakin, SKTM, dan Korban Bencana Tahun 2007-2011	2-23
Gambar 2.25	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010	2-25
Gambar 2.26	Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010	2-25
Gambar 2.27	Beban Puncak Listrik Jakarta Pada Tahun 2011 dan Proyeksinya (MW) Pada Tahun 2020	2-27
Gambar 2.28	Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi DKI Jakarta	2-33
Gambar 2.29	Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi DKI Jakarta	2-34
Gambar 2.30	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jakarta pada tahun 2007-2011	2-38
Gambar 2.31	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Jakarta pada tahun 2007-2011	2-39
Gambar 4.1	Rumusan Visi Misi RPJPD Provinsi DKI tahun 2005-2025	4-3

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Jakarta telah banyak mengalami perubahan sejalan dengan perubahan lingkungan strategis dan peraturan perundangan. Sejak tahun 1969, pembangunan Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelita), dan Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD). Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi telah mendorong terjadinya perubahan tata kelola pemerintahan dan pola penyelenggaraan negara. Hal ini ditandai dengan adanya desentralisasi urusan pemerintahan kepada provinsi, kabupaten/kota dan demokratisasi dalam pembangunan yang membuka peluang semua warga negara berpartisipasi aktif. Pada periode tersebut juga terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya tidak lagi mengamankan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai dokumen yang memberikan arah penyelenggaraan negara.

Perubahan sistem tata kelola pemerintahan dan pola penyelenggaraan negara serta amandemen UUD 1945 tersebut berimplikasi pada munculnya paradigma dan perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamankan perlunya disusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Selain itu, juga ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang ini mengamankan pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah 20 tahunan.

Provinsi DKI Jakarta adalah Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Jakarta juga mempunyai karakteristik lain, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan perekonomian, pusat perdagangan, pusat jasa perbankan dan keuangan, dan juga sebagai gerbang utama wisatawan mancanegara. Dengan peran tersebut, maka Kota Jakarta cenderung tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan yang cepat ini berdampak pada perubahan di berbagai aspek baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya maupun aspek keamanan. Sehingga pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai tantangan dan permasalahan yang unik yang harus diselesaikan dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif, integratif, dan holistik.

Sebagai langkah untuk mengembangkan potensi-potensi, tantangan dan permasalahan yang ada, diperlukan suatu perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan arah pembangunan jangka panjang daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan teknokratik sendiri dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh para pakar dan tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan substansi yang dibutuhkan RPJPD termasuk memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta.

Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ini. Sedangkan pendekatan politik dilakukan dengan proses konsultasi dan pembahasan dengan anggota dewan mulai dari rancangan awal, menginternalisasi dan mengakomodasi penjabaran dari agenda-agenda pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya, pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam penyusunan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kabupaten Administrasi serta tingkat Provinsi. Hasil dari proses ini selanjutnya diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh perangkat daerah baik dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Kabupaten Administrasi maupun dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah yang memuat visi, misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, RPJPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rencana pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

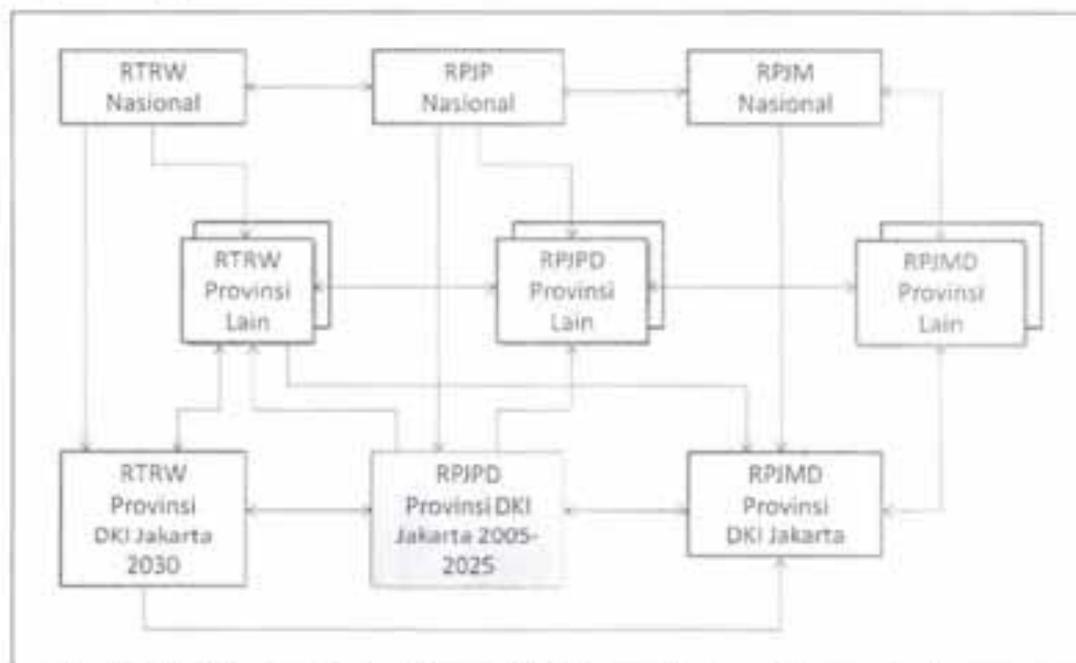
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- i. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- j. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- k. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- m. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- n. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- o. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- p. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah.
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- x. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.
- y. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- dd. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.
- ee. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa RPJPD mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Rancangan awal RPJPD provinsi disusun mengacu pada RPJPN, berpedoman pada RTRW provinsi, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya. Dengan dasar tersebut maka RPJPD 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional, berpedoman pada RTRW 2030 dan memperhatikan RPJP dan RTRW Provinsi Jawa

Barat dan Banten. Secara diagramatis hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025 terdiri dari enam bab, dimana antar bab memiliki keterkaitan dalam alur pikir yang sistematis. Masing-masing bab menguraikan substansi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi DKI Jakarta yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut dilengkapi dengan data pokok selama periode 2007 – 2011 dan analisis perkembangan yang menggambarkan kondisi obyektif DKI Jakarta.

Bab III Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini terdiri dari dua subbab yang terkait satu sama lain yaitu uraian tentang permasalahan pembangunan daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025. Pada bab ini diuraikan pemahaman visi, makna kandungan misi serta arah upaya pelaksanaan misi.

Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bab ini terdiri dari dua subbab yaitu subbab sasaran pokok dan arah kebijakan serta subbab tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang. Pada subbab sasaran pokok dan arah kebijakan diuraikan setiap misi pembangunan jangka panjang. Sedangkan pada subbab tahapan dan prioritas pembangunan diuraikan tahapan pembangunan dalam jangka panjang selama 20 tahun dengan periodisasi 2005-2007, 2007-2012, 2013-2017, 2018-2022 dan 2023-2025.

Bab VI Kaidah Pelaksanaan

Bab ini menguraikan fungsi RPJPD dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan serta kaidah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi uraian singkat tentang pengertian, fungsi, dan peran dari dokumen RPJPD yang telah ditetapkan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud:

- a. Memberikan arah pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- c. Memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2025 adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
- d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.
- e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan daerah selatar dan pemerintah pusat.
- f. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah.

- g. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional.
- h. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- i. Menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaannya diutamakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Penataan ruang wilayah juga merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan dengan melihat perkembangan DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang mempengaruhi kawasan sekitar. Seluruh kemampuan dan potensi tersebut dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah. Sampai saat ini, pembangunan di Jakarta telah menunjukkan pencapaian yang menggembirakan, ditandai dengan meningkatnya indikator kesejahteraan masyarakat. Namun untuk melanjutkan pembangunan ke depan, Jakarta dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang lebih kompleks dan tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang diperlukan upaya yang terintegrasi dan profesional untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut melalui perencanaan pembangunan Jakarta yang komprehensif dan holistik.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi geografis antara 106.22'42" dan 106.58'18" Bujur Timur, serta antara 5.19'12" dan 6.23'54" Lintang Selatan dengan keseluruhan luas wilayah 7.659,02 km², meliputi 662,33 km² daratan, termasuk 110 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 6.977,5 km² lautan.

Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas 48,13 km²; Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 146,66 km²; Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 129,54 km²; Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km²; dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 188,03 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km².

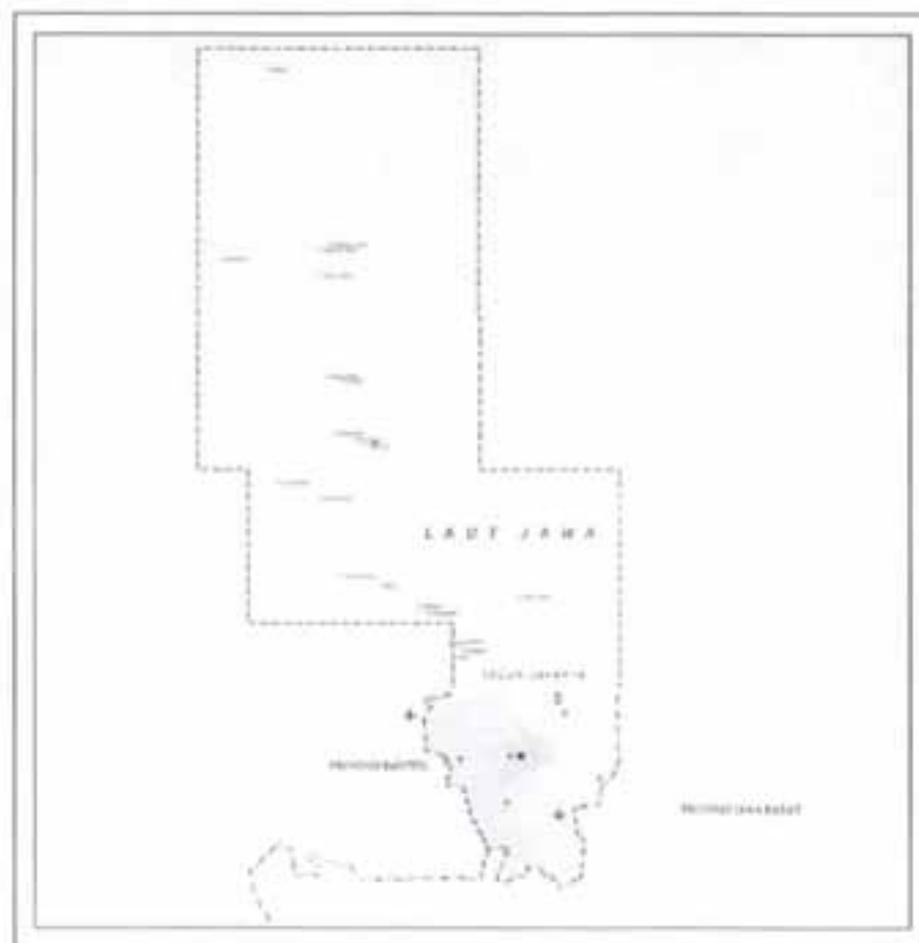
Secara administrasi kewilayahan, masing-masing Kota dan Kabupaten Administratif dibagi menjadi beberapa kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut dibagi menjadi beberapa kelurahan. Kota Administratif Jakarta Pusat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 44 (empat puluh empat) Kelurahan. Kota Administratif Jakarta Utara terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 31 (tiga puluh satu) Kelurahan. Selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 65 (enam puluh lima) Kelurahan. Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 65 (enam puluh lima) Kelurahan. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu hanya terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan 6 (enam) Kelurahan. Secara terinci hal ini diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta

No	Kota / Kabupaten Administrasi	Jumlah				
		Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	KK
1	Jakarta Pusat	8	44	394	4.652	257.180
2	Jakarta Utara	6	31	431	5.072	387.758
3	Jakarta Timur	10	65	699	7.843	767.385
4	Jakarta Selatan	10	65	576	6.131	459.089
5	Jakarta Barat	8	56	580	6.409	479.555
6	Kep. Seribu	2	6	24	122	5.955
	Jumlah	44	267	2705	30120	2.356.922

Sumber : Jakarta Dalam Angka 2011

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, ditentukan bahwa batas-batas Provinsi DKI Ibukota Jakarta yaitu sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta
(Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030)

2.1.2 Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut. Namun, sekitar 40 persen wilayah Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1 - 1,5 meter di bawah muka laut pasang.

Secara geologis, seluruh wilayah Jakarta merupakan dataran *alluvial*, yang materi tanahnya merupakan endapan hasil pengangkutan aliran permukaan dan air sungai yang mengalir pada wilayah tersebut. Di samping itu juga, wilayah Jakarta terdiri dari endapan *pleistocene* yang terdapat pada kurang lebih 50 meter di bawah permukaan tanah dimana bagian selatan terdiri atas lapisan *alluvial*, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 kilometer. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan *alluvium*.

Selain itu Provinsi DKI Jakarta juga memiliki wilayah pesisir yang cukup luas, yaitu sekitar 155,01 km². Wilayah ini membentang dari timur sampai barat sepanjang kurang lebih 35 km, dan menjorok ke darat antara 4 sampai dengan 10 km. Wilayah pesisir Jakarta merupakan pantai beriklim panas dengan rata-rata suhu 28,5°C dan rata-rata kelembaban 72 persen.

Di samping wilayah pesisir, Provinsi DKI Jakarta juga memiliki pulau-pulau kecil yang terletak di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Pulau-pulau di wilayah ini memiliki luas beragam, sebanyak 45 persen berukuran kurang dari 5 hektar, sebanyak 25 persen memiliki luas antara 5-10 hektar, dan hanya 30 persen yang luasnya lebih dari 10 hektar. Pulau-pulau memanjang dari utara ke selatan dengan ciri-ciri berpasir putih dan bergosong karang, iklim tropika panas dan kelembaban berkisar antara 75-99 persen. Dari pulau-pulau kecil tersebut, pulau yang dihuni oleh penduduk hanya berjumlah 11 pulau.

Berdasarkan letaknya Kota Jakarta termasuk dalam kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Kota delta Jakarta dialiri oleh 13 aliran sungai dan dipengaruhi oleh air pasang surut.

Tiga belas sungai dan dua kanal yang melewati Jakarta sebagian besar berhulu di daerah Jawa Barat dan bermuara di Teluk Jakarta. Tiga belas sungai tersebut yaitu Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Baru Timur, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Sedangkan 2 (dua) kanal besar yang ada yaitu Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur. Peta sungai dan kanal yang melewati wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2 Peta Tematik Tiga Belas Sungai di Provinsi DKI Jakarta

Keadaan iklim di wilayah Jakarta menurut stasiun pengamatan, bahwa Jakarta tahun 2010 memiliki suhu udara rata-rata 28,4°C dengan kelembaban udara 72 persen, tekanan udara 1009,6 mbs, arah angin 270 point, kecepatan angin 2 mill/h, penyinaran matahari 45 persen dan curah hujan rata-rata 2.395 mm¹.

Secara umum, Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari dampak fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Fenomena perubahan iklim dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Pada akhirnya fenomena ini juga akan merubah pola kehidupan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir, kebakaran dan gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi Jakarta adalah banjir. Banjir di Jakarta terbagi menjadi dua, yaitu banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai-sungai karena curah hujan yang tinggi dan banjir yang terjadi karena kiriman dari daerah hulu, yaitu Bogor. Terjadinya banjir di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal serta tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah. Selain itu, dibangunnya hunian pada lahan basah atau daerah resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menjadi sangat berkurang. Hal lainnya adalah pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal. Banjir juga terjadi akibat rob yang melanda beberapa wilayah yang berada di pantai utara DKI Jakarta diantaranya Kamal Muara, Pluit, Penjaringan, Kalibaru, Cilincing dan Marunda.

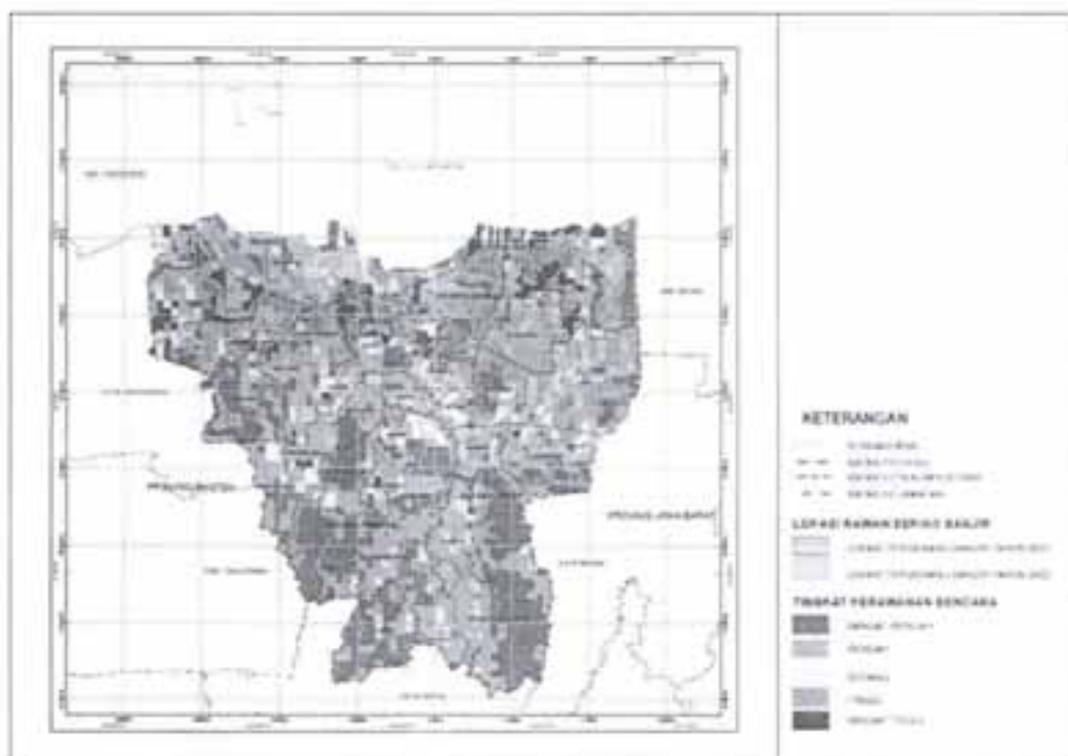
Jakarta telah mengalami beberapa bencana banjir, pada tahun 1980 daerah genangan Jakarta adalah seluas 7,7 km², pada tahun 1996 seluas 22,59 km², pada tahun 2002 adalah seluas 167,88 km², dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 238,32 km². Pada tahun 2002 daerah genangan diperkirakan mencapai sekitar 13 persen dari wilayah DKI Jakarta sedangkan pada banjir tahun 2007 sekitar 45 persen dari wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi banjir di kemudian hari, telah dipasang 34 unit *early warning* khususnya untuk sungai yang sering menjadi tampungan air hujan yaitu di Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Pesanggrahan dan Sungai Angke.

Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk, lingkungan pasar dan perkantoran. Bahaya kebakaran diperkirakan akan semakin meningkat terutama dengan bertambahnya permukiman yang saling berhimpitan. Di DKI Jakarta terdapat 53 kelurahan yang rawan bencana kebakaran.

Secara ekonomi, kebakaran mengakibatkan kerugian materi yang tidak sedikit. Pada tahun 2010, kebakaran yang terjadi di Jakarta telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 197,62 miliar dengan total area kebakaran mencapai 256,06 Ha. Untuk itu, untuk masa yang akan datang diperlukan upaya yang terencana dengan baik agar kebakaran dapat dihilangkan atau paling tidak diminimalisir.

Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10 sumber gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif dan berpotensi menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan seluruh Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat *seismic gap* (daerah jalur gempa dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga menyimpan potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta Bagian Utara yang merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.3.

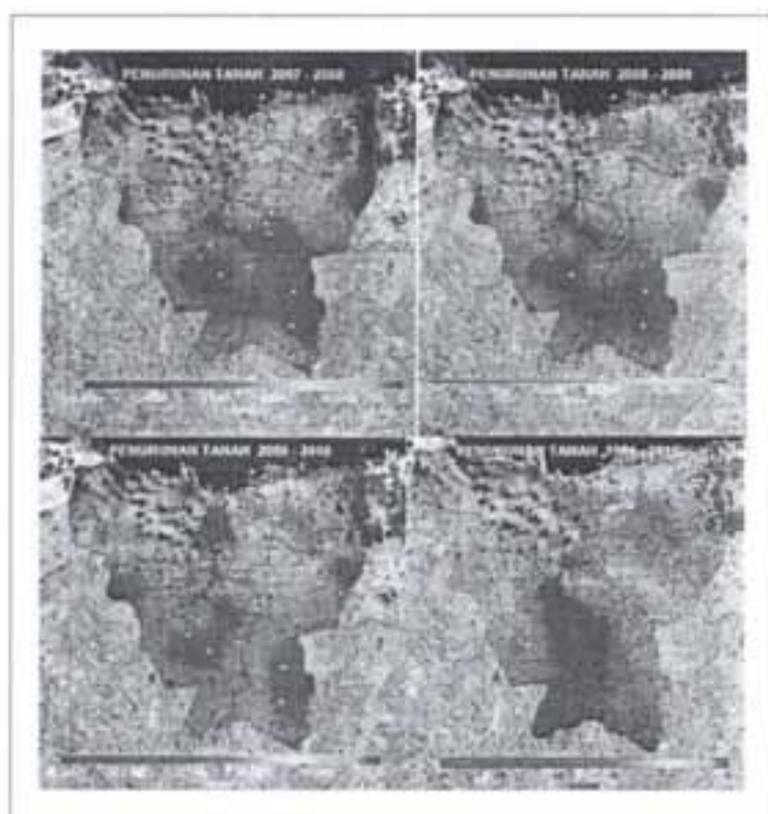
Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat, potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I – Level II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa berdasarkan data sekunder.



Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam
(Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030)

Di samping bencana banjir, kebakaran dan gempa, di Jakarta juga terdapat potensi bencana yang cukup serius, yaitu penurunan permukaan tanah (*land subsidence*). Secara umum laju penurunan tanah yang terdeteksi adalah sekitar 1 sampai 15 centimeter per tahun, bervariasi secara spasial maupun temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (*settlement*), penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gaya-gaya tektonik.

Beberapa daerah yang mengalami *land subsidence* cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai *subsidence* paling besar terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai *subsidence* relatif kecil. Peta penurunan tanah wilayah DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat terlihat pada Gambar 2.4.



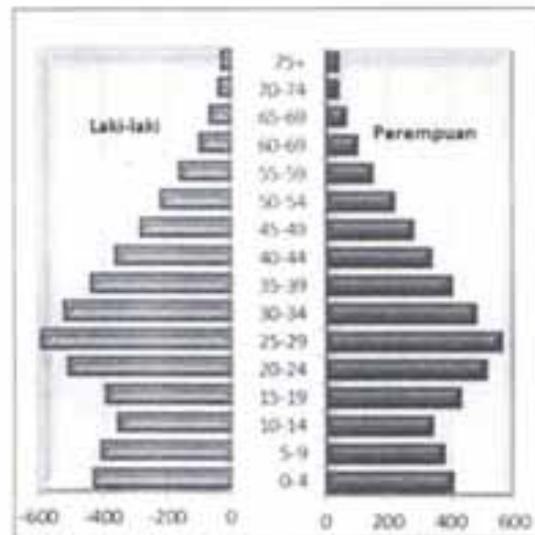
Gambar 2.4 Penurunan Tanah Jakarta dari Tahun ke Tahun.
(Sumber: Naskah Akademis RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030)

2.1.4 Kondisi Demografi

Pada tahun 2006, penduduk DKI Jakarta berjumlah 8.961.680 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk bertambah menjadi 9.607.787 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, penduduk laki-laki berjumlah 4.870.938 jiwa dan perempuan berjumlah 4.736.849 jiwa, dengan seks ratio laki-laki perempuan 102,83.

Laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta pada periode 2000 - 2010 sebesar 1,42 persen per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1990 - 2000 hanya sebesar 0,78 persen per tahun. Berdasarkan strukturnya, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2011 didominasi oleh penduduk berusia 25-29 tahun baik pada kelompok laki-laki maupun

perempuan. Struktur penduduk di Jakarta dapat dilihat pada gambar piramida penduduk berikut.



Gambar 2.5 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011
(Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011)

Secara alami jumlah penduduk Jakarta dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian. Selama tahun 2007 – 2010, tingkat kelahiran berkisar antara 205.729 sampai 223.383 jiwa. Sedangkan tingkat kematian berkisar antara 5.413 sampai dengan 6.591 jiwa. Gambar berikut memberi gambaran angka kelahiran dan kematian yang teregistrasi.



Gambar 2.6 Jumlah Kelahiran dan Kematian Provinsi DKI Jakarta
(Sumber: Jakarta dalam Angka 2011)

Berdasarkan penyebarannya, penduduk di Jakarta tersebar di lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perkembangan jumlah penduduk di lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terlihat pada Gambar 2.7. Distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari terendah sebesar 0,22 persen di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sampai yang tertinggi sebesar 28,02 persen di Kota Administrasi Jakarta Timur. Menurut strukturnya, penduduk DKI Jakarta tahun

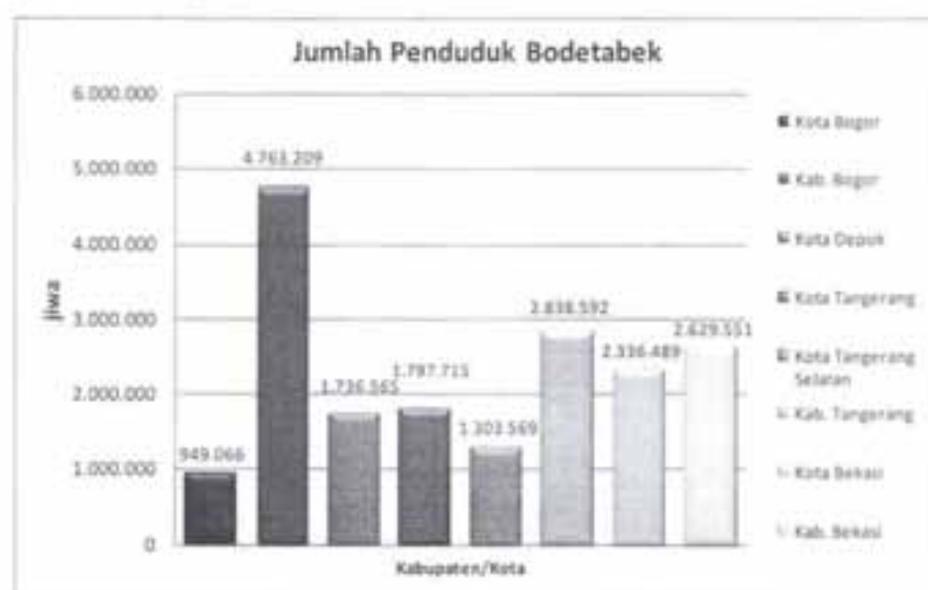
2010 masuk dalam kategori struktur penduduk produktif sebanyak 7.016.229 jiwa penduduk berusia antara 15-64 tahun.



Gambar 2.7 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kota/Kabupaten Administrasi Periode 2007-2010

(Sumber: Jakarta dalam Angka 2008-2011)

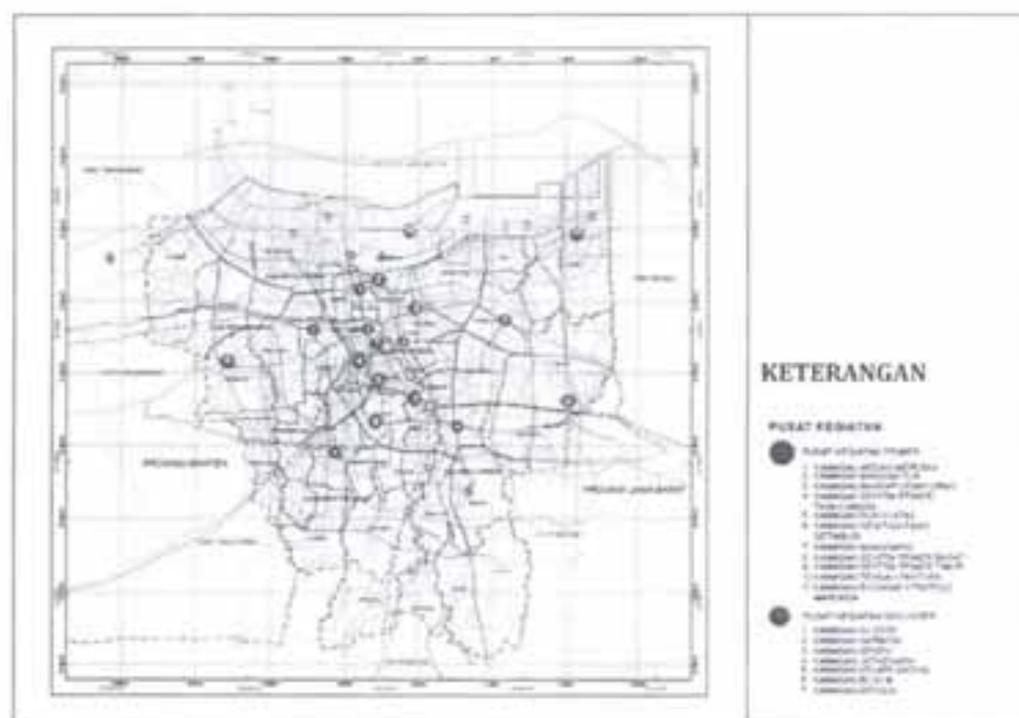
Pada tahun 2010, jumlah komuter dari Bodetabek menuju Jakarta mencapai 1,5 juta komuter per hari (Gambar 2.8). Pada siang hari, jumlah penduduk Jakarta mencapai 12,1 juta jiwa (9,6 juta penduduk DKI Jakarta dan 2,5 juta warga komuter). Secara keseluruhan jumlah penduduk di sekitar Jakarta, kawasan Bodetabek, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 18.354.756 jiwa.



Gambar 2.8. Jumlah Penduduk Bodetabek Tahun 2010

(Sumber: Kompilasi dari Hasil Sensus Penduduk 2010)

Sistem pusat kegiatan terdiri atas sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Sistem dan jaringan transportasi terdiri atas sistem dan jaringan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya, sistem prasarana sumber daya air terdiri atas sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya rusak air. Sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi. Pusat kegiatan di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada peta berikut.



Gambar 2.10 Peta Pusat Kegiatan Provinsi DKI Jakarta
(Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030)

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian Jakarta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengembirakan. Perekonomian Provinsi DKI Jakarta tumbuh sebesar 6,44 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 6,22 persen. Sementara itu, pada tahun 2009 walaupun pertumbuhan menurun jika dibandingkan tahun 2008 tetapi masih relatif tinggi, yaitu mencapai 5,01 persen. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami peningkatan sampai 6,77 persen pada tahun 2011 (Gambar 2.11).



Gambar 2.11 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi DKI Jakarta (Sumber: *Jakarta Dalam Angka 2011* dan *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2007-2012*)

Perkembangan ekonomi Jakarta pada tahun 2011 relatif lebih baik dari tahun 2010 dimana pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, meskipun masih terbuka adanya risiko krisis keuangan di beberapa negara di Eropa. Meningkatnya perkembangan ekonomi ini ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 PDRB atas harga berlaku tercatat sebesar Rp 566,44 triliun, sedangkan pada tahun 2011 meningkat pesat menjadi Rp 982,5 triliun (Gambar 2.12).



Gambar 2.12 Pertumbuhan PDRB Harga Berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011 (Sumber: *Kompilasi Jakarta dalam Angka 2011* dan *Berita Resmi Statistik 2011*)

Laju inflasi Jakarta dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2007 inflasi di DKI Jakarta sebesar 6,04 persen, inflasi mencapai dan pada tahun 2008 laju inflasi meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 11,11 persen yang merupakan inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2009 inflasi kembali menurun, hanya tercatat sebesar 2,34 persen, kemudian pada tahun 2010 inflasi meningkat lagi mencapai 6,21 persen, dan pada tahun 2011 turun hanya menjadi 3,97 persen (Gambar 2.13).

Komoditi yang berkontribusi terhadap inflasi Jakarta setiap tahunnya berubah-ubah. Kelompok komoditi yang relatif menyumbang inflasi cukup tinggi adalah kelompok bahan makanan, kelompok sandang, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Fluktuasi laju inflasi ini

dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah, dan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan faktor eksternal meliputi perubahan perekonomian global dan kondisi kemampuan perekonomian mitra dagang di luar negeri. Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta terdapat pada Gambar 2.13.



Gambar 2.13 Grafik Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta
(Sumber: Jakarta dalam Angka 2011)

Struktur perekonomian dapat dilihat dari distribusi masing-masing sektor yang didasarkan pada nilai nominal atas dasar harga berlaku. Dari nilai distribusi tersebut bisa diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Provinsi DKI Jakarta. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

Struktur perekonomian Jakarta pada tahun 2011, bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB (atas dasar harga berlaku), didominasi oleh sektor jasa (tersier) yang memiliki peranan sebesar 71,30 persen. Pembentuk sektor tersier meliputi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar 21,80 persen; Sektor Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan sekitar 27,90 persen; dan kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 12,40 persen, serta Sektor Jasa-jasa sebesar 11,60 persen. Ini menunjukkan struktur perekonomian Jakarta sudah mengarah kepada struktur jasa (*service city*).

Penyumbang perekonomian Jakarta lainnya adalah sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 15,73 persen, sedangkan sektor konstruksi sebesar 11,42 persen. Sementara sumbangan sektor primer di Jakarta hanya sebesar 0,53 persen yang terdiri dari sektor pertanian sebesar 0,1 persen dan sektor pertambangan sebesar 0,43 persen.

Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode 2007-2010, Jakarta mempunyai kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan PDRB rata-rata per kapita sekitar 13 persen. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp 89.918.764 meningkat secara signifikan dari tahun 2007 yang hanya sebesar Rp 62.490.339,- (Gambar 2.14).



Gambar 2.14 PDRB per Kapita DKI Jakarta atas Dasar Harga Berlaku.
(Sumber: Jakarta dalam Angka 2011)

Ketimpangan pendapatan di Jakarta yang diindikasikan dengan koefisien Gini (*Gini Ratio*) pada periode 2007-2010 relatif tetap dan masuk dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu antara 0,336 pada tahun 2007 dan 0,381 pada tahun 2010. Ketimpangan yang rendah ini ditunjukkan dengan 40 persen penduduk berpendapatan rendah di DKI Jakarta menikmati lebih dari 17 persen total pendapatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan di DKI Jakarta juga dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta juga diukur dari besarnya jumlah penduduk miskin. Angka kemiskinan Jakarta pada posisi bulan Maret 2007 tercatat 405,7 ribu jiwa (4,48 persen), bulan Juli tahun 2008 tercatat 379,6 ribu jiwa (3,86 persen). Selanjutnya pada tahun 2009 mencapai 323,17 ribu jiwa (3,80 persen) dan pada tahun 2010 tercatat 312,18 ribu (4,04 persen). Tercatat bahwa sampai dengan tahun 2011, secara makro penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta menjadi 355,2 ribu jiwa atau sebesar 3,75 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Sementara itu, Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan di DKI Jakarta juga cenderung menurun. Jika pada tahun 2007 Indeks Keparahan Kemiskinan 0,19, pada tahun 2010 menurun menjadi 0,17. Demikian juga terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan jika pada tahun 2006-2007 mencapai 0,75, pada tahun 2010 menurun menjadi 0,64. Secara garis besar jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.15 Gambaran Kemiskinan di DKI Jakarta Periode 2007--2011.
(Sumber: Jakarta dalam Angka 2011 dan Berita Resmi Statistik 2011)

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Selama periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, IPM DKI Jakarta menunjukkan peningkatan, yakni dari 76,59 pada tahun 2007 meningkat menjadi 77,03 pada tahun 2008, 77,36 pada 2009, dan 77,60 pada tahun 2010. Selanjutnya pada tahun 2011 IPM DKI Jakarta mencapai 78,00 yang merupakan tertinggi di Indonesia (Gambar 2.16). Jika diukur menurut skala internasional, posisi IPM DKI Jakarta tersebut berada dalam kategori menengah ke atas (66,00–79,99). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan.



Gambar 2.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta Periode 2007 – 2010

(Sumber: *Jakarta dalam Angka 2011* dan *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011*)

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu komponen IPM juga menunjukkan angka yang cukup baik dan meningkat dari tahun ke tahun. AHH, pada tahun 2007 tercatat 75,80 tahun, tahun 2008 mencapai 75,90 tahun, tahun 2009 mencapai 76,00 tahun, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 76,20 tahun (Gambar 2.16).

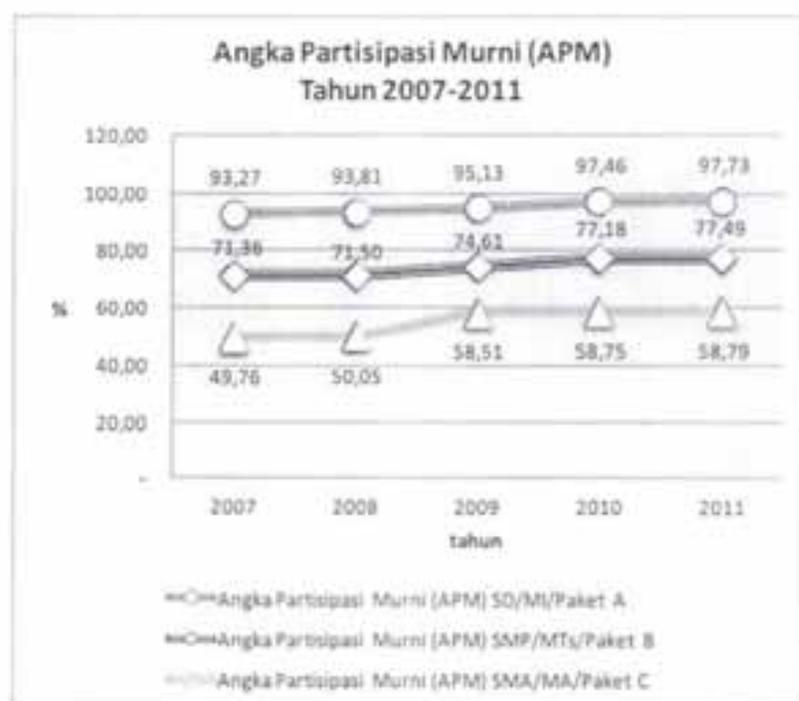
Sementara ini, Angka Melek Huruf juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Angka Melek Huruf tercatat sebesar 98,83 persen, pada tahun 2008 menurun menjadi 98,76 persen, pada tahun 2009 meningkat lagi menjadi 98,94 persen, dan pada tahun 2010 telah mencapai 99,13 persen.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2007 adalah 10,80 tahun. Pada tahun 2008 menjadi 10,82 tahun dan pada tahun 2009 menjadi 10,80 tahun. Pada tahun 2010 Rata-rata Lama Sekolah meningkat menjadi 10,93 tahun (Gambar 2.17).



Gambar 2.17. Angka Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta (Sumber: Kompilasi dari Jakarta dalam Angka 2011, Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010, dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2011)

Untuk peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang pendidikan, sejak tahun 2007 Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP dipertahankan di atas 100 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK meningkat dari 85,65 persen pada tahun 2007 menjadi 89,59 persen pada tahun 2011. Angka Partisipasi Murni (APM) juga meningkat dari tahun ke tahun. APM SD/MI/Paket A meningkat dari 93,27 persen pada tahun 2007 menjadi 97,73 persen pada tahun 2011, APM SMP/MTs/Paket B meningkat dari 71,36 persen pada 2007 menjadi 77,49 persen pada tahun 2011. Demikian juga untuk tingkat SMA/MA/Paket C, meskipun partisipasinya tidak terlalu tinggi, APM meningkat dari 49,76 persen pada 2007 menjadi 58,79 persen pada tahun 2011 (Gambar 2.18).



Gambar 2.18 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Periode 2007-2011 (Sumber: Kompilasi dari Data Dinas Pendidikan Provinsi DKI dan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tiap kelompok umur juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2006 sebesar 98,46 persen, meningkat menjadi 99,16 persen pada tahun 2010. APS penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2006 sebesar 90,16 persen, meningkat menjadi 91,45 persen pada tahun 2010. Sedangkan APS penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2006 sebesar 60,26 persen menjadi 61,99 persen pada tahun 2010.

Sedangkan peningkatan kesejahteraan sosial dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Ratio* (IMR) dari 8,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi 7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (Gambar 2.19). Untuk Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami hal yang sama, yaitu cenderung menurun. Jika pada tahun 2009 AKI mencapai 24 kasus sementara pada tahun 2010 AKI tersebut hanya 22 kasus. Selain itu, Angka Kesakitan (*Incident Rate*) DBD juga mengalami penurunan dari 356/100.000 penduduk pada tahun 2007 menjadi 50/100.000 penduduk pada tahun 2011. Di sisi lain, *Case Detection Rate* TB mengalami perubahan dari 82 persen menjadi 95 persen.



Gambar.2.19 Perkembangan Angka Kematian Bayi Periode 2007--2010
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2011)

Pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan penduduk, dihadapkan pada beberapa hambatan, diantaranya adalah wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) yang pada tahun 2006 terjadi 24.932 kasus dan bertambah menjadi 28.214 kasus pada tahun 2010. Selain DBD, terdapat penyakit HIV/AIDS yang pada tahun 2010 terjadi 139 kasus dengan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta Tuberculosis (TBC) yang pada tahun 2008 terdapat 22.506 penderita baru.

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan difokuskan pada pengembangan budaya keragaman (keragaman budaya) mengingat Jakarta mempunyai karakter multikultur, multi etnis, dan sangat heterogen dalam hal budaya. Dalam fokus seni budaya, beberapa kegiatan seni budaya yang telah terselenggara di DKI Jakarta antara lain Jakarta Binale oleh 200 komunitas, Pesta Seni Pelajar (PSP) Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 625 kelompok seni dan sekolah, Lomba Perkusi Betawi, Nasyid, Marawis dan Qassidah Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 255 kelompok seni, Jakarta International Literary Festival (Jilfest) yang diikuti oleh 158 pembicara dan 300 peserta workshop pementasan puisi, cerpen dan musikalisasi puisi, serta Jakarta Berlin Art Festival.

Dari segi jumlah pengunjung dan penonton seni budaya, telah terjadi peningkatan yang signifikan. Pada periode 2007-2011 pengunjung museum di Kawasan Kota Tua telah meningkat dari 827.239 orang menjadi 2.468.507 orang per tahun. Selain itu, terjadi peningkatan pula jumlah penonton pertunjukan seni budaya di Taman Ismail Marzuki, Gedung Kesenian Jakarta, Pertunjukan Seni di Ruang Publik/Hotel, Gedung Wayang Orang Bharata, Pusat Perkampungan Budaya Betawi dan Balai Latihan Kesenian dari 1.050.000 orang per tahun menjadi 4.650.000 orang per tahun.

Terkait dengan bidang olahraga, sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun dan mengembangkan sarana olahraga. Fasilitas olahraga tersebut tersebar di 5 (lima) wilayah dengan jumlah 5 Gelanggang Remaja Kota Administratif, 35 Gelanggang Remaja Kecamatan, 8 Gelanggang Olahraga dan 27 fasilitas lepas.

Tahun 2011 merupakan waktu paling banyak diselenggarakannya kegiatan olahraga di Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 68 kegiatan olahraga diadakan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun tersebut. Frekuensi ini meningkat tajam dari tahun 2010 yang hanya 43 kegiatan (Gambar 2.20). Sedangkan jumlah organisasi olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Provinsi DKI Jakarta sampai tahun 2011 adalah sebanyak 53 organisasi.



Gambar 2.20 Jumlah Kegiatan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta Periode 2007-2011
(Sumber: Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 2012)

Beberapa penyelenggaraan olahraga tahunan berskala internasional yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 di antaranya Jakarta Internasional 10 K, Enjoy Jakarta Basket Ball Tournament, dan Jakarta World Junior Golf Championship. Pada tahun 2011, Jakarta juga menjadi salah satu tuan rumah bersama penyelenggaraan SEA Games XXVI/2011. Dalam pembinaan olahraga, Provinsi DKI Jakarta juga telah melahirkan beberapa prestasi di antaranya: Peringkat Kedua pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII/2008 di Kalimantan Timur, Juara Umum pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) X/2007 di Kalimantan Selatan, POMNAS XI/2009 di Palembang dan POMNAS XII/2012 di Batam, Kepulauan Riau, serta memperoleh 3 medali emas, 2 medali perak dan 3 medali perunggu pada Special Olympics World Summer Games (SOWG) ke 13 di Athena, Yunani, dan Juara II ASEAN Paragames Tahun 2011 di Solo Jawa Tengah. Pada event itu, 19 Atlet asal DKI Jakarta berhasil memperoleh medali dengan perolehan medali 19 emas, 16 perak dan 11 perunggu.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Pencapaian bidang pendidikan Provinsi DKI Jakarta salah satunya ditunjukkan dengan tingkat kelulusan siswa yang semakin baik. Angka kelulusan siswa tingkat SD di DKI Jakarta meningkat dari 99,7 persen pada tahun 2008 menjadi 99,98 persen pada tahun 2010 dan 100 persen pada 2011. Persentase kelulusan siswa tingkat SMP meningkat dari 99,83 persen pada tahun 2009, menjadi 99,80 persen pada tahun 2010 dan 99,99 persen pada tahun 2011. Persentase kelulusan siswa yang meningkat cukup tajam adalah angka kelulusan tingkat SMA, yaitu dari 93,71 persen pada tahun 2009 menjadi 99,11 persen pada tahun 2010 dan 99,53 persen pada tahun 2011 (Gambar 2.21).



Gambar 2.21 Angka Kelulusan SMA di Provinsi DKI Jakarta Periode 2007–2011
(Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2012)

Tingkat pendidikan yang ditamatkan juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama, Sekolah Lanjutan Atas dan Akademi/Universitas meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang tidak sekolah dan belum tamat SD berkurang dari 12,55 persen pada tahun 2007 menjadi 9,15 persen pada tahun 2010.

Tabel 2.2. Persentase Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Periode 2007 – 2010

Jenis Pendidikan	2007	2008	2009	2010
Tidak Sekolah dan Belum Tamat Sekolah Dasar	12,55	13,40	10,53	9,15
Sekolah Dasar	20,50	19,85	20,25	21,62
Sekolah Lanjutan Pertama	20,29	19,61	19,79	20,37
Sekolah Lanjutan Atas	33,71	30,52	35,78	35,96
Akademi/Universitas	12,95	16,61	13,65	13,90
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Jakarta dalam Angka 2011)

(SD) Negeri sebanyak 2.224 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 319 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 117 unit dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 62 unit. Total perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Jakarta sampai tahun 2010 berjumlah 330 unit. Sedangkan untuk lembaga pendidikan informal lainnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1.258 unit.

Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Biaya Operasional Buku (BOB) untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta. BOP dan BOB merupakan program yang menunjang pemberian BOS oleh Pemerintah Pusat. Pemberian dana BOP dan BOB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar.

Pemberian BOP meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, BOP telah diberikan kepada 724.616 siswa SDN/MIN, 255.758 siswa SMPN/MTsN, dan 100.086 siswa SMAN/MAN, serta 43.989 siswa SMKN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah memberikan BOB untuk SMP Negeri sebanyak 227.611 siswa, untuk SMA/MA Negeri sebanyak 100.265 siswa (2009), 100.265 siswa (2010), 82.113 siswa (2011) dan SMK Negeri sebanyak 41.848 siswa (2009), 41.848 siswa (2010), dan 160.558 siswa (2011). Perkembangan pemberian BOP di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.22 Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOP) di Provinsi DKI Jakarta Periode 2007-2011

(Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2012)

Dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 12 tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan Kartu Gratis Sekolah atau Beasiswa Rawan Putus Sekolah jenjang pendidikan menengah untuk 3.321 siswa miskin (2008), 6.037 siswa miskin (2009), 7.041 siswa miskin (2010), dan meningkat menjadi 10.374 siswa miskin (2011) (Gambar 2.23). Melalui pemberian beasiswa ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menurunkan Angka Putus Sekolah pada tingkat SD dari 535 siswa pada tahun 2007 menjadi 347 siswa pada

tahun 2011 serta pada tingkat SMP dari 1.875 siswa pada tahun 2007 menjadi 1.176 siswa pada tahun 2011.



Gambar 2.23 Pemberian Kartu Gratis/Basiswa Rawan Putus Sekolah di Provinsi DKI Jakarta Periode 2008-2011

(Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2012)

Peningkatan kompetensi tenaga pendidik juga dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui tugas belajar yaitu pendidikan strata satu dan sertifikasi bagi guru SD dan SMP sebanyak 340 orang (2008), 1.294 orang (2009), 799 orang (2010), dan 12.915 orang (2011), serta strata satu dan sertifikasi bagi guru SMA/SMK sebanyak 3.187 orang (2008). Selain itu, strata dua bagi guru SMA/SMK sebanyak 28 orang (2008).

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan antara lain berkaitan dengan upaya peningkatan prasarana dan sarana pendidikan agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan optimal. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan pembangunan 1 gedung baru SDN, 1 gedung baru SMPN, 1 gedung baru SMAN, 1 gedung baru SMKN, rehabilitasi total sebanyak 53 gedung SDN, 35 gedung SMPN, 33 gedung SMAN/SMKN, serta rehabilitasi berat dan rehabilitasi sedang 815 gedung sekolah untuk tingkat SDN hingga SMAN.

Dengan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara dan sekaligus menuju kota berdaya saing global maka kualitas pendidikan Jakarta perlu mengacu pada standar internasional. Sampai tahun 2010, Jakarta telah memiliki 3 SD, 11 SMP, 23 SMA, dan 31 SMK yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000.

2.3.2 Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Jakarta telah menunjukkan pencapaian yang positif.

Prasarana dan sarana kesehatan terus ditingkatkan terutama rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, apotek, dan posyandu. Berdasarkan data tahun 2011, jumlah Rumah Sakit Umum Daerah di Jakarta sebanyak 7 (tujuh) unit, Rumah Sakit Pemerintah berjumlah 18 unit dan Rumah Sakit Swasta berjumlah 110 unit dengan kapasitas 11.012 tempat tidur. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas, yang sampai tahun 2009 mencapai 44 unit Puskesmas Kecamatan dan 295 unit Puskesmas Kelurahan. Hingga tahun 2011, terdapat 11 Puskesmas Kecamatan yang telah dilengkapi oleh fasilitas rawat inap selain rawat bersalin (RB). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menambah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapat Sertifikat ISO 9001:2008 yaitu 4

RSUD dan 4 UPT, 44 Puskesmas Kecamatan, serta 98 Puskesmas Kelurahan. Selain itu, kapasitas rawat inap pada seluruh RSUD/RSKD juga ditingkatkan dari 1.115 tempat tidur menjadi 1.654 tempat tidur. Dalam pencegahan gizi buruk juga telah disediakan fasilitas pelayanan pemulihan untuk balita penderita gizi buruk melalui *Therapeutic Feeding Center* (TFC) di 4 Puskesmas Kecamatan.

Dalam melayani warga tidak mampu, sampai tahun 2011 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di Provinsi DKI Jakarta melalui kartu Keluarga Miskin (Gakin), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan korban bencana sudah dapat diselenggarakan di 88 RS dan 339 Puskesmas. Total pelayanan kasus yang ditangani melalui Gakin, SKTM dan korban bencana meningkat dari 766.996 kasus pada tahun 2007, menjadi 2.705.509 kasus pada tahun 2011 (Gambar 2.24).



Gambar 2.24 Total Pelayanan Kasus yang Ditangani Melalui Gakin, SKTM, dan Korban Bencana Periode 2007-2011

(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 2012)

Terkait dengan penanggulangan penyakit menular, cakupan layanan pasien HIV/AIDS telah ditingkatkan dimana pasien yang masuk perawatan HIV sebesar 12.953 orang (Sep 2008), 17.280 orang (Sep 2009), 22.234 orang (Sep 2010), dan 25.011 orang (Juni 2011). Oleh karena itu, jumlah RW siaga aktif telah ditingkatkan dari 68 persen pada 2007 menjadi 100 persen pada 2011. Cakupan penanganan kasus diare dan pneumonia (ISPA) juga meningkat dari tahun ke tahun yaitu non pneumonia sebanyak 324.852 kasus (2008), 534.129 kasus (2009), 731.026 kasus (2010), dan 756.715 kasus (2011) serta pneumonia sebanyak 1.768 kasus (2008), 1.472 kasus (2009), 2.891 kasus (2010) dan 2.569 kasus (2011). Dalam rangka meningkatkan cakupan deteksi penyakit ISPA ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam mendeteksi penyakit ISPA sehingga kasus ISPA usia lebih dari 5 tahun yang ditemukan tidak banyak yang berlanjut menjadi pneumonia.

Sebagai penggerak pelayanan kesehatan, pada tahun 2010 jumlah tenaga kesehatan di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 50.284 orang yang terdiri dari kader pusat posyandu, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, dan bidan.

Tabel 2.3. Jumlah Tenaga Kesehatan Periode 2007-- 2010

Tenaga Kesehatan	2007	2008	2009	2010
Kader Pusat Posyandu	29.718	29.718	29.718	31.057
Dokter Umum	1.865	6.848	8.201	2.873
Dokter Spesialis	5.396	4.259	9.595	1.386
Dokter Gigi	959	2.977	3.049	586
Apoteker	158	751	751	2.699
Asisten Apoteker	1.135	2.999	2.999	4.401
Bidan	2.088	4.695	4.695	7.282

Sumber: Jakarta Dalam Angka 2011

Pembinaan kesehatan juga dilakukan melalui Puskesmas yang meliputi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), penyuluhan kesehatan, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk, penelitian epidemiologi, fogging, penanggulangan TBC, pembinaan usaha kesehatan masyarakat, dan pembinaan dukun bayi. Disamping itu juga dilakukan pelayanan persalinan, pemeriksaan ibu hamil, pasien berobat jalan, pasien rawat inap penyakit DBD, dan poliklinik gawat darurat 24 jam.

2.3.3 Pekerjaan Umum

Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur kota merupakan perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fokus layanan urusan pekerjaan umum meliputi sistem drainase dan pengendali banjir, jaringan jalan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, serta pelayanan penyediaan energi.

Pengembangan sistem drainase difokuskan pada pengendalian banjir dan pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana tata air, di antaranya melalui pembangunan waduk, polder, situ, normalisasi sungai, pengerukan dan pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB) serta pemeliharannya. Selain itu juga telah dilakukan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan dan pembersihan saluran atau kali.

Dalam lima tahun terakhir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menambahkan badan air seluas 8.288.308 m², normalisasi kali/sungai sepanjang 4.600 m² di 10 sungai, dan pengerukan saluran drainase kota sepanjang 24.197 m². Selain itu, juga dibangun prasarana sarana pengendali banjir di antaranya penyediaan pompa pengendali banjir sebanyak 65 unit dengan kapasitas 60,8 m³/dt, saringan sampah yang terbangun di 19 lokasi, pembangunan 32 pintu air, dan pembangunan 36 polder (alat pengendali banjir yang dapat memompa air yang tergenang di dataran rendah ke kanal) untuk mengurangi titik genangan.

Pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT) juga telah diselesaikan sehingga diperkirakan sudah dapat membebaskan 2,7 juta warga di 15.000 hektar daerah rawan banjir di kawasan Timur dan Utara Jakarta dari ancaman banjir. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah berhasil mengurangi titik genangan dari 123 titik menjadi 13 titik rawan genangan di jalan arteri kolektor.

Dalam peningkatan jaringan jalan sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan peningkatan jalan seluas 8.739 m² dan pelebaran jalan seluas 22.798 m², jalan tembus seluas 22.519 m², pembangunan dan peningkatan 14 buah jembatan. Selain itu, dalam mendukung operasional Kanal Banjir Timur (KBT), telah dilakukan pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar KBT seluas 130.231 m².

Tabel 2.4. Panjang Jalan Menurut Kota Administrasi dan Jenis Status Jalan Tahun 2010

Kota Adm.	Jenis Status Jalan			Jumlah
	Jalan Nasional		Provinsi	
	Tol	Negara		
A. Panjang Jalan (m)				
Jakarta Selatan	16.315,00	37.581,50	1.167.292,58	1.211.189,08
Jakarta Timur	37.298,00	41.285,00	1.311.425,00	1.390.008,00
Jakarta Pusat	6.394,00	3.772,50	654.084,55	664.251,05
Jakarta Barat	29.132,00	32.657,00	2.393.883,45	2.455.672,45
Jakarta Utara	34.342,00	37.351,00	1.073.227,26	1.144.920,26
Jumlah/Total	123.481,00	142.647,00	6.599.912,84	6.866.040,84
B. Luas Jalan / Road Area (m²)				
Jakarta Selatan	338.438,00	463.776,50	11.135.517,80	11.937.732,30
Jakarta Timur	1.104.520,00	819.118,00	11.262.972,25	13.186.610,25
Jakarta Pusat	252.396,00	69.012,50	5.287.941,09	5.609.349,59
Jakarta Barat	647.676,00	635.356,00	7.014.898,25	8.297.930,25
Jakarta Utara	697.716,00	756.623,00	6.948.015,58	8.402.354,58
Jumlah/Total	3.040.746,00	2.743.886,00	41.649.344,97	47.433.976,97

Sumber: Jakarta Dalam Angka 2011

Pengelolaan sampah di Jakarta memerlukan perhatian khusus. Timbunan sampah Jakarta pada tahun 2010 mencapai 6.139,33 ton per hari atau 2.396.746 ton per tahun dengan tingkat pengangkutan baru mencapai 84,92 persen per hari, yang berarti masih ada 15,08 persen sampah yang belum terangkut. Dalam menangani persoalan persampahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoperasikan SPA Sunter untuk mengolah sampah sebanyak ±1.460.000 ton selama 5 tahun dan TPST Bantargebang untuk mengolah sampah sebanyak rata-rata 5.300 ton/hari, TPArata-rata dapat mengolah 1.858.458 ton sampah per tahun, dan TPST rata-rata sebanyak 1.867.880 ton per tahun dengan produksi listrik sebesar 10,5 MW dan 43.800 ton kompos. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mendorong masyarakat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selama 5 tahun mampu menangani ± 85.729,8 ton sampah.

Selanjutnya dalam hal penyediaan air bersih, sekitar 75,64 persen rumah tangga di DKI Jakarta memiliki fasilitas air minum milik sendiri (termasuk sumur). Sekitar 22,18 persen rumah tangga masih menggunakan fasilitas air minum secara bersama-sama dengan rumah tangga lain, 1,83 persen rumah tangga mempergunakan fasilitas air minum umum dan sisanya sekitar 0,35 persen tidak memiliki fasilitas air minum (Gambar 2.25).



Gambar 2.25 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
(Sumber: Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010)

Berdasarkan cara memperolehnya, konsumen air minum dikelompokkan menjadi dua, yakni membeli dan tidak membeli. Dikategorikan membeli apabila rumah tangga menggunakan air minum dengan berlangganan PAM, membeli air kemasan, atau pedagang air keliling.

Rumah tangga yang memperoleh air bersih dengan cara tidak membeli umumnya berasal dari air tanah, yakni sumur dan pompa. Hal ini dapat diartikan bahwa masih cukup banyak rumah tangga yang menggunakan air tanah. Jika dibandingkan dengan tahun 2000, tampak adanya peningkatan rumah tangga yang memperoleh air minum dengan cara membeli, yaitu dari 54,44 persen menjadi 74,00 persen pada tahun 2010, atau naik sekitar 20 persen (Gambar 2.26). Artinya selama sembilan tahun terakhir, jumlah penduduk yang mengkonsumsi air bersih semakin meningkat karena pada umumnya air yang diperoleh dengan dengan cara membeli identik dengan air bersih.



Gambar 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010
(Sumber: Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 2010)

Kebutuhan air domestik di DKI Jakarta sekitar 495.706,34 kiloliter per tahun. Jika dikurangi dengan kebutuhan air di Kabupaten Kepulauan Seribu, maka jumlah kebutuhan airnya menjadi sekitar 494.831.212 m³ dan sekitar 60 persen kebutuhan air tersebut dipenuhi melalui sumur air tanah dangkal (1-40 mbmt).

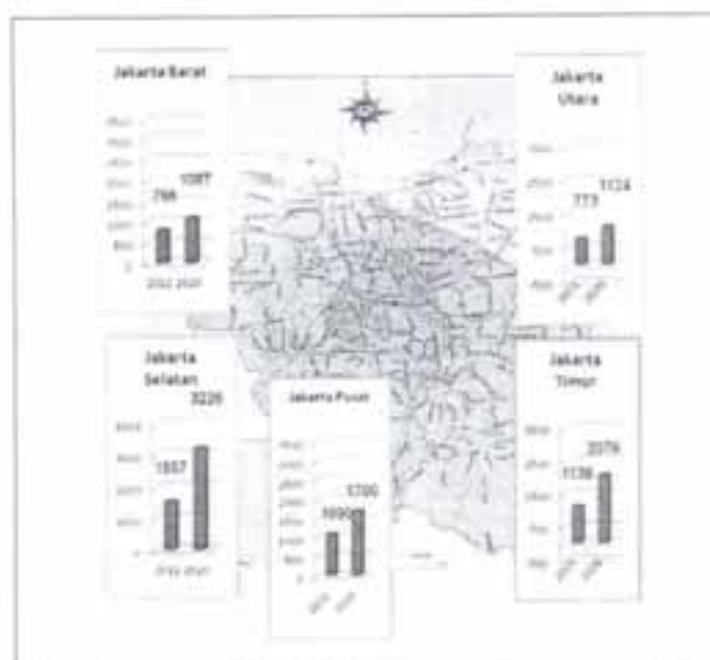
Tabel 2.5. Pemakalan Air Tanah Menurut Jenis Sumur Periode 2008-2010

Bulan	Jenis Sumur		Jumlah
	Sumur Bor	Sumur Pantek	
Januari	880.122	172.571	1.052.693
Februari	806.990	124.759	931.749
Maret	744.351	144.624	888.975
April	778.583	144.134	922.717
Mei	709.682	106.587	816.269
Juni	716.664	143.217	859.881
Juli	657.969	142.449	800.418
Agustus	600.899	121.761	722.660
September	648.587	180.330	828.917
Oktober	542.138	109.777	651.915
Nopember	686.535	124.951	811.486
Desember	629.037	133.097	762.134
Jumlah	8.401.557	1.648.257	10.049.814
2009	10.074.920	1.455.515	18.907.567
2008	18.805.854	3.073.558	21.879.412

Sumber: Jakarta Dalam Angka 2011

Kebutuhan energi Jakarta dipenuhi oleh energi yang berasal dari energi listrik dan gas. Di wilayah DKI Jakarta kebutuhan tenaga listrik terus meningkat. Berdasarkan data, jumlah pelanggan listrik di DKI Jakarta sebanyak 1.062.774 pelanggan yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga. Diperlukan penambahan pasokan baru terhadap sistem energi listrik Jakarta untuk meningkatkan keandalan ketenagalistrikan dibarengi dengan pengurangan ketergantungan pasokan terhadap Pembangkit di Muara Karang.

Diperkirakan beban puncak listrik di DKI Jakarta naik dari 5.360 Mega Watt (MW) pada 2011 menjadi 9.220 MW pada 2020, atau tumbuh rata-rata 6,2% per tahun. Sedangkan pertumbuhan tahunan beban listrik di Jakarta Selatan mencapai 8,4 persen, Jakarta Timur 6,9 persen, Jakarta Pusat 5,1 persen, Jakarta Utara 4,3 persen, dan Jakarta Barat 3,5 persen. Persebaran beban puncak listrik dan proyeksi pada tahun 2020 di DKI Jakarta dapat terlihat pada Gambar 2.27.



Gambar 2.27 Beban Puncak Listrik Jakarta Tahun 2011 dan Proyeksinya (MW) Tahun 2020
(Sumber: PT PLN, 2012)

Sedangkan penggunaan gas sebagai bahan bakar di DKI Jakarta juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2008 telah didistribusikan sejumlah 2.102.233 buah tabung LPG untuk keperluan rumah tangga dan 100.104 unit untuk industri kecil. Pada tahun 2009, penggunaan gas terbanyak adalah untuk rumah tangga, yaitu sebanyak 3.245.987 unit dan diikuti oleh penggunaan untuk bisnis sebanyak 254.212 unit. Sedangkan penggunaan untuk traksi (*train traffic*) hanya sebanyak 20 unit.

Dalam hal kebutuhan energi listrik untuk Kepulauan Seribu, sampai saat ini telah dibangun kabel bawah laut untuk menyalurkan listrik ke Pulau Untung Jawa, serta sedang dikembangkan sumber energi alternatif berupa PLTS (di Pulau Karya, Pulau Onrust, Pulau Rambut, Pulau Payung, dan Pulau Sebira), Pembangkit listrik tenaga Hidro di Pulau Karya, dan Pembangkit listrik Gabungan Gas dan Uap di Pulau Damar.

Data jumlah produksi bruto dan penjualan gas menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 hingga 2010 produksi terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 produksi mengalami kenaikan sebesar 203.988.889 m³ dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan penjualan tahun 2010 yang mengalami kenaikan sebesar 259.452.934 m³.

2.3.4 Perumahan Rakyat

Pembangunan perumahan dan pemukiman terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Jakarta secara optimal. Jumlah total Rumah Susun Sederhana yang berada di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 518 Blok dengan 40.544 unit rumah dan luas 227,15 Ha.

Rumah susun sewa di Jakarta, selain disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga diadakan oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 19 Tower Block (TB) atau 1.519 unit, Kementerian Pekerjaan Umum 20 TB atau 1.959 unit dan Perumnas

34 TB atau 3.328 unit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2007 sampai tahun 2012 telah membangun Rusun sebanyak 133 Blok (12.337 unit), terdiri dari Rusunami 3.366 unit dan Rusunawa 8.971 unit. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga telah memfungsikan 10.087 Unit Hunian Rusun, melakukan pemeliharaan rusunawa di 5 wilayah kota, serta meningkatkan kesiapan warga calon penghuni rusun.

Dalam melaksanakan pembangunan perumahan di lingkungan pemukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meremajakan penataan kawasan kumuh melalui program Mohammad Husni Thamrin Plus (MHT Plus) melalui pendekatan tribina (ekonomi, sosial, fisik prasarana dan sarana). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil mengurangi jumlah RW Kumuh dari 416 RW pada tahun 2008 menjadi 142 RW pada tahun 2011.

2.3.5 Penataan Ruang

Pengaturan terkait rencana umum tata ruang wilayah sampai tahun 2030 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. Perda ini merupakan arahan pengaturan tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta dan 6 (enam) wilayah kabupaten/kota administrasi. Untuk pelayanan kepada masyarakat, RTRW ini masih perlu dijabarkan dalam bentuk rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dan Peraturan Zonasi untuk 44 kecamatan di DKI Jakarta.

Pelayanan ketataruangan kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui penerapan standar sertifikasi ISO pelayanan tata ruang dan ISO perijinan pembangunan. Untuk pelayanan tata ruang telah diterapkan standar sertifikasi ISO 9001:2000 di 5 (lima) Suku Dinas Tata Ruang (DTR) dan 15 Seksi Kecamatan DTR serta ISO 9001:2008 di 18 Seksi Kecamatan DTR. Sedangkan untuk pelayanan perijinan pembangunan telah diterapkan standar sertifikasi ISO 9001:2000 di Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), 5 (lima) Suku Dinas P2B, dan 20 Seksi Kecamatan P2B.

Untuk meningkatkan informasi penataan ruang DKI Jakarta kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai media antara lain melalui pameran-pameran, *Jakarta City Planning Gallery* dan website. Website disediakan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi penataan ruang secara online yang mencakup berbagai produk rencana tata ruang, peraturan-peraturan ketataruangan, mekanisme dan prosedur pelayanan. Produk rencana berupa Lembar Rencana Kota (LRK) dapat diakses secara online dan interaktif. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang bahkan sampai pada persil lahan yang mereka miliki.

2.3.6 Perhubungan

Dalam hal urusan Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat. Sistem transportasi yang handal, berkapasitas massal, efisien dan menjawab kebutuhan terus dikembangkan, sehingga mampu menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas manusia dan barang dari dan ke luar Kota Jakarta.

Berdasarkan data tahun 2010, kebutuhan perjalanan DKI Jakarta mencapai 21,9 juta perjalanan/hari dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 7,3 juta unit yang terdiri dari kendaraan pribadi sebanyak 7,25 juta (98,8 persen) dan angkutan umum sebanyak 89.270 (1,2 persen). Pertumbuhan kendaraan bermotor dalam lima tahun terakhir (2006-2010) rata-rata sekitar 8 persen per tahun. Pertambahan kendaraan adalah sebanyak 1.284 kendaraan, terdiri

dari 216 mobil dan 1.068 motor setiap hari. Pada tahun 2010, *road ratio* Jakarta sebesar 6,25 persen.

Dalam upaya peningkatan pelayanan perhubungan dan transportasi, sejak tahun 2007 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan 6 (enam) Flyover (FO), 2 jalan layang non tol, dan 5 Underpass (UP) yang terdiri dari FO Roxy, FO Yos Sudarso, FO Martadinata, FO Latuharhari, FO Bandengan Utara/Selatan dan FO Tubagus Angke, 2 buah jalan layang yang terdiri dari jalan layang non tol Pangeran Antasari - Blok M dan Kampung Melayu - Tanah Abang, serta UP Angkasa UP Trunojoyo (Bagian dari jalan layang Non Tol) dan UP Kebayoran Lama (3 Underpass). Selain itu, dilakukan juga penambahan ruas jalan, yang terdiri atas jalan baru seluas 57.503 m² dan jalan layang non tol seluas 156.100 m².

Dari segi kebijakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki Kebijakan Transportasi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro yang meliputi :

a. Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum Massal

Kebijakan ini meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan *Bus Rapid Transit/ Busway*, dan pembangunan *Mass Rapid Transit (MRT)*. Sampai dengan tahun 2011 telah diselesaikan sebanyak 11 koridor jalur busway dengan armada berjumlah 568 unit. Disamping itu pula untuk menuju halte busway terdekat, masyarakat juga dipermudah dengan adanya feeder busway yang sampai tahun 2011 telah tersedia 3 Rute feeder busway dengan jumlah armada 15 unit. Angkutan umum massal busway ini sangat diminati masyarakat, dimana hal ini terlibat dari setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan jumlah penumpang, yaitu dari 86.937.488 penumpang di tahun 2010 menjadi 114.783.774 di tahun 2011. Upaya pengembangan dan penyempurnaan angkutan umum ini terus dilakukan hingga pembangunan koridor mencapai 15 koridor. Sedangkan untuk angkutan massal kereta api (*Mass Rapid Transit*) direncanakan akan dibangun dalam 2 tahap dan 2 Koridor (*North-South* dan *East-West*).

b. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan

Kebijakan ini meliputi pengembangan dan peningkatan kapasitas ruas jalan, peningkatan kapasitas simpang (dengan pembangunan *fly over* dan *underpass*), penyelesaian jalan tol lingkaran luar, jalan layang, pembangunan beberapa ruas *missing link* serta pembangunan *Area Traffic Control System (ATCS)* dan *Intelligence Transportation System (ITS)* yang merupakan integrasi antara sistem informasi, teknologi komunikasi dan pengguna jalan yang membantu sistem transportasi secara keseluruhan untuk bekerja secara efektif dan efisien.

c. Pengembangan Kebijakan Pendukung

Kebijakan ini meliputi penerapan Management Permintaan Lalu lintas (*Transportation Demand Management*), Pengembangan Sistem Informasi dan Kendali Lalu lintas (pembatasan lalu lintas) seperti pelarangan sepeda motor untuk melintasi jalur cepat di ruas jalan tertentu, pengaturan waktu kegiatan sekolah, pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di jalan tol dalam kota, penerapan jalan berbayar *Electronic Road Pricing (ERP)* yang rencananya akan menggantikan kebijakan *Three In One (3 in 1)*, Pembatasan parkir *on street*, peningkatan fasilitas park and ride dan pengembangan fasilitas pejalan kaki (*pedestrianisasi*).

Untuk pelayanan masyarakat Kepulauan Seribu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam meningkatkan kelancaran dan pemenuhan sarana penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu diantaranya dengan mengoperasikan Pelabuhan Angkutan Penyeberangan dari dan ke Kepulauan Seribu di Muara Angke yang berkapasitas labuh dan tambat mencapai 40 Unit kapal (≤ 50 GT) dan penyediaan angkutan penyeberangan yang saat ini berjumlah 8 Unit Kapal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta yang setiap harinya melakukan perjalanan pulang dan pergi menuju Kepulauan Seribu, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang dari 64.375 orang pada tahun 2010 menjadi 64.375

orang pada tahun 2011. Data tersebut belum termasuk penumpang yang menggunakan Kapal Penyeberangan milik masyarakat dari dan ke Kepulauan Seribu. Pemerintah juga selalu mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana penyeberangan dengan tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

2.3.7 Lingkungan Hidup

Dalam hal pelestarian lingkungan, telah dilakukan upaya pelestarian melalui pengembangan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sejak tahun 2007 sampai tahun 2011, telah dilaksanakan pengadaan lahan untuk RTH taman, makam, hutan kota dan pertanian seluas 1.081.166 m² atau 108 Ha yang terdiri dari taman kota di 50 lokasi seluas 575.619,65 m², taman interaktif di 8 lokasi seluas 19.062,85 m², RTH jalur hijau (eks SPBU) di 3 lokasi seluas 5.249 m², RTH makam di 9 lokasi seluas 229.336 m², hutan kota seluas 166.500 m², dan RTH pertanian seluas 85.400 m².

Selain itu, dilakukan juga pembangunan taman, jalur hijau, hutan kota dan RTH pertanian seluas 358.084,78 m² yang terdiri dari taman kota di 20 lokasi seluas 157.649,85 m², taman interaktif di 12 lokasi seluas 115.749,93 m², taman jalur hijau (eks SPBU) di 14 lokasi seluas 29.585 m², RTH hutan kota di 3 lokasi seluas 52.200 m², dan RTH pertanian seluas 2.900 m². Sejak tahun 2007 sampai 2011 juga telah dilakukan penataan jalur hijau di 71 lokasi seluas 304.072 m² dan penataan lahan ex-SPBU di 26 lokasi seluas 36.885 m².

Dalam hal pencemaran udara, telah dilakukan pemantauan pencemaran udara. Pada tahun 2012 telah tersedia 5 (lima) unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dan 1 (satu) *Mobile Station*. Dari hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap tujuh negara, yaitu, Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thailand), Manila (Philipina), Colombo (Sri Lanka), Jinan dan Hangzhou (China), Kathmandu (Nepal), dan Hanoi (Vietnam), kota Jakarta termasuk dalam kategori kualitas udara *Good* (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian kualitas udara di DKI Jakarta telah berjalan ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan uji laboratorium, kualitas udara ambien dan roadside pada tahun 2010 yang ditandai dengan Parameter Sulfur Dioksida (SO₂), masih memenuhi baku mutu dan memiliki kecenderungan meningkat. Sedangkan untuk parameter Nitrogen Dioksida (NO₂) dan TSP memiliki pola kecenderungan menurun. Parameter Debu (TSP) di beberapa lokasi seperti di Pulogadung dan Cilincing konsentrasinya telah melebihi baku mutu. Selanjutnya, parameter PM-10 cenderung stabil, SO₂ dan O₃ memiliki pola yang meningkat, sedangkan untuk parameter O₃, parameter CO, PM-10, SO₂ dan NO₂ konsentrasinya masih di bawah baku mutu.

Kontribusi NO_x dalam pencemaran udara Jakarta sebesar 21.000 ton/tahun dimana 15.000 ton diantaranya berasal dari sektor transportasi. Begitu juga dengan kontribusi CO sebesar 378.000 ton dimana 373.000 ton berasal dari sektor transportasi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ruas jalan yang hanya 2,5% per tahun.

Pencemaran air juga telah diusahakan agar dampak negatif yang ditimbulkan seminimal mungkin terhadap kehidupan masyarakat Jakarta. Untuk itu telah dilakukan pengolahan limbah cair pada IPAL Duri Kosambi sebanyak 300 m³/hari, IPAL Pulo Gebang 300 m³/hari, Waduk Setiabudi Barat 7.730.624 m³/tahun dan Waduk Setiabudi Timur 11.895.222 m³/tahun.

Kondisi air sungai di Jakarta memerlukan perhatian khusus menyangkut kualitasnya. Pada umumnya kondisi air sungai di DKI Jakarta dari hulu menuju hilir semakin kurang baik kualitasnya baik kualitas fisik, kualitas kimia maupun kualitas biologi. Berdasarkan Indeks Pencemar sungai, sungai-sungai di DKI Jakarta termasuk dalam kategori cemar sedang dan

cemar berat. Selain kualitas air permukaan, degradasi kualitas air tanah juga mengalami penurunan beberapa tahun belakangan ini, terutama terjadi di daerah - daerah yang semakin dekat dengan batas pantai.

Sama dengan pencemaran air sungai, kondisi air tanah Jakarta pada tahun 2009 juga memerlukan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan pembangunan. Kondisi air tanah yang ditandai dengan parameter fisik air tanah yang berupa Total Padatan Terlarut (TDS) dan kekeruhan, rata-rata masih baik, namun untuk wilayah Timur kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain dimana untuk parameter TDS terdapat tiga titik yang telah melebihi baku mutu.

Sedangkan parameter kimia air tanah kecenderungannya sangat bervariasi. Dalam hal parameter Besi (Fe), secara umum kondisi besi masih dalam kondisi yang relatif baik. Persentase wilayah yang melebihi baku mutu yaitu sebesar 9 persen, dimana kondisi ini memburuk dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 5 persen. Parameter Mangan (Mn) yang melebihi baku mutu cukup banyak, dan rata-rata di semua wilayah. Persentase konsentrasi Mn yang telah melebihi baku mutu adalah sebesar 27 persen. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, maka kondisi ini membaik dimana pada periode 2007-2008 persentase titik pantau yang telah melebihi baku mutu adalah 33 persen.

2.3.8 Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan umum dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan, Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil, Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan, dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Tercapainya persentase kepemilikan KTP sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 97,8 persen. Penerbitan KTP di Provinsi DKI Jakarta melalui prosedur normal, KTP mobile hari Sabtu dan pelayanan malam hari mencapai 1.844.957 KTP pada tahun 2007, 374.406 KTP pada tahun 2008, 924.179 KTP pada 2009, 1.027.892 KTP pada 2010 serta pada tahun 2011 mencapai 1.517.829 KTP. Dalam pelaksanaan e-KTP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat penghargaan Menteri Dalam Negeri bagi Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kota dengan realisasi perekaman e-KTP tertinggi di Indonesia. Sedangkan penerbitan akta kelahiran meningkat sebanyak 1.317.131 akta.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah mendata 1.989 penduduk rentan adminduk yang tinggal di kawasan non pemukiman (kolong tol, bantaran sungai, pinggir rel KA, dll).

2.3.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan yang mendapat perhatian khusus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan akses dan partisipasi perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan jabatan publik. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan dengan fokus pada peningkatan akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, dan area bermain yang aman dan nyaman serta penguatan terhadap lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hasil yang telah diperoleh dari pemberdayaan perempuan dan anak antara lain meningkatnya jumlah organisasi perempuan. Jumlah organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 63 organisasi pada tahun 2009. Sementara jumlah kelompok ekonomi perempuan yang produktif dan mandiri meningkat dari 662 kelompok pada tahun 2009 menjadi 734 kelompok pada tahun 2010. Selain itu, saat ini juga telah didirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Beberapa outcome lain dari program-program yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2007 berupa tertanganinya 6.297 kasus KDRT yang dilaporkan, bertambahnya jumlah organisasi perempuan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari 20 organisasi (2007) menjadi 63 organisasi (2011), bertambahnya kelompok ekonomi perempuan produktif dan mandiri dari 520 kelompok (2007) menjadi 740 kelompok (2011). Selain itu, outcome lainnya dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari 37,03 persen (2007) menjadi 52,44 persen pada tahun 2011. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk wilayah yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) dari Presiden RI pada tahun 2009 dan 2010.

2.3.10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Jakarta secara keseluruhan. Kebijakan yang dilaksanakan antara lain adalah pengendalian angka kelahiran total, peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Hasil dari kebijakan tersebut cukup menggembirakan dan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti mempertahankan total *fertility rate* (TFR) sebesar 2,1, dan meningkatnya kelangsungan pemakaian obat dan alat kontrasepsi pasangan usia subur dari 60 persen pada tahun 2007 menjadi 83,50 persen pada tahun 2011. Jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom) juga meningkat dari 581.352 peserta pada tahun 2007 menjadi 684.789 peserta pada tahun 2011 dan jumlah peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP, Implan) dari 301.081 peserta pada tahun 2007 menjadi 349.332 peserta pada tahun 2011. Selain itu, jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan BKB dan Posyandu dari 35.535 keluarga pada tahun 2009 menjadi 37.510 keluarga pada tahun 2010.

2.3.11 Sosial

Mengenal pelayanan ketahanan sosial, upaya yang telah dilaksanakan antara lain meningkatkan jumlah penyandang cacat yang dapat beraktivitas dengan lancar dari 229 orang pada tahun 2009 menjadi 300 orang pada tahun 2010, jumlah anak terlantar yang dapat ditampung di panti sosial dari 850 orang pada tahun 2009 menjadi 866 orang pada tahun 2010, dan meningkatkan jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri dari 600 keluarga pada tahun 2009 menjadi 835 keluarga pada tahun 2010.

Selain itu, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian karena Jakarta sebagai pusat aktivitas perekonomian mengakibatkan masyarakat daerah lain tertarik untuk datang ke Jakarta. Pada tahun 2009, jumlah PMKS meningkat menjadi 730.928 jiwa. Sampai saat ini tersedia 45 panti sosial loka bina karya yang dapat menampung 4.875 orang.

Indikator pembangunan masalah kesejahteraan sosial di Jakarta beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Jumlah anak terlantar mengalami penurunan. Pada tahun 2006 jumlah anak terlantar mencapai 10.258 jiwa, dan tahun 2009 jumlah anak terlantar hanya 7.428 jiwa. Jumlah pengemis juga mengalami penurunan dari tahun 2006 yang sebesar 1.379

jiwa menjadi 919 jiwa pada tahun 2009. Sedangkan jumlah anak jalanan juga menurun dimana pada tahun 2006 jumlah anak jalanan mencapai 4.478 jiwa sementara pada tahun 2009 menurun menjadi 1.140 jiwa. Jumlah lansia terlantar juga mengalami penurunan, jika pada tahun 2006 jumlah lansia terlantar mencapai 10.703 jiwa, pada tahun 2009 menurun menjadi 9.244 jiwa.

Beberapa pencapaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan masalah kesejahteraan sosial sejak tahun 2007 di Jakarta di antaranya mampu meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat beraktivitas dengan lancar sebanyak 333 orang, memenuhi kebutuhan dasar anak terlantar sebanyak 3.394 orang, menampung jumlah anak terlantar dan jalanan di Panti Sosial menjadi 2.130 orang, jumlah lanjut usia yang mendapat bantuan permakanan dari 910 orang menjadi 3.161 orang. Dari segi prasarana dan sarana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan kapasitas panti menjadi 5.200 orang.

Dalam program pembinaannya, juga telah ditingkatkan jumlah keluarga miskin yang mendapat pelatihan dan modal kerja sebanyak 950 keluarga, meningkatnya jumlah tenaga pendamping penyelenggara pelayanan Kesos anak, remaja, keluarga dan lansia terlantar yang terampil melayani PMKS sebanyak 1.683 orang, serta meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelatihan manajemen pengelolaan lembaga kesos dalam memberikan pelayanan kesos kepada masyarakat sebanyak 1.187 lembaga.

Sedangkan terkait respon penanganan bencana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil meningkatkan *respon time* dapur umum penanganan bencana dari 12 jam menjadi 3 jam, serta melakukan pelayanan kebutuhan makanan bagi korban bencana selama di pengungsian.

2.2.12 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta, dari tahun 2007 sampai tahun 2011 cenderung terus meningkat. Selama periode tersebut jumlah angkatan kerja tumbuh sebesar 4,7 persen per tahun. Angkatan kerja tahun 2007 mencapai 4.395.324 jiwa dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 5.143.830 jiwa. Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.28 Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi DKI Jakarta (Sumber: *Kompilasi Jakarta dalam Angka 2011 dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2011*)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2011 TPAK mencapai 69,36 persen. Persentase ini meningkat sebesar 4,41 poin dari tahun 2007.4,6 juta. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta mengalami penurunan rata-rata 1,07 poin atau 33.074 jiwa per tahun. Jika pada tahun 2007 TPT mencapai 12,57 persen, pada tahun 2011 TPT tercatat tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,80 persen (Gambar 2.29).



Gambar 2.29 Perkembangan Tingkat Angkatan Kerja dan Pengangguran Provinsi DKI Jakarta (Sumber: *Kompilasi Jakarta dalam Angka 2011* dan dari *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2011*)

Sektor perekonomian yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Sektor Perdagangan, Jasa-jasa dan Sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2010 angkatan kerja di Jakarta mayoritas bekerja di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebanyak 36,97 persen, diikuti oleh Sektor Jasa sebanyak 25,73 persen, dan Sektor Industri Pengolahan sebesar 16,10 persen.

2.3.13 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan urusan ini antara lain adalah peningkatan jumlah koperasi dan penambahan jumlah usaha kecil menengah di Jakarta.

Pada tahun 2009, telah terdaftar secara resmi 176 koperasi. Sampai tahun 2011 telah difungsikan 16 unit lokasi binaan dari 20 unit lokasi binaan yang ada, ditingkatkan kapasitas 267 Unit Koperasi Jasa Keuangan, sehingga dapat melayani akses permodalan hingga sebesar Rp 165,1 milyar kepada 69.152 UMKM, jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 4.990 unit dari total 7.476 unit Koperasi yang ada. Selain itu, kegiatan koperasi dapat menyerap 19.112 orang tenaga kerja di Koperasi dan 2.549.513 orang tenaga kerja di UMKM.

Selain itu, telah dilakukan peningkatan tenaga terampil dan profesional kepada para pengurus, pengelola dan pengawas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di 267 Kelurahan.

2.3.14 Penanaman Modal

Penanaman modal di Jakarta mempunyai fungsi yang sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah peningkatan usaha kemitraan bisnis melalui peningkatan promosi investasi, peningkatan kualitas pelayanan investasi melalui penyederhanaan prosedur layanan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal

Untuk urusan peningkatan penanaman modal, meningkatkan arus investasi modal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan perizinan usaha melalui pelayanan perizinan satu pintu (*one gate service*) sehingga waktu yang dibutuhkan lebih efisien. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mampu mempercepat proses perijinan yaitu untuk paket perizinan tanpa lahan, maksimal waktu penyelesaian perizinan 3 - 10 hari kerja, untuk paket perizinan dengan lahan kurang dari 5.000 m², maksimal waktu penyelesaian perizinan 25 hari kerja, dan untuk paket perizinan dengan lahan 5.000 m² atau lebih, maksimal waktu penyelesaian perizinan 38 hari kerja.

Peningkatan pelayanan penanaman modal telah berhasil meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta dari Rp 47,28 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 52,67 triliun di tahun 2011, meningkatkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi DKI Jakarta dari US\$ 4.680 juta pada tahun 2007 menjadi US\$ 4.824 di tahun 2011, meningkatkan investasi PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta dari Rp 4.218 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp 9.257 miliar di tahun 2011, serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dari Rp 142,21 miliar pada tahun 2007 menjadi 276 miliar di tahun 2011. Dan untuk lebih mempercepat layanan penanaman modal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menerbitkan Pergub No. 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

2.3.15 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Pada urusan ini, telah dilaksanakan beberapa kegiatan guna terwujudnya pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap berpegang pada prinsip *Good Governance*. Kebijakan pada urusan ini antara lain telah dilakukan pendelegasian sebagian wewenang pemerintahan (pengelolaan keuangan) pada tingkat Kota Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan. Dalam pengembangannya, 5 (lima) wilayah Kota Administrasi telah melakukan layanan satu pintu.

Peningkatan pelayanan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian telah menghasilkan beberapa prestasi. Hasil yang dicapai antara lain telah terlaksananya administrasi keuangan daerah, sehingga pada tahun 2011, Jakarta mendapatkan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tersusunnya konsep pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat kota administrasi, dipertahankannya *response time* pemadam kebakaran 15 menit, terlaksananya *e-Recruitment* pegawai Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1.724 CPNS sesuai formasi jabatan, diterapkannya sistem remunerasi (TKD), dan terbentuknya polisi komunitas pada 34 RW di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Salah satu prioritas untuk terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah reformasi birokrasi. Dari 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah yang signifikan, yaitu (1) **area organisasi**, pada area ini telah dilakukan restrukturisasi organisasi, penataan jabatan struktural, termasuk penataan organisasi yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada

masyarakat; (2) **area tata laksana**, pada area ini telah dilakukan pengembangan *e-government* antara lain mencakup *e-planning*, *e-budgetting*, *e-money* (SIPKD), *e-absensi*, *e-announcement*, *e-regular tender*, *e-procurement*, *e-recruitment*, *e-PSB* (Penerimaan Siswa Baru), *e-KTP*, *e-Akta Kelahiran*, dan *e-SKA* (Surat Keterangan Asal) untuk ekspor-impor; (3) **area peraturan perundang-undangan**, pada area ini telah dilakukan pemetaan produk perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan pusat, Penetapan Perda no. 4 Tahun 229 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Disabilitas, Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pergub No. 35 Tahun 2011 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Daerah, dan Pergub No.19 Tahun 2012 tentang Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta JPK; (4) **area sumber daya manusia**, telah dilakukan penyusunan standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi SDM melalui *assessment center*, penyusunan *man power planning*, penerapan sistem penilaian kinerja, pengembangan database kepegawaian, peningkatan profesionalisme aparatur kelurahan, penegakan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi SDM, penyelenggaraan tugas belajar, dan sertifikasi tenaga pendidikan; (5) **area pengawasan**, pada area ini telah dilakukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), monitoring dan evaluasi APBD dengan *e-money* dan *mobile government (m-govt)*; (6) **area akuntabilitas kinerja**, pada area ini telah dilakukan penandatanganan pakta integritas, penetapan indikator kinerja utama (*key performance indicator*), layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), pendelegasian pengelolaan keuangan di kecamatan/kelurahan, dan *quick responses time* terhadap pelayanan masyarakat; (7) **area pelayanan publik**, pada area ini telah dilakukan penataan dan pembangunan: (a) infrastruktur seperti Kanal Banjir Barat, sungai, waduk, situ dan drainase, pelaksanaan program MHT plus, *Intermediate Treatment Facilities*, kabel listrik bawah laut Kepulauan Seribu, pengembangan *green building*, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), posko pengaduan infrastruktur; (b) transportasi seperti busway, *feeder* dan angkutan perbatasan, MRT, operasional bus sekolah gratis, terminal Pulogebang, jalur sepeda, Dermaga Muara Angke dan angkutan penyeberangan dari/ke Pulau Seribu, *fly over*, *under pass* dan jalan layang non tol; (c) pendidikan seperti sertifikasi ISO 9001:2000 pada sekolah, beasiswa bagi siswa rawan putus sekolah dan siswa berprestasi, bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa, penerimaan siswa baru secara *on line*, bantuan operasional buku dan pendidikan, pendidikan inklusif, dan SMP terbuka; (d) kesehatan seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin) dan rentan (SKTM), pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Kesehatan DKI Jakarta, sertifikasi ISO 9001:2008 pada 44 Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, dan pelayanan KB gratis; (e) kependudukan seperti pelayanan terpadu malam hari, pelayanan KTP mobile, pelayanan e-KTP dan e-Akta; serta pelayanan lainnya seperti *samsat mobile*, *drive thru* pajak, gerai pajak, pelayanan terpadu satu pintu, penanggulangan/tanggap bencana, serta pengembangan Lurah dan Camat sebagai; (8) **area pola pikir - budaya kerja**, pada area ini telah dilakukan pembentukan tim dan kelompok kerja reformasi birokrasi, pembangunan *mindset* bagi *change master* dan *change agent*, *workshop* dan *team building* bagi pejabat eselon I dan II, *workshop* bagi Lurah dan Camat.

2.3.16 Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (RW)

Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendorong dan memfasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan lingkungannya. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah optimalisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan pembangunan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek).

Pembangunan untuk urusan pemberdayaan masyarakat telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2001 telah dilakukan uji coba pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di 25 Kelurahan dan dilanjutkan dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) pada tahun 2010. Selain itu juga telah dilaksanakan Program Perbaikan Kampung di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di wilayah DKI Jakarta.

2.3.17 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi urusan yang penting dalam proses pembangunan di Jakarta. Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan urusan ini antara lain adalah penerapan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan yang dimulai dengan *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-procurement*. Selain itu juga telah dilakukan penyediaan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet, serta pelayanan perijinan berbasis internet.

Hasil yang telah diperoleh dalam pembangunan urusan komunikasi dan informatika antara lain penyediaan *data center* untuk melayani berbagai aplikasi di tingkat Provinsi dan Kota Administrasi, penyediaan jaringan komunikasi berbasis *internet protocol* dari tingkat Provinsi sampai dengan tingkat kelurahan, pembangunan sistem aplikasi seperti sistem keuangan, pajak kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah, kepegawaian, pengujian kendaraan bermotor, aset manajemen, aplikasi pelelangan elektronik, dan sistem informasi kependudukan.

Untuk meningkatkan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika, telah dilakukan peningkatan jumlah kegiatan pemantauan, pendataan, pengawasan dan pengendalian jasa bidang postal dari 8 kali per bulan pada tahun 2009 menjadi 12 kali per bulan pada tahun 2010, penerapan *e-Announcement* dari 487 SKPD/UKPD pada tahun 2009 menjadi 587 SKPD/UKPD pada tahun 2010. Hasil lain adalah bahwa penerapan *e-Regular Tender* dari 100 SKPD pada tahun 2009 menjadi 193 SKPD/UKPD pada tahun 2010 untuk 3.409 kegiatan.

2.3.18 Pariwisata

Jakarta mempunyai potensi pariwisata yang cukup menarik bagi wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Untuk itu pembangunan urusan pariwisata mendapat perhatian yang cukup komprehensif.

Daya tarik wisata Provinsi DKI Jakarta memiliki beragam karakteristik dan keunikan tersendiri, yang terdiri dari daya tarik wisata bahari, sejarah, budaya, religi, rekreasi dan hiburan, kuliner, olahraga dan kebugaran. Jumlah daya tarik wisata pada masing-masing kota/kabupaten administrasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 35 lokasi destinasi wisata, dari jumlah tersebut 26 lokasi merupakan pusat perbelanjaan dan kuliner.
- Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki 35 daya tarik wisata dimana 8 lokasi merupakan pusat perbelanjaan, 8 lokasi wisata pendidikan dan sejarah, serta 1 lokasi wisata minat khusus yaitu Pacuan Kuda Pulo Mas.
- Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki 20 daya tarik wisata yang terdiri dari wisata pendidikan, sejarah dan budaya, religi, bahari, rekreasi dan hiburan, wisata alam, belanja dan kuliner.
- Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki 22 daya tarik wisata yang terdiri dari 5 lokasi wisata religi, 7 lokasi wisata belanja, dan 10 lokasi wisata sejarah dan pendidikan.

- e. Jakarta Pusat memiliki daya tarik wisata terbanyak yaitu 42 lokasi.
 f. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki daya tarik tersendiri dengan jumlah pulau sekitar 110 yang terbagi atas pulau wisata, konservasi, sejarah, dan pemukiman.

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jakarta meningkat secara signifikan sejak tahun 2007. Pada tahun 2007, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 1.216.057 orang meningkat menjadi 2.003.944 pada tahun 2011 (Gambar 2.30). Demikian pula halnya dengan jumlah wisatawan nusantara, dimana jumlah kunjungannya pada tahun 2011 mencapai 26.760.000 orang meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2007 yang hanya 14.055.328 orang.



Gambar 2.30 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jakarta Periode 2007--2011
 (Sumber: Data Kepariwisata Jakarta 2011)

Perkembangan pariwisata di Jakarta telah mampu meningkatkan Tingkat Hunian Hotel berbintang dari 49,98% pada tahun 2007 menjadi 69,55% pada tahun 2011. Hotel melati dari 50,27% pada tahun 2007 menjadi 57,75% pada tahun 2011. Selain itu, dari sisi jumlah usaha pariwisata juga mengalami peningkatan dimana jumlah Industri Pariwisata naik dari 4.878 usaha pada tahun 2007 menjadi 7.153 usaha pada tahun 2011.

Kegiatan yang dilakukan pada urusan pariwisata antara lain adalah peningkatan promosi dengan cara pemberdayaan masyarakat pariwisata dan pemanfaatan ikon pariwisata dan budaya. Selain melakukan kegiatan promosi baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyelenggarakan berbagai event pariwisata di Jakarta. Pada tahun 2011 telah diadakan 87 event pariwisata dan budaya yang menjadi sarana promosi dan publikasi pariwisata Jakarta yang juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan peningkatan pelayanan di bidang pariwisata melalui kegiatan pemeliharaan dan penataan kawasan obyek wisata di DKI Jakarta antara lain Taman Impian Jaya Ancol, wisata Kota Tua Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, Kebun Binatang Ragunan, Monumen Nasional (Monas), Museum-museum (Museum Sejarah Jakarta, Museum Nasional, Museum Satria Mandala), Pelabuhan Sunda Kelapa, Pulau Wisata Umum Andalan di Kepulauan Seribu (Pulau Rambut, Untung Jawa, Pramuka, Tidung, Kelapa) dan obyek wisata lainnya.



Gambar 2.31 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Jakarta Periode 2007-2011
(Sumber: Data Kepariwisata Jakarta 2011)

2.3.19 Perdagangan

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu juga telah dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan, dan penataan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2009, pasar non modern (tradisional) yang ada di DKI Jakarta mencapai 154 pasar dengan klasifikasi dan rincian 1 pasar induk, 5 pasar regional, 20 pasar kota, 50 pasar wilayah, dan 78 pasar lingkungan.

Sarana perdagangan juga terus dibangun guna mengantisipasi permintaan konsumen masyarakat Jakarta. Sarana perekonomian yang telah dibangun antara lain adalah pasar, yang dibangun tersebar di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta. Jumlah pasar pada tahun 2010 adalah sebanyak 153 unit. Jumlah ini paling banyak terdapat di wilayah Jakarta Selatan, yaitu sebanyak 40 unit pasar.

Selain urusan perdagangan, urusan perindustrian juga mendapat perhatian khusus guna mendukung kegiatan perekonomian Jakarta. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah fasilitasi pengembangan industri kecil ramah lingkungan dan perbaikan mutu produk industri yang dihasilkan oleh perusahaan Jakarta.

Berkaitan dengan jumlah industri yang beroperasi di Jakarta, jumlahnya cenderung menurun, tetapi nilai produknya cenderung meningkat. Pada tahun 2007 jumlah industri besar dan sedang mencapai 2.566 perusahaan dengan nilai produksi mencapai Rp 177,83 triliun, sedangkan pada tahun 2008 jumlah perusahaan mencapai 1.866 perusahaan dengan nilai produksi sebesar Rp 215,65 triliun, dan pada tahun 2009 jumlah perusahaan mencapai 1.699 perusahaan dengan nilai produksi sebesar Rp 230,09 triliun.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Provinsi DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang dinilai cukup kompetitif dalam memimpin pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai Ibukota Negara, Provinsi DKI Jakarta juga merupakan kota yang paling berkembang diantara kota-kota lain di Indonesia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Makro

Perekonomian makro Jakarta tumbuh cukup baik. Jumlah total PDRB Jakarta berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 757,70 triliun pada tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp 862,16 triliun pada tahun 2010. PDRB perkapita pada tahun 2009 mencapai Rp 82,15 juta sementara tahun 2010 telah mencapai peningkatan yang cukup tinggi, yaitu Rp 89,92 juta.

Dari sisi pengeluaran, PDRB Jakarta didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada tahun 2009 mencapai 56,80 persen dari total PDRB, sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 56,63 persen. Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai 34,77 persen pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 34,70 persen. Sementara itu proporsi konsumsi pemerintah meningkat dari 8,27 persen pada tahun 2009 menjadi 9,39 persen pada tahun 2010.

Nilai pengeluaran perkapita terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 dengan harga konstan, konsumsi rumah tangga per kapita Jakarta mencapai 43,7 juta rupiah dan terus meningkat menjadi 49,37 juta per kapita pada tahun 2010. Dengan uraian di atas menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian Jakarta.

2.4.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan. Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun kebijakan dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, antara lain dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pengembangan *online system*; menindaklanjuti pengalihan PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah; melakukan evaluasi terhadap besaran NJOP untuk penetapan PBB; melakukan optimalisasi retribusi daerah; meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD; mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga; dan mengoptimalkan pengembangan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Perolehan DAU, Lain-lain Pendapatan yang sah, serta bagi hasil pengelolaan aset pusat di daerah.

Dalam pembiayaan pembangunan, selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah merencanakan penerbitan obligasi (*municipal bond*) yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012. Pembiayaan pembangunan melalui skema obligasi tersebut digunakan untuk membiayai beberapa

infrastruktur umum diantaranya: Terminal Pulo Gebang, Pengolahan Air Limbah Casablanca, dan Rusun Daan Mogot.

Tabel 2.6. Pendapatan dalam APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008-2012

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
	APBD-P	APBD-P	APBD-P	APBD-P	APBD
PENDAPATAN	19.031,85	19.371,64	22.963,35	26.845,69	30.642,74
Pendapatan Asli Daerah	10.381,54	10.363,44	12.315,40	16.280,13	18.685,00
A. Pajak Daerah	8.484,27	8.615,00	10.083,00	13.965,00	15.625,00
B. Retribusi Daerah	363,57	384,64	407,91	456,25	500,00
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	170,98	160,00	212,84	243,68	360,00
D. Lain-Lain PAD Yang Sah	1.362,73	1.163,80	1.611,65	1.615,21	2.200,00
Dana Perimbangan	8.523,93	9.008,40	10.006,09	8.658,41	9.111,46
A. Bagi Hasil Pajak	8.293,93	8.978,40	9.906,09	8.310,34	8.750,00
B. Bagi Hasil Bukan Pajak	230,00	30,00	100,00	138,17	151,55
C. DAU	-	-	-	209,91	209,91
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	126,38	-	641,86	1.907,15	2.846,28

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2011

2.4.3 Fasilitas Infrastruktur

Persaingan perekonomian global diproyeksikan semakin ketat. Jakarta sebagai kota yang multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan kota Jakarta yang berdaya saing global.

Secara keseluruhan, transportasi merupakan infrastruktur perekonomian yang sangat penting. Dengan ketersediaan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah juga diperlukan sistem transportasi yang maju, handal, modern, dalam arti terintegrasi antar dan inter moda.

Selain itu, infrastruktur energi juga dibutuhkan untuk aktivitas produksi. Dengan ketersediaan energi yang mencukupi didukung dengan efisiensi dalam penggunaannya akan mendorong tingkat produktivitas daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kemampuan daya saing. Salah satu infrastruktur energi yang krusial bagi kota Jakarta adalah infrastruktur listrik guna memenuhi kebutuhan Jakarta sebagai Ibukota.

Perekonomian daerah sangat tergantung dari jasa perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank di Jakarta mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini menandakan bahwa iklim perekonomian Jakarta cukup kondusif. Jumlah kantor bank yang beroperasi di Jakarta baik bank pemerintah, pembangunan daerah, BUMD, swasta, maupun bank asing dan campuran pada tahun 2010 mencapai 3.394

unit. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah bank tersebut baru mencapai 2.401 unit. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa Jakarta merupakan tempat yang menarik untuk melakukan usaha jasa keuangan.

2.4.4 Iklim Investasi

Fungsi Investasi di Jakarta sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor ekonomi yang berpengaruh di Jakarta antara lain ketersediaan tenaga kerja baik kualitas maupun kuantitas, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non ekonomi adalah kecepatan perijinan, kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2007 sampai dengan 2010 mengalami fluktuasi. Jika pada tahun 2007 jumlah angkatan kerja hanya 4,39 juta, pada tahun 2010 mencapai 5,27 juta. Selain jumlah angkatan kerja, faktor penentu investasi adalah kebijakan penentuan upah minimum provinsi (UMP) untuk pekerja. UMP di Jakarta terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan iklim investasi agar menjadi lebih kondusif. Nilai UMP Jakarta tahun 2011 mencapai Rp 1.290.000 per pekerja perbulan. Sementara UMP tahun 2009 dan 2010 berturut turut sebesar Rp 1.069.865 dan Rp 1.188.010 per pekerja per bulan.

Demonstrasi mahasiswa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi di Jakarta. Jumlah aksi demo dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 cenderung menurun. Hal ini menandakan bahwa stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban mendapat perhatian serius. Pada tahun 2008 jumlah demonstrasi mencapai 329 kali, pada tahun 2009 meningkat menjadi 472 kali dan selanjutnya pada tahun 2010 jumlah demonstrasi menurun menjadi 397 kali.

Tingkat kriminalitas di Jakarta juga semakin menurun baik tipe maupun jenisnya. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan perubahan sosial budaya dan politik yang terjadi pada masyarakat Jakarta. Angka kriminalitas pencurian dengan kekerasan mencapai 1.289 kejadian pada tahun 2008, sementara pada tahun 2010 jumlah tersebut menurun menjadi 6.046 kejadian. Sementara penganiayaan berat mengalami penurunan dari 2.053 kejadian pada tahun 2008 menjadi 1.937 kejadian pada tahun 2010.

Dengan kondisi tersebut, sepanjang tahun 2009 pertumbuhan penanaman modal atau investasi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan hasil yang positif, dan terbesar dalam tiga tahun terakhir. Target investasi pada tahun 2009 sebesar Rp 46 triliun, sedangkan realisasi investasi mencapai Rp 64,79 triliun atau mencapai 120 persen dari target semula. Hal ini menandakan, DKI Jakarta tetap menarik bagi investor domestik dan mancanegara untuk menanamkan modalnya.

Pencapaian investasi pada tahun 2009 tersebut terdiri atas sektor penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 55,1 triliun dan sektor penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 64,79 triliun. Sedangkan sumber investasi asing didominasi dari empat negara yakni Singapura sebesar US\$3,36 miliar, Belanda US\$1,12 miliar, Korea Selatan US\$0,27 miliar, dan Inggris US\$0,18 miliar.

Sepanjang tahun 2008, sektor PMA mendominasi iklim investasi di Jakarta. Namun pada tahun 2009, PMA mengalami penurunan cukup tajam karena diakibatkan krisis finansial global yang masih memengaruhi beberapa negara, sehingga para investor asing membatasi investasinya ke luar negeri, termasuk ke Kota Jakarta.

Di sisi lain, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 4,59 triliun turun hampir 50% dari tahun 2009 yang mencapai melayanan Rp 9,69 triliun.

Sebaliknya penanaman modal asing meningkat 16,7 persen dari 5,51 Miliar Dollar Amerika pada tahun 2009 menjadi 6,42 Miliar Dollar Amerika pada tahun 2010.

2.4.5 Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kondisi kualitas sumber daya manusia yang bekerja di Jakarta didominasi oleh pekerja dengan pendidikan tertinggi sekolah menengah umum yang jumlahnya mencapai 1,08 juta pekerja. Dari jumlah tersebut, pekerja laki-laki sebanyak 749,8 ribu dan perempuan 331,04 ribu orang. Sementara itu pekerja tamatan pendidikan sekolah menengah kejuruan berjumlah 874,9 ribu orang yang terdiri dari 576,8 ribu laki-laki dan 298,1 ribu perempuan. Sedangkan yang berpendidikan universitas mencapai 480,9 ribu orang yang terdiri dari 294,6 ribu laki-laki dan 186,3 ribu perempuan. Secara total jumlah sumber daya manusia yang bekerja di Jakarta tahun 2010 adalah 4,68 juta dan lebih tinggi dari jumlah pekerja pada tahun 2009 yang hanya mencapai 4,1 juta pekerja.

Pada tahun 2011 persentase kelulusan untuk jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan yang sederajat adalah 99,52 persen. Untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masing-masing sebesar 100 persen dan 99,99 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta menyadari arti pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas. Diharapkan produktivitas sumber daya manusia Jakarta meningkat sehingga dapat menjadi daya saing bagi Jakarta untuk masa yang akan datang.

2.4.6 Lingkungan Strategis Nasional, Regional, dan Global

Perkembangan nasional, regional, dan global dalam 20 tahun mendatang merupakan tantangan yang harus dihadapi kota Jakarta. Untuk itu diperlukan persiapan dan perencanaan komprehensif dari berbagai aspek termasuk penguatan kapasitas inovasi sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Perubahan lingkungan nasional secara langsung akan mempengaruhi kondisi dan kinerja kota Jakarta. Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, perubahan lingkungan dunia usaha, dan perubahan praktek bisnis. Dalam pengelolaan keuangan, lembaga Pemeringkat Efek Indonesia (PERFINDO), telah memberikan peringkat AA Plus dengan *stable outlook* kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang artinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang relatif.

Pada lingkup regional, perubahan tatanan ekonomi, sosial, dan budaya ditandai dengan rencana terbentuknya masyarakat ASEAN pada tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa dalam kerangka *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*.

Sementara itu, di tingkat global perubahan tatanan ekonomi sosial dan budaya ditandai oleh semakin berperannya *multi national corporation*, terintegrasinya sistem keuangan global, perdagangan bebas, serta munculnya regionalisasi perekonomian. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, maju dan modern akan berdampak pada tinggi dan kompleksnya dinamika pasar dan perubahan sosial budaya masyarakat.

Kinerja perekonomian Jakarta yang baik, telah menempatkan Jakarta pada posisi 17 dari 200 kota metropolitan dengan kinerja ekonomi terbaik di dunia berdasarkan laporan *Global Metro Monitor 2011*. Dari segi daya saing global, pada tahun 2012 *Economist Intelligence Unit* juga menempatkan daya saing kota Jakarta ke dalam peringkat 81 dengan skor 44,1 dari 120 kota dunia. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan untuk menarik modal atau investasi,

bisnis, dan pengunjung. Kondisi Jakarta terkait dengan daya saing kota dapat digambarkan melalui beberapa indikator di antaranya kemampuan ekonomi makro dan keuangan daerah, infrastruktur, iklim investasi, kapasitas dan kualitas SDM, serta posisi Jakarta di lingkungan nasional, regional, dan global.

Sedangkan dalam kategori *Asian Green City Index* berdasarkan hasil penelitian *The Economist Intelligence Unit* yang difokuskan pada kondisi dan kebijakan pengelolaan lingkungan, Jakarta masuk kedalam klasifikasi kota sejajar dengan Bangkok, Shanghai, Beijing dan Kuala Lumpur. Klasifikasi ini diukur berdasarkan delapan kategori yaitu energi dan CO₂, tata guna lahan dan bangunan, transportasi, limbah, air, sanitasi, kualitas air, dan lingkungan pemerintahan.

BAB III

ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Jakarta telah memberikan hasil yang menggembirakan yang ditandai dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak permasalahan baik dari sisi sumber daya maupun teknis operasionalnya. Berdasarkan kajian terhadap kinerja pembangunan Provinsi DKI Jakarta selama sepuluh tahun terakhir, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana kota, daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah.

3.1.1 Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah

A. Sistem Transportasi

Pembangunan transportasi di DKI Jakarta masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak mencukupi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung pelabuhan dan bandar udara, transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Kapasitas jalan sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota Jakarta. Penambahan ruas jalan yang hanya sekitar 1 persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 11 persen per tahun. Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan. Hampir semua ruas jalan arteri di Jakarta sudah mengalami kemacetan.

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Kapasitas angkutan umum hanya mampu melayani sekitar 19 persen dari jumlah permintaan perjalanan. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu. Data tahun 2011 menunjukkan bahwa penambahan jumlah kendaraan roda empat setiap hari mencapai 550 unit dan kendaraan roda dua 1600 unit.

Sistem dan jaringan transportasi multimoda belum terintegrasi dengan baik menyebabkan tidak efisien dan efektifnya mobilitas penduduk. Sistem transportasi angkutan jalan raya tidak terhubung dengan baik dengan sistem dan jaringan transportasi berbasis rel. Begitu pula sistem dan jaringan angkutan bus massal (busway) belum terintegrasi dengan sistem angkutan *feeder* yang melayani permukiman masyarakat.

Ketersediaan prasarana jalan dan akses untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta tidak memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses aliran barang yang pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Akses jalan menuju dan dari pelabuhan dan bandara menggunakan jaringan jalan yang juga digunakan untuk menunjang kegiatan perkotaan lainnya. Padahal kendaraan barang yang melintas termasuk kendaraan dengan beban berat. Kondisi seperti ini

selain merusak daya tahan jalan yang ada juga meningkatkan beban jalan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang dilewatinya.

Ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota Jakarta.

Faktor lain yang menyebabkan kemacetan adalah rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidaksiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas.

B. Banjir dan Genangan

Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan faktor penyebabnya banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: i) banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman, ii) banjir yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir atau di Jakarta dengan topografi wilayah rendah, iii) banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob). Bencana banjir luar biasa terjadi apabila ketiga faktor penyebab banjir dan genangan tersebut terjadi secara bersamaan seperti pada tahun 2002 dan 2007 yang mengakibatkan kerugian fisik-material dan ekonomi sangat besar bagi warga kota.

Banjir akibat tingginya intensitas hujan di wilayah hulu terutama di Bogor dan Depok meningkatkan volume dan tinggi air pada sungai Ciliwung yang mengalir ke Kota Jakarta. Peningkatan volume air yang masuk langsung ke sungai disebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air di hulu sungai akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali. Air hujan yang masuk melebihi kapasitas dan daya tampung sungai yang makin dangkal dan menyempit. Meningkatnya volume air sungai pada waktu terjadinya hujan deras di wilayah hulu dapat dimonitor dari ketinggian pintu air di Katulampa Bogor. Di samping berkurangnya daerah resapan, pendangkalan dan penyempitan sungai di sepanjang daerah aliran Sungai Ciliwung meningkatkan potensi banjir karena meluapnya air sungai. Selain itu perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di selokan dan sungai dapat menghambat aliran air serta terjadinya sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai dan saluran.

Banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di Kota Jakarta terjadi pada satu waktu ketika peningkatan volume air hujan tidak dapat ditampung sungai dan saluran drainase kota yang ada. Selain itu Jakarta juga merupakan muara dari 13 sungai yang mengalir dari wilayah hulu dengan sebagian besar (40 persen) topografi wilayah Jakarta merupakan dataran rendah (1-1,5 meter dpl). Beberapa bagian wilayah Jakarta menjadi lokasi langganan banjir dan genangan karena terletak pada dataran rendah dan daerah aliran sungai.

Banjir dan genangan terjadi juga akibat pasang air laut atau dikenal dengan banjir rob yang terjadi di pantai utara Jakarta. Gelombang tinggi disertai banjir rob yang terjadi di perairan utara Jakarta disebabkan karena perubahan angin barat yang terjadi di musim penghujan. Dampak banjir rob di pesisir pantai utara Jakarta semakin parah dengan terjadinya penurunan tanah yang mencapai 10 centimeter setiap tahunnya.

C. Pengelolaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air bersih, meliputi: i) masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, ii)

terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah, iii) keterbatasan jaringan pelayanan air bersih.

Penyediaan air bersih yang berasal dari sumber air tanah perlu dikendalikan secara ketat dengan memperhatikan prinsip keseimbangan lingkungan. Pengambilan air tanah yang tidak terkendali menimbulkan dampak terhadap penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang sampai saat ini berkisar antara 1-15 centimeter per tahun terutama di wilayah pantai utara Jakarta. Penurunan muka tanah juga disebabkan oleh adanya beban bangunan (*settlement*), konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah dan gaya-gaya tektonik.

Meskipun penyediaan air bersih sudah mencakup lebih dari 75 persen rumah tangga di Jakarta, namun secara kualitas penyediaan air bersih masih menggunakan sumber air tanah (sumur) dan cakupan pelayanan dari sistem perpipaan masih rendah. Ketersediaan air baku secara berkelanjutan sebagai sumber air bersih menjadi masalah utama yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perpipaan, karena selama ini sumber air baku masih mengandalkan pengolahan air sungai dan pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur.

D. Ketahanan Energi Listrik dan Gas

Kebutuhan energi listrik setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kegiatan rumah tangga dan usaha. Peningkatan beban listrik di seluruh wilayah Jakarta, termasuk kebutuhan energi listrik di wilayah Kepulauan Seribu masih bergantung pasokan dari pembangkit listrik yang ada. Kebutuhan energi listrik di DKI Jakarta masih sangat bergantung pasokan pembangkit di Muara Karang dan belum ada penambahan pasokan dari sistem pembangkit baru. Pembangkit tenaga listrik di Provinsi DKI Jakarta seluruhnya dibangkitkan mesin pembangkit (*power generator*) diesel dan air. Untuk itulah perlu dipikirkan upaya untuk meningkatkan penyediaan energi listrik dan sumber energi lainnya yang memadai dan mencukupi.

Dalam konteks sumber energi gas, penggunaan gas sebagai bahan bakar terus meningkat terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan bisnis. Untuk itu penyediaan energi dari gas perlu mendapat perhatian khusus dari para pemangku kepentingan pembangunan DKI Jakarta.

E. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penediannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Perhitungan kekurangan kebutuhan rumah (*backlog*) mencapai 700.000 rumah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir atau sekitar 70.000 rumah setiap tahunnya.

Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada keterbatasan lahan di wilayah Jakarta. Sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dan swasta lebih banyak dibangun secara vertikal dibandingkan dengan rumah horisontal yang membutuhkan lahan besar. Namun, penyediaan hunian secara vertikal masih dihadapkan pada adanya kesenjangan budaya masyarakat yang belum terbiasa tinggal di hunian vertikal.

Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun dan menjadi 5.050 hektar pada tahun 2008, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.

3.1.2 Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam

A. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat tiga kelompok permasalahan pencemaran lingkungan di DKI Jakarta, yaitu persampahan, pengelolaan limbah cair dan domestik dan penanganan limbah cair serta polusi udara dan tanah.

Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pembuangan akhir. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma 'membuang sampah' belum pada 'mengolah sampah dari sumbernya'. Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*). Penyediaan tempat pembuangan akhir sampah dihadapkan pada keterbatasan lahan sehingga masih bergantung pada kerjasama dengan wilayah sekitarnya dalam penyediaan lahan. Hal ini dirasakan masih belum maksimal dan masih diperlukan usaha yang lebih komprehensif terutama dalam penggunaan teknologi pengelolaan sampah.

Pengelolaan air limbah masih dihadapkan pada terus meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestik rumah tangga dan sampah padat. Cakupan pelayanan sistem pengelolaan limbah kota yang terpusat belum memadai dan melayani seluruh wilayah kota. Selain itu pengelolaan limbah setempat belum banyak digunakan terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terencana. Sedangkan pada kawasan perumahan baru terencana penggunaan septik tank sebagai penampungan limbah domestik sudah banyak dilakukan. Pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) belum banyak diterapkan pada skala kota, tetapi masih terbatas pada lokasi industri logam berat dan pengolahan limbah rumah sakit.

Pencemaran tanah di Jakarta biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah; serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dan tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*). Sedangkan sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah.

B. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan sehat. Ketersediaan RTH di DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Permasalahan RTH di DKI Jakarta meliputi penyediaan dan penyebaran dan kualitas RTH publik dan privat di seluruh wilayah serta pengembangan tajuk hijau.

Peningkatan penyediaan RTH publik menghadapi masalah terbatasnya para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melakukan pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai jalur hijau. Di sisi lain penyediaan RTH privat terus didorong agar senantiasa meningkatkan luas RTH dalam pembangunan kawasan dan melalui mekanisme kompensasi penyediaan RTH di tempat lain. Peran serta masyarakat dalam peningkatan RTH diwujudkan dalam pengembangan tajuk hijau terutama melalui penghijauan

lingkungan dan bangunan. Permasalahan lain dalam konteks lingkungan adalah belum meratanya penyebaran secara proporsional RTH di wilayah DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk waktu ke depan pemangku kepentingan pembangunan daerah di Jakarta harus dapat mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai serta jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, danau, waduk dan situ, gedung-gedung bertingkat seperti mal, gedung perkantoran, apartemen, hotel dan fasilitas publik. Di samping itu, diperlukan upaya identifikasi ruang dan kawasan yang dapat difungsikan kembali dan berpotensi sebagai RTH serta upaya membebaskan lahan milik publik secara bertahap untuk dimanfaatkan sebagai RTH.

C. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi secara global memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan wilayah dan kelompok masyarakat miskin perkotaan. Kawasan pesisir pantai Jakarta termasuk kota yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terkena dampak dan resiko perubahan iklim. Faktor lain yang menyebabkan tingginya tingkat kerentanan Kota Jakarta adalah jumlah dan kepadatan penduduk serta persentase masyarakat miskin kota yang tinggal di pesisir pantai.

Perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi pola curah hujan setiap tahunnya, peningkatan suhu permukaan dan pola angin yang berubah-ubah. Selain itu, perubahan iklim juga akan meningkatkan ancaman bencana hidrometeorologis di Jakarta antara lain banjir, rob, dan kekeringan. Dampak lainnya adalah terjadinya kerusakan (degradasi) dan penurunan kualitas sumber daya lahan dan air serta terganggunya ketahanan pangan dan pada gilirannya akan berimplikasi kepada peningkatan jumlah kemiskinan. Permasalahan yang muncul ini sebagai akibat dampak perubahan iklim sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

D. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 2011-2030 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Dalam praktiknya, pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilakukan secara konsisten dikarenakan belum lengkapnya perangkat dan piranti peraturan untuk menunjang pelaksanaan RTRW. Penyelesaian permasalahan terkait penataan ruang tersebut menjadi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang (sesuai UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi yang tegas.

3.1.3 Dinamika Sosial Budaya

A. Pertambahan Penduduk Kota

DKI Jakarta mengalami pertambahan penduduk yang terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pertambahan penduduk ini tidak terlepas dari fungsi strategis Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang memiliki daya tarik bagi penduduk di luar Jakarta untuk

tinggal dan mencari penghidupan. Penduduk yang datang pun beragam, baik dari sisi budaya, etnis maupun tingkat pendidikannya. Keragaman ini menjadikan Jakarta sebagai kota yang kaya dengan budaya multikultur dan tempat pertemuan budaya. Apabila tidak dikelola dengan baik, keragaman ini dapat menimbulkan berbagai masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta ketidaksiplinan masyarakat dan kemiskinan.

Pertambahan penduduk DKI Jakarta disebabkan oleh tiga faktor yaitu: pertambahan penduduk alami, migrasi penduduk dari tempat lain dan penduduk komuter yang tidak permanen menetap. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana Jakarta dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang berasal dari luar Jakarta dan semua ikutannya atau urbanisasi dan pertumbuhan karena kelahiran (pertumbuhan alami). Pengendalian ini perlu dilakukan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, kesejahteraan rakyat dan pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya.

B. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Jakarta di tingkat global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan ditandai dengan masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki dan peningkatan proses belajar mengajar agar lulusan dapat lebih berkualitas. Dalam hal ini perlu juga ditingkatkan kualitas pengajar agar metode dan proses dapat diterima oleh peserta didik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing global. Permasalahan pendidikan Jakarta adalah penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, serta sistem pendidikan yang komprehensif.

Permasalahan lainnya adalah upaya peningkatan mutu pendidikan untuk mampu bersaing dengan kota-kota besar lain di dunia dan belum optimalnya integrasi sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Masalah lainnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan serta peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.

C. Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggemblirakan. Namun demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan serta penyebarannya yang kurang merata. Selain itu pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara prima dan menuju pelayanan berstandar Internasional.

Permasalahan lainnya dalam pembangunan kesehatan adalah belum optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta, penduduk usia lanjut, penduduk berkepentingan khusus, dan keluarga miskin. Selain itu, permasalahannya adalah bagaimana

upaya peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang berstandar internasional. Fokus lain yang penting dan perlu perbaikan adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah dan penyebaran tenaga kerja kesehatan, serta aksesibilitas warga Jakarta terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya pengendalian terhadap komersialisasi dalam penyelenggaraan kesehatan dan peningkatan partisipasi masyarakat yang konstruktif dalam pembangunan kesehatan.

Dalam merespon kebutuhan untuk penduduk usia lanjut diperlukan usaha untuk memfasilitasi secara konstruktif terutama bagi mereka masih memiliki keinginan dan kemampuan untuk beraktivitas secara aktif dan produktif. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan warganya diperlukan juga perlindungan dan aksesibilitas pelayanan sosial dalam rangka memfasilitasi kepentingan masyarakat lanjut usia dan para penyandang disabilitas.

D. Kemiskinan Kota

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan DKI Jakarta. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi.

Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

E. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi DKI Jakarta perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Peningkatan aksesibilitas pangan menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan mengingat Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan daerah lumbung pangan, sehingga sangat bergantung pada pasokan pangan daerah sekitarnya. Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, ketatnya persaingan pasar antara produk domestik dengan produk impor diduga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat di pasar. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan di DKI Jakarta yang berkelanjutan.

F. Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Jakarta yang aman, nyaman dan berdaya saing. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Jakarta merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan

apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Di sisi lain, pemahaman dan implementasi demokrasi yang tidak komprehensif telah menjurus pada kebebasan yang tak terkendali. Sebagian masyarakat merasa bebas untuk berbuat apa saja tanpa mengindahkan hukum. Kebebasan dan unjuk kekuatan telah menjadi model dan instrumen untuk menyampaikan tuntutan, yang bila tidak dikendalikan secara hati-hati berpotensi untuk menjadi tindakan-tindakan anarkis yang sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan normal masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat DKI Jakarta menjadi sesuatu yang patut diperhatikan dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pengendalian ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang aman, tentram dan tertib.

G. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan dengan fokus pada aspek pemuda dan olahraga menjadi hal yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Permasalahan terkait pemuda dan olahraga meliputi: peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan kepemudaan dan peningkatan pembangunan olahraga.

Faktor lain yang penting dalam rangka pembangunan pemuda dan olahraga adalah peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa, peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga, dan pengembangan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

H. Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak

Pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: perlunya peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, peningkatan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pemberian perlindungan dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara tepat sasaran dan optimal.

Pemberdayaan masyarakat menekankan pada pemberdayaan secara ekonomi dimana masyarakat dapat membangun kemandirian ekonomi. Selama ini sudah dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana bergulir di tingkat kelurahan untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat Jakarta.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan masih perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan dengan masih terbatasnya peran perempuan dalam pembangunan, masih banyaknya angka tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

3.1.4 Tata Kelola Pemerintahan

A. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan struktural, prosedural, kultural, dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain: penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*e-Government*), penyederhanaan perizinan usaha dan izin mendirikan bangunan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system".

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain pelaksanaan konsep reformasi birokrasi belum efisien dan efektif, pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan yang masih belum terpadu dan sistemik. Selain itu upaya penataan ulang secara bertahap dan sistematis terhadap pemerintah daerah, penataan kelembagaan atau institusi, dan tata laksana yang belum optimal. Selain itu kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih belum memadai dan belum profesional serta pelayanan publik masih belum prima. Permasalahan lainnya dalam konteks ini adalah hubungan antar lembaga Pemerintah, hubungan antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat masih belum sinergis.

B. Keuangan Daerah

Pembangunan Jakarta perlu didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Mobilisasi sumber-sumber pendanaan pembangunan tidak saja bergantung pada sumber pembiayaan konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan non-konvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah belum optimalnya dalam meningkatkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional.

Selain itu, DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan daerah lain. Sejalan dengan hal ini, DKI Jakarta harus mampu menyediakan prasarana dan sarana khusus yang sudah tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dalam kaitannya dengan hal ini maka permasalahannya adalah meningkatkan dukungan pendanaan untuk pembiayaan pembangunan dalam kerangka Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tata kelola keuangan daerah perlu terus ditingkatkan terutama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah di semua tingkatan pemerintah mulai dari kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi dan provinsi. Selain itu, peningkatan profesionalitas seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan DKI Jakarta menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta memenuhi standar yang ditentukan.

C. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan peranan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Permasalahan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan antara lain: peningkatan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang respon terhadap kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan masyarakat belum optimal. Dalam prakteknya, struktur kelembagaan organisasi masih belum optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Selain itu, tata laksana di lingkungan organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga masih perlu mendapat perhatian khusus, agar di masa depan tata laksana akan lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik akan lebih prima dalam artian dapat lebih cepat, mudah, dan murah. Pelayanan publik harus terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Apabila terwujud maka keluhan masyarakat dapat berkurang dan pada gilirannya tidak ada lagi keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Keserasian antara kelembagaan dengan ketatalaksanaan juga belum optimal, sehingga masih diperlukan langkah-langkah konkrit guna menyelaraskan antara kedua aspek ini agar terjadi sinergitas yang dinamis dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan yang prima. Permasalahan lain adalah kualitas dan kapasitas sumber daya pegawai yang masih belum memadai, sehingga berpengaruh pada lemahnya pelayanan publik yang langsung kepada masyarakat seperti kecamatan dan kelurahan.

D. Kerjasama Antar Daerah di Jabodetabekjur

Pembangunan DKI Jakarta seringkali terkait pemanfaatan sumber daya dengan wilayah sekitarnya. Untuk itu diperlukan kerjasama antar daerah untuk menangani masalah yang bersifat regional seperti pengelolaan sampah, transportasi, polusi dan banjir. Permasalahan utama kerjasama antar daerah adalah belum optimalnya koordinasi dalam kerangka kerjasama di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur). Koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan publik seperti transportasi dan pengelolaan air bersih masih perlu perhatian dari para pemangku kepentingan.

Dalam rangka kerjasama antar daerah di wilayah Jabodetabekjur telah dibentuk Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan program kerjasama antar provinsi dan kota/kabupaten di dalamnya. Untuk lebih mengefektifkan kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan peran BKSP melalui revitalisasi kelembagaan dan kewenangan yang lebih kuat dalam mensinergikan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah.

3.1.5 Ekonomi dan Investasi

A. Stabilitas Ekonomi

Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic growth*). Perkembangan situasi stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Jakarta) seperti: sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor

industri pengolahan; sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Kemudian untuk laju inflasi di DKI Jakarta hampir selalu berada di bawah nasional dalam lima tahun terakhir hingga tahun 2010. Sedangkan untuk nilai tukar dalam peranannya terhadap stabilitas ekonomi cenderung mengikuti dinamisasi dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bank Indonesia.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro melalui langkah-langkah untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi, stabilitas nilai tukar, serta tingkat bunga yang kompetitif.

B. Iklim Investasi

Permasalahan iklim investasi yang terjadi di DKI Jakarta diantaranya adalah kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewenangan pelayanan terpadu satu pintu pada saat ini hanya sebatas menerima berkas dokumen izin dan non izin selanjutnya akan diproses oleh SKPD terkait. Melihat tujuan dibentuknya pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengurangi prosedur dan mempercepat waktu proses perizinan, maka kondisi yang terjadi saat ini belum menunjukkan proses yang ideal.

Selanjutnya, selain permasalahan perizinan dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur serta kondisi ketentraman. Selain itu permasalahannya adalah belum tercukupinya pasokan energi, dan belum mantapnya sistem ketenagakerjaan. Dalam konteks ini Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian adalah jalan, pelabuhan, bandar udara dan sistem transportasi yang masih belum mendukung secara maksimal bagi dunia usaha. Permasalahan lainnya adalah mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.

C. Pengembangan Pariwisata

Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya promosi kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan belum menyatunya pengembangan objek, kawasan wisata di DKI Jakarta serta belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan pengembangan pariwisata. Selama ini promosi kepariwisataan masih sangat terbatas dan belum optimal dalam arti belum sepenuhnya terintegrasi.

Pengembangan objek dan kawasan wisata di DKI Jakarta belum dikembangkan secara terpadu dan dipasarkan dalam suatu paket wisata kota yang didukung berbagai sistem penunjang lainnya. Banyak objek wisata di wilayah DKI Jakarta belum dikembangkan secara optimal dan sesuai dengan potensinya.

D. Perdagangan dan Jasa

DKI Jakarta sebagai kota jasa memerlukan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan kota-kota internasional lain. Untuk mewujudkan fungsi kota jasa tersebut permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah persiapan infrastruktur guna menghadapi aktivitas perdagangan baik dalam maupun luar negeri terutama dalam menghadapi regionalisasi ekonomi. Hal ini penting karena regionalisasi ekonomi baik di lingkungan ASEAN maupun di luar ASEAN diperkirakan akan mempengaruhi perdagangan di DKI Jakarta. Dengan persiapan yang mantap maka kinerja DKI Jakarta dapat berkompetisi dalam konteks menghadapi AFTA (*Asean Free Trade Area*), ACFTA (*Asean-China Free Trade Area*), dan kelompok perdagangan internasional lainnya. Untuk itu diperlukan persiapan secara terencana dan sistematis agar produk DKI Jakarta dapat berkompetisi dengan

produk internasional, sehingga membanjirnya produk yang berasal dari luar negeri di DKI Jakarta dapat diantisipasi secara profesional.

Posisi strategis DKI Jakarta terhadap perekonomian nasional dan internasional membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan instrumen pembangunan untuk melangsungkan kegiatan perekonomian regional dan aktivitas jasa keuangan dan jasa lainnya berskala nasional dan internasional. Di masa yang akan datang, DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodir dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketersediaan SDA dan infrastruktur publik yang mencukupi dan memadai serta berdaya saing didukung dengan kebijakan publik yang kondusif akan dapat mendukung iklim investasi secara berkelanjutan.

3.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan. Isu-isu strategis dalam pembangunan di daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah dirumuskan terdiri dari 20 isu strategis yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan.

3.2.1 Pengembangan Sistem Transportasi

Pengembangan sistem transportasi merupakan kebutuhan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan jangka panjang daerah. Sebagai salah satu kota megapolitan di dunia, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan transportasi akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu, perlu pengembangan sistem transportasi terpadu untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksesibilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa.

Pengembangan sistem transportasi yang mengutamakan pada sistem angkutan umum massal yang bersinergi dengan angkutan darat, sungai dan udara diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penduduk serta barang dan jasa di DKI Jakarta. Selain itu, pengembangan sistem transportasi di DKI Jakarta harus memperhatikan sistem transportasi wilayah yang lebih luas dan untuk memfasilitasi pergerakan orang dan barang dari dan ke wilayah Bodetabek yang juga semakin meningkat.

3.2.2 Antisipasi Banjir, Rob, dan Genangan

Banjir, rob, dan genangan merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi dan diprioritaskan penanganannya. Bencana tersebut diakibatkan oleh banjir kiriman, hujan lokal, dan kenaikan muka air laut. Penanganannya masing-masing berbeda namun harus menjadi satu kesatuan strategi. Dalam implementasinya, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengefektifkan Masterplan Pengendalian Banjir yang meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, polder, situ dan waduk, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiapsiagaan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

3.2.3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan DKI Jakarta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dimilikinya. Dalam jangka panjang, pembangunan harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), serta perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Perlindungan kawasan lindung dan konservasi dapat terlaksana dengan baik apabila pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW DKI Jakarta 2030 yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.

3.2.4 Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang memberikan dampak pada peningkatan kerentanan wilayah Jakarta yang merupakan kota delta dengan kondisi topografi berupa dataran rendah dan pesisir. Selain itu, perubahan iklim akan meningkatkan potensi dan kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian iklim ekstrim dan bencana hidrometrologis seperti banjir rob. Dampak lain dari perubahan iklim juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan terutama yang tinggal di kawasan pesisir.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam mewujudkan hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi iklim dan rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim.

3.2.5 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengoperasionalkan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan.

Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah dengan komunitas pemerhati penataan ruang serta transparansi informasi terkait penataan ruang.

3.2.6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari konservasi, pembangunan dan revitalisasi. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota harus dilakukan secara sistematis dengan pola tepat dengan menerapkan prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan lingkungan maupun perbaikan kembali. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan

mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management* sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kerangka kerjasama lainnya.

3.2.7 Pengelolaan Kependudukan yang Berkualitas

Pengendalian kependudukan di DKI Jakarta harus dilakukan secara sistematis dengan pola tepat dan memperhatikan aspek struktur, jumlah, kualitas, serta distribusi penduduk. Dinamika kependudukan di DKI Jakarta diakibatkan oleh faktor alami dan mobilitas penduduk terutama dari urbanisasi. Untuk mewujudkan pengendalian kependudukan dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada kerjasama antar daerah dan peningkatan kualitas administrasi kependudukan terutama di tingkat kelurahan.

3.2.8 Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, dan pembiayaan pendidikan yang mencukupi. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Mengingat kemajemukan warga DKI Jakarta terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial kemanusiaan dengan tujuan akhir untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Jakarta.

3.2.9 Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat DKI Jakarta termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Mengingat kemajemukan warga DKI Jakarta terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan memperhatikan aspek sosial kemanusiaan.

3.2.10 Pembangunan Budaya Multikultur

DKI Jakarta yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan pengembangan aspek-aspek positif dan pengelolaan aspek-aspek negatif guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kelembagaan yang mapan, sumber daya yang berkualitas, serta tata laksana yang handal dengan mempertimbangkan harmonisasi keragaman budaya, agama, suku, ras, dan tradisi untuk mewujudkan masyarakat DKI Jakarta yang berakhlak mulia.

3.2.11 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Dalam rangka mendukung kinerja DKI Jakarta diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi Jakarta aman, tentram, tertib dan teratur. Selain itu, diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana termasuk potensi terjadinya kebakaran.

Kondisi yang tentram dan tertib dapat dicapai melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.

3.2.12 Penguatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan dan kesehatan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum.

3.2.13 Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan

Untuk mendukung kinerja DKI Jakarta, diperlukan pembiayaan pembangunan yang signifikan. Walaupun dari tahun ke tahun APBD Provinsi DKI Jakarta cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip *good governance*, akuntabilitas keuangan daerah kondisinya semakin baik sehingga dimungkinkan untuk menggali potensi pembiayaan non-konvensional.

Pembiayaan pembangunan non-konvensional dilakukan melalui peran serta masyarakat dan dunia usaha yang proporsional untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema *Public Private Partnership* (PPP), maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta skema lainnya dengan memprioritaskan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.

3.2.14 Peningkatan Daya Saing Global

Jakarta sebagai kota yang merupakan simpul (*hub*) dalam kegiatan perekonomian regional dan internasional harus memiliki daya saing yang handal. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif dan peningkatan daya tarik kota.

Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga Kota Jakarta dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi yang meliputi *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), AFTA+3 (Jepang, China, Korea Selatan), *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) dan *Asian Pacific Economic Cooperation* (APEC).

3.2.15 Peningkatan Perbaikan Iklim Investasi

Iklim investasi yang kondusif merupakan faktor penting untuk meningkatkan investasi di DKI Jakarta. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam skala nasional, regional, dan global yang meliputi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan prinsip kemitraan.

3.2.16 Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro environment* dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), *Metropolitan Priority Area* (MPA), dan *Millenium Development Goals* (MDGs).

3.2.17 Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Untuk mendukung kinerja kota, diperlukan inovasi dan kreativitas daerah dalam berbagai aspek dan skala. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. Sedangkan skala inovasi dan kreativitas daerah meliputi lokal, nasional, regional, dan global.

Pengembangan inovasi dan kreativitas daerah harus didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana berbasis ilmu pengetahuan dengan mengutamakan penelitian dan teknik rekayasa. Dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis, efektif, efisien dan terpadu.

3.2.18 Reformasi Birokrasi

Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga-lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

3.2.19 Pengembangan Kerjasama Antar Kota dan Kerjasama Internasional

Pada era globalisasi diperlukan kerjasama dan hubungan yang simetris antar kota baik lingkup nasional, regional, dan global dalam berbagai aspek dan skala kepentingan. Untuk mewujudkan hal ini dilakukan melalui berbagai jejaring kerjasama baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pengembangan kerjasama antar kota didukung oleh kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mengedepankan semangat pro aktif dan berwawasan ke depan serta untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3.2.20 Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Berkaitan dengan peran sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/ perwakilan lembaga internasional.

Sebagai daerah otonom, kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Kewenangan khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengendalian penduduk dan permukiman, transportasi, industri dan perdagangan, dan pariwisata. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain. Koordinasi tersebut utamanya yang bersifat administrasi memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.

3.2.21 Pembangunan Telematika Jakarta

Jakarta ke depan dituntut untuk menjadi kota internasional yang kompetitif. Untuk mewujudkan rencana ini diperlukan pembangunan infrastruktur telematika yang maju, modern dan handal. Dalam pembangunan telematika diperlukan prasarana dan sarana, kelembagaan, sumber daya manusia, dan aturan hukum/tata laksana yang memadai.

Ke depan keempat unsur ini harus ditata kembali secara sistematis sehingga akan terwujud sinergi komponen-komponen telematika yang serasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing Kota Jakarta baik di tingkat regional ASEAN maupun tingkat global.

Pembangunan telematika harus dilaksanakan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, efisiensi dan tingkat pemanfaatan yang optimal untuk lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan mendukung kualitas ruang kota.

BAB IV

VISI DAN MISI

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

4.1. Visi

Dengan memperhatikan kondisi objektif, potensi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta serta amanat peraturan dan perundangan dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka rumusan Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 adalah:

"Jakarta: Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global"

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
2. Jakarta yang aman bermakna terciptanya kehidupan yang tertib, tentram, damai dan mampu mengatasi ancaman bencana alam, cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
3. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya ruang kehidupan yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia.
4. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, damai dan memiliki keseimbangan lahir dan batin.
5. Jakarta yang produktif bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan hasil dan manfaat serta nilai tambah yang secara ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing kota.
6. Jakarta yang berkelanjutan bermakna terwujudnya proses pembangunan yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan keutuhan, kelestarian, keasrian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Jakarta yang berdaya saing global bermakna terbangunnya kemampuan dan kapasitas daerah yang mampu bersaing dalam peningkatan standar kehidupan warganya, pengembangan aktivitas ekonomi dan penyediaan pelayanan yang luas dan berkualitas.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta dibutuhkan: i) tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ii) kepemimpinan daerah (*leadership*) yang dapat menjadi panutan, visioner, kreatif dan memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan iii) kerjasama, koordinasi dan kebersamaan diantara pemangku kepentingan.

4.2. Misi

Dalam upaya mendukung perwujudan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut:

Misi Satu : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang maju dan memadai dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing global, memperluas keterhubungan antar wilayah dan mendukung pemenuhan kebutuhan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah difokuskan pada: prasarana dan sarana transportasi, drainase perkotaan, persampahan, pengolahan limbah, sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan, air bersih, perumahan, permukiman, telematika dan sarana sosial dan ekonomi.

Misi Dua : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas adalah mengembangkan, membangun dan memperkuat sektor perekonomian daerah, termasuk sektor keuangan yang handal, maju, dan berdaya saing global dan meningkatkan perbaikan iklim investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada: struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Misi Tiga : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya adalah meningkatkan, membangun dan mengembangkan kemampuan dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur sesuai dengan nilai budaya dan kearifan lokal serta mewujudkan masyarakat Jakarta yang beriman, bertakwa, berkualitas, maju dan sejahtera.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial budaya difokuskan pada: perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan perempuan dan anak, pembangunan manusia berakhlak mulia, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, pengelolaan kependudukan dan harmonisasi budaya multikultur, serta penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Misi Empat : Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah menjamin dan menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlangsungan kehidupan manusia dengan memperhatikan kepentingan kehidupan generasi mendatang.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, pelestarian lingkungan hidup difokuskan pada: pengendalian pemanfaatan penataan ruang yang berkualitas, penyediaan

ruang terbuka hijau, penanganan banjir, kebakaran dan bencana lainnya serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, pengurangan emisi karbon, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pencegahan atas penurunan muka air tanah, pengendalian pencemaran lingkungan air udara dan tanah serta pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Misi Lima : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan adalah membangun, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas aparat dan lembaga pemerintahan Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya melaksanakan misi ini, peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan difokuskan pada: penataan kewenangan, reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan, peningkatan tata laksana dan manajemen pemerintahan, pengelolaan pembiayaan pembangunan, pembinaan dan pengawasan, serta kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional.

Misi Enam : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat DKI Jakarta dalam membangun institusi/tatalaksana dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah sosial, budaya dan ekonomi menjadi lebih tinggi dengan tujuan mendukung kinerja Kota Jakarta.

Dalam upaya melaksanakan pengembangan kemampuan daerah yang visioner dan berkualitas dalam penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada: i) pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat, ii) pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi, iii) penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi, iv) penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif, v) penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi, dan vi) penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

Secara skematis rumusan misi dan fokus prioritas dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Rumusan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Tahun 2005-2025

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pembangunan jangka panjang daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagai pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah ini memberikan arahan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergitas, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan

Untuk memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pada setiap misi beserta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

5.1.1 Misi 1: Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah

Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana kota memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mendukung interaksi antar pusat aktivitas kawasan perkotaan. Selain itu, prasarana dan sarana kota juga memiliki peran penting dalam mendukung daya saing ekonomi global sehingga menjadi salah satu fokus pembangunan yang perlu diprioritaskan.

Sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.
2. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.
3. Terwujudnya peningkatan cakupan penyediaan air bersih yang melayani masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum massal.
5. Terwujudnya peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.
6. Terwujudnya peningkatan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dilengkapi prasarana dan sarana permukiman yang memadai.
7. Tersedianya sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota Jasa.
8. Tersedianya sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektivitas bisnis.
9. Tersedianya prasarana dan sarana telematika yang berkualitas.

Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem tata air dan penanggulangan banjir yang optimal.
Pembangunan sistem tata air dan penanggulangan banjir diarahkan untuk mewujudkan sistem tata air yang terpadu dan memiliki keterhubungan satu sama lain dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya agar dapat mengurangi ancaman banjir dan pengurangan wilayah genangan. Peningkatan sistem tata air terpadu diarahkan pada

keterpaduan pengembangan saluran drainase secara hirarki mulai dari kawasan sampai pada skala kota. Pengelolaan sistem tata air dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan dan melibatkan pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pengelolaan saluran yang berada di lingkungan permukimannya. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sistem tata air kota terus dikembangkan agar terwujud sistem saluran drainase kota yang terpelihara dengan baik. Pengendalian banjir dan genangan di wilayah Jakarta dilakukan dengan mengkombinasikan antara sistem polder dan sistem saluran sesuai dengan karakteristik fisik wilayah. Di samping itu perlindungan ancaman banjir rob yang diakibatkan permukaan air laut yang terjadi di kawasan pantai utara Jakarta perlu ditangani dengan sistem proteksi air laut yang masif dan terstruktur melalui pengembangan tanggul laut di pesisir Teluk Jakarta.

2. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu.
Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah diarahkan pada pembangunan tempat pengolahan sampah yang modern, berteknologi tinggi, dan ramah lingkungan di dalam kota dan peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan tempat pengolahan sampah akhir. Di samping itu, paradigma pengelolaan sampah di masa depan diarahkan pada penerapan pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah yang modern dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dilakukan melalui kemitraan pemerintah dan dunia usaha yang efisien dan bernilai ekonomis. Di samping itu, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur air limbah perkotaan diarahkan pada peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat dengan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan dan peningkatan sambungan air limbah pada kawasan permukiman sehingga terjadi peningkatan cakupan pelayanan. Peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan air limbah domestik yang efisien, efektif dan berkelanjutan. Di samping itu, pengembangan sistem pengolahan limbah setempat/lokal diarahkan pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak dapat dilayani oleh sistem terpusat dengan menekankan pada peran serta pelaku pembangunan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur pengolahan air limbah setempat.
3. Meningkatkan cakupan penyediaan air bersih yang melayani masyarakat.
Pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkualitas diarahkan kepada peningkatan cakupan penyediaan air bersih, peningkatan kapasitas teknologi pengolahan air bersih dan penetapan standar pelayanan air bersih berskala internasional sebagai upaya pengembangan sistem penyediaan air bersih yang mencukupi, memadai dan handal guna menjamin pasokan air bersih untuk kegiatan produktif maupun konsumsi masyarakat dengan kualitas yang lebih baik.
4. Meningkatkan sistem transportasi terpadu berbasis angkutan umum massal.
Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dan dilakukan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal dan transportasi berbasis rel yang berkapasitas dan berkecepatan tinggi untuk melancarkan perpindahan orang dan barang, pengintegrasian antar moda transportasi, pengembangan transportasi regional yang menghubungkan Jakarta dan wilayah sekitarnya, peningkatan prasarana dan jaringan jalan serta pengurangan penggunaan kendaraan pribadi untuk beralih pada penggunaan angkutan umum yang aman dan nyaman. Pengembangan sistem angkutan umum massal dilaksanakan dengan mengembangkan dan memperluas koridor busway yang terjangkau dan melayani seluruh wilayah Kota Jakarta dan wilayah sekitarnya serta meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan, pembangunan *Mass Rapid Transit* koridor Selatan-Utara untuk melayani

pergerakan orang dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kota, revitalisasi jalur transportasi kereta api dalam kota yang melayani pusat-pusat pelayanan kota dan mewujudkan integrasi antar moda transportasi untuk memudahkan perpindahan pergerakan orang dan barang di dalam kota. Untuk mendukung konektivitas dengan wilayah sekitarnya diarahkan pada pengembangan kereta api regional dengan meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah agar tercipta pelayanan angkutan kereta api yang aman, nyaman dan terjangkau semua lapisan masyarakat.

Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lalu lintas dalam kota diarahkan pada peningkatan kapasitas prasarana dan jaringan jalan melalui pembangunan jalan layang tol dan non tol dengan memperhatikan tata guna lahan dan kelestarian lingkungan serta keindahan kota, peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu-lintas dengan peningkatan kesadaran dan penegakan peraturan dengan tegas serta mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dengan menerapkan kawasan pembatasan lalu lintas secara konsisten dan kawasan jalan berbayar dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

5. Meningkatkan ketahanan energi yang ramah lingkungan dan efisien.
Pembangunan prasarana dan sarana energi diarahkan untuk meningkatkan ketahanan energi yang dilakukan melalui: pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang berwawasan lingkungan, pengembangan diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yang baru, menggantikan penggunaan bahan bakar minyak dalam jangka panjang dengan energi terbarukan, peningkatan dan pengembangan sumber energi alternatif terutama bioenergi, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya dengan tetap mempertimbangkan faktor keselamatan, serta peningkatan efisiensi penggunaan energi dan pengembangan sistem distribusi energi secara efisien dan efektif.
6. Meningkatkan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau dilengkapi prasarana dan sarana permukiman yang memadai
Pembangunan dan penyediaan perumahan beserta prasarana dan sarana permukiman diarahkan untuk meningkatkan sistem penyediaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau didukung ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang memadai untuk menjawab kebutuhan warga kota, mengembangkan konsep hunian berimbang untuk memastikan pemerataan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau di dalam kota, pengembangan hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan kota dengan memperhatikan perubahan kondisi sosial-budaya masyarakat yang sudah terbiasa tinggal di hunian horizontal, pengembangan prasarana dan sarana permukiman yang berkelanjutan pada kawasan-kawasan permukiman kumuh agar terwujud kualitas lingkungan permukiman yang sehat dan produktif, dan pengembangan sistem pembiayaan, kelembagaan dan regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang konsisten.
7. Menyediakan sarana dan fasilitas umum yang mendukung Jakarta sebagai Kota Jasa.
Pembangunan dan penyediaan sarana dan fasilitas umum diarahkan untuk mendukung terwujudnya Jakarta sebagai kota jasa (*service city*) dengan standar dan kualitas yang memadai serta memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat dilakukan melalui: penyediaan sarana sosial yang modern, maju dan berkualitas, pembangunan sarana khusus bagi masyarakat usia lanjut, perempuan dan anak, penyandang cacat, serta korban bencana; penataan sarana pemakaman umum, penyediaan gedung dan sarana untuk pelayanan publik dan pemerintahan sesuai kebutuhan; serta peningkatan dan pemeliharaan kualitas gedung dan sarana untuk pelayanan publik dan pemerintahan.

8. Menyediakan sarana perekonomian yang mendukung efisiensi dan efektivitas bisnis.
Pembangunan dan penyediaan sarana perekonomian diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis sehingga meningkatkan daya tarik kota dan mendorong peningkatan iklim investasi yang kondusif dilakukan melalui: pengembangan sarana perekonomian yang mendukung sistem distribusi barang yang efisien dan efektif, handal, maju dan modern dengan memperhatikan hirarki dan skala; pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman bagi masyarakat; dan pengembangan teknologi untuk mendukung kelancaran perdagangan global sebagai upaya mewujudkan sistem penyediaan sarana perdagangan.
9. Menyediakan prasarana dan sarana telematika yang berkualitas.
Pembangunan prasarana dan sarana telematika diarahkan untuk memberikan dukungan kepada seluruh warga Jakarta dalam beraktivitas sosial, ekonomi dan budaya sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing.

5.1.2 Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas

Perekonomian yang kuat dan berkualitas dapat memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti juga memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi harus didukung oleh kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, stabilitas ekonomi juga merupakan pelindung agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, agar terciptanya penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, memerlukan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Beberapa sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing.
2. Terkendalinya stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya.
3. Terwujudnya penguatan struktur perekonomian kota.
4. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas.
5. Terwujudnya peningkatan investasi yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Terwujudnya ketahanan pangan yang mapan.
7. Terwujudnya sistem keuangan daerah yang mapan.

Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing
Pembangunan masyarakat yang produktif bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Jakarta agar mampu berdaya saing global. Peningkatan ini diarahkan melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan potensi dan lingkungan strategis Jakarta dalam wadah kelembagaan ekonomi yang kokoh.
2. Mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok dan komoditas penting lainnya
Pengendalian inflasi bertujuan untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat Jakarta oleh karena itu laju inflasi perlu dikelola secara profesional. Pengendalian ini dilakukan melalui peningkatan pengelolaan distribusi bahan pangan dan barang strategis bagi masyarakat Jakarta, pengembangan sistem perdagangan, pengelolaan penyediaan bahan pangan dan persaingan usaha yang sehat.

3. Mewujudkan penguatan struktur perekonomian kota
 Penguatan struktur perekonomian bertujuan untuk mengelola struktur perekonomian Jakarta agar kokoh dan tangguh dalam menghadapi gejolak perekonomian baik nasional maupun global dengan penekanan pada pengembangan sektor jasa yang potensial. Pengelolaan ini diarahkan melalui perbaikan iklim usaha, sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pengembangan kerjasama dengan wilayah lain, peningkatan akses pasar internasional, pengelolaan konsumsi, pembinaan usaha mikro kecil dan menengah serta pementapan rantai pasokan.

 Pengembangan struktur perekonomian yang kokoh juga dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan citra Jakarta dan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri yang saling mendukung dan menguntungkan masyarakat Jakarta. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah yang semakin kokoh, maju, modern dan berdaya saing. Kesemuanya ini diharapkan dapat didukung secara total oleh sektor Jasa Keuangan yang handal.
4. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi kota yang berkualitas
 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaksudkan untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan pemerataan pendapatan pada seluruh masyarakat Jakarta, pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, dan perluasan lapangan usaha. Peningkatan kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta serta peningkatan hubungan kerjasama antar daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga diarahkan dengan memperhatikan konsumsi yang cerdas dan berkualitas dengan mengedepankan produk-produk dalam negeri, mendorong pertumbuhan investasi yang berkualitas, pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran serta peningkatan ekspor dan pengelolaan impor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi difasilitasi melalui penciptaan iklim inovasi bisnis, pengembangan insentif bagi UMKM inovatif dan pembangunan infrastruktur wilayah secara terintegrasi dan sistematis.
5. Meningkatkan investasi yang berkualitas dan berdaya saing
 Peningkatan investasi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan Jakarta. Peningkatan investasi ini dilakukan melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas dengan tujuan akhir untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan iklim usaha dilakukan melalui peningkatan kualitas prosedur perizinan, sinergitas regulasi, kepastian hukum, kebijakan perekonomian dan ketenagakerjaan yang pro investasi, peningkatan kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur dan pemberian insentif kepada pelaku bisnis. Investasi diutamakan untuk usaha yang ramah lingkungan, tidak bertentangan dengan nilai budaya Jakarta, dan sinergis dengan perekonomian nasional. Untuk itu harus direncanakan secara cermat, komprehensif dan holistik sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
6. Mewujudkan ketahanan pangan yang mapan
 Peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh warga Jakarta dengan memperhatikan stabilitas, akses atau keterjangkauan serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.
7. Mewujudkan fasilitasi sistem keuangan daerah yang mapan
 Pembangunan sistem keuangan daerah yang mapan bertujuan untuk memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah dan mendorong peningkatan efisiensi dan integrasi keuangan daerah dengan keuangan nasional guna mendukung daya saing daerah.

5.1.3 Misi 3 : Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya

Pembangunan ketahanan sosial dan budaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk membangun kualitas hidup masyarakat sebagai modal dasar pencapaian visi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta. Untuk memperkuat daya saing wilayah, diantaranya perlu mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Perkuatan daya saing wilayah mensyaratkan kondisi yang aman, damai dan demokratis dimana masyarakatnya hidup rukun dan harmonis yang didukung oleh pemerataan pembangunan di segala bidang. Di samping itu, jumlah dan persebaran penduduk juga harus dijaga agar terjadi keseimbangan dengan daya dukung lingkungan.

Sasaran pokok dan arah kebijakan dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya budaya kota dengan memperhatikan nilai multikultur.
2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
3. Terwujudnya perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak mulia.
7. Terkelolanya pengendalian dan manajemen kependudukan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjangnya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan budaya kota dengan memperhatikan nilai multikultur.
Pembangunan budaya kota multikultur ditujukan untuk mewujudkan karakter masyarakat dan sistem sosial budaya Kota Jakarta yang tumbuh dan berkembang dari beragam nilai-nilai budaya yang unggul dan unik. Budaya kota multikultur merupakan perpaduan beragam nilai-nilai luhur budaya seperti religius, kebersamaan, persatuan dan nilai modern yang baik. Pengembangan budaya kota multikultur dilakukan melalui revitalisasi, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Betawi dan kebudayaan daerah lainnya, pengembangan budaya kota inovatif, kreatif dan modern berbasis pengetahuan dan teknologi, penguatan elemen budaya dengan meningkatkan pembinaan organisasi budaya masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan budaya untuk mendukung kohesi sosial berbasis integrasi budaya multikultur, pengembangan aktivitas dan event budaya secara terpadu, peningkatan harmonisasi dan integrasi budaya masyarakat sehingga terbentuk identitas budaya masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang lebih kaya dan terbuka.
2. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dititikberatkan pada pembentukan dan pengembangan kemandirian masyarakat serta penguatan lembaga keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan serta penguatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi dan politik. Di samping itu peningkatan peran serta masyarakat diarahkan pada penataan dan fungsi pranata sosial dan kelembagaan masyarakat, pembinaan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial politik untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengelola pembangunan dan potensi konflik sosial yang dapat merusak upaya pemberdayaan masyarakat kota yang berdaya.

3. Mewujudkan perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum.
Peningkatan perilaku masyarakat yang disiplin, taat asas dan hukum ditujukan untuk meningkatkan upaya pembinaan kesadaran hukum dan ketertiban kepada masyarakat serta penguatan penegakan disiplin dan hukum yang berwibawa melalui penataan pranata hukum, penerapan insentif dan disinsentif dalam penegakan hukum, pengembangan keamanan lingkungan yang handal dan penguatan aspek budaya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun karakter budaya masyarakat.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing.
Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar terwujudnya masyarakat yang berhurkat, bermartabat, berakhlak mulia dan sejahtera sehingga mampu bersaing dalam tingkat global. Penyediaan pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta terintegrasinya seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kota di masa depan. Peningkatan pelayanan pendidikan dilakukan melalui pemenuhan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan, pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan yang holistik dan integratif dan penguatan tata kelola pendidikan daerah yang mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jakarta secara adil dan merata melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, peningkatan profesionalisme, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan serta daya saing produk dalam negeri.
6. Mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak mulia.
Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kualitas masyarakat Jakarta yang sejahtera dan berakhlak mulia serta mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan dengan itu pembangunan sumberdaya manusia diarahkan pada pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang berorientasi pada penciptaan insan kreatif dan inovatif, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (harapan hidup, daya beli, tingkat pendidikan), pengembangan insentif dan disinsentif bagi usaha baru masyarakat serta mengembangkan kerjasama dengan swasta dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja.
7. Mengelola pengendalian dan manajemen kependudukan.
Pengendalian dan manajemen kependudukan diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Di samping itu, manajemen kependudukan diarahkan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota serta mendorong terwujudnya hak penduduk dan perlindungan sosial dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pengendalian migrasi penduduk, pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung manajemen kependudukan, pembangunan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar terkait mobilitas dan migrasi penduduk.

5.1.4 Misi 4: Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sangat penting dalam pembangunan wilayah. Sesuai dengan fungsinya tersebut, sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk kegiatan produktif maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup.

Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
2. Terwujudnya peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan kota.
3. Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
5. Terwujudnya integrasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya dalam satu kesatuan ekosistem.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi di atas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas.
Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menghasilkan rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan daerah. Pemanfaatan ruang yang berkualitas ditujukan untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang dan struktur ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, pemanfaatan pola ruang secara terpadu, penyiapan instrumen kebijakan untuk mendorong pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi serta pengembangan sistem konektivitas pusat-pusat aktivitas ekonomi perkotaan secara efisien dan seimbang.
2. Mewujudkan peningkatan pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan kota.
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya dapat menimbulkan berbagai krisis pangan, energi dan lingkungan. Oleh karena itu pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan kota merupakan upaya yang sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi kota tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pengendalian daya dukung dan daya tampung lingkungan kota diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana melalui pengembangan instrumen kebijakan pengendalian pengambilan air tanah di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi percepatan penurunan tanah, pembangunan infrastruktur pengendalian tata air untuk mengatasi banjir dan rob, perluasan ruang terbuka hijau sesuai standar dan peraturan yang berlaku untuk mendukung Provinsi DKI Jakarta sebagai *Green City* dan penguatan regulasi terkait perlindungan kawasan-kawasan resapan air sebagai kawasan lindung untuk menghindari terjadinya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun yang dapat meningkatkan banjir dan *run off*.

3. Mewujudkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jakarta dalam menghadapi bencana. Ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Jakarta antara lain banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Banjir termasuk dalam bencana hidrometeorologis yang menjadi perhatian khusus setiap tahunnya dan menimbulkan kerugian fisik-ekonomis bagi masyarakat Jakarta. Dengan adanya fenomena perubahan iklim ancaman banjir akan terus meningkat setiap tahunnya termasuk banjir rob yang disebabkan kenaikan muka air laut. Pengembangan sistem peringatan dini bencana banjir ditujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi dampak kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana banjir. Peningkatan kesiapsiagaan dilakukan melalui pengembangan sarana, prasarana dan teknologi mitigasi bencana, peningkatan kapasitas dan kelembagaan di masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengembangan sistem peringatan dini bencana. Di samping upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana juga dilakukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan sistem perkotaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
4. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Peningkatan kualitas lingkungan perkotaan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial dan ekonomi. Peningkatan kualitas lingkungan kota dilakukan melalui pengendalian sumber-sumber pencemaran udara, air dan tanah, pembangunan sarana dan prasarana pengendalian tingkat pencemaran udara, air dan tanah, pengembangan instrumen kebijakan penataan kawasan kumuh perkotaan dan lingkungan di bantaran sungai, pengembangan instrumen kebijakan pengurangan emisi sesuai standar lingkungan global dan perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Pembangunan Kota Jakarta dalam jangka panjang harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
5. Mewujudkan integrasi Jakarta dengan wilayah sekitar dalam satu kesatuan ekosistem. Pembangunan Kota Jakarta tidak dapat dipisahkan dari wilayah sekitarnya perlu dilihat dalam satu kesatuan ekosistem. Berbagai kejadian bencana banjir dan pengurangan air tanah yang terjadi di Kota Jakarta banyak dipengaruhi perubahan ekosistem wilayah sekitarnya. Integrasi pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitarnya dalam satu kesatuan ekosistem ditujukan untuk mengendalikan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih terpadu dan berkelanjutan antar generasi dan antar wilayah. Integrasi pembangunan tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi pembangunan sosial, ekonomi, fisik di kawasan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitar, pemanfaatan kesepahaman pembangunan dengan wilayah sekitar, optimalisasi forum-forum kerjasama pembangunan, *sharing* beban dan manfaat multilateral antara Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah sekitar, peningkatan keselarasan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan pengendalian laju kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan.

5.1.5 Misi 5 : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara akan menjadi ciri khas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Adanya cita-cita Provinsi DKI Jakarta menjadi ibukota negara yang berdaya saing global perlu didukung oleh pemerintahan yang baik karena Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan yang dapat memberikan insentif serta menawarkan lingkungan yang menguntungkan bagi investor untuk berinvestasi dan meningkatkan produktivitasnya. Tanpa adanya peraturan dan kebijakan Pemerintah yang kondusif maka akan menciptakan hambatan lebih banyak dan meningkatnya biaya kegiatan ekonomi, mengurangi kemampuan bagi perusahaan untuk bersaing baik di pasar domestik dan

internasional. Oleh karena itu agar supaya tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk mampu membuat kebijakan dan strategi pembangunan secara keseluruhan serta membuat cara-cara inovatif yang mendukung daya saing Provinsi DKI Jakarta untuk sampai pada kelas internasional.

Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif.
2. Tersedianya pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.
3. Tersedianya kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.
4. Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan dalam kerangka *good governance*.
5. Terwujudnya peningkatan kerjasama antar daerah dan antar kota dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Terkelolanya pembiayaan pembangunan yang efisien, efektif dan maju.
7. Terwujudnya penguatan dukungan pendanaan Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara efisien efektif, ekonomis dan produktif.
Pembangunan aparatur pemerintahan daerah dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan Kota Jakarta. Penerapan reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penempatan sumber daya pegawai sesuai kompetensi yang dimilikinya, penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekrutmen), peningkatan koordinasi pengawasan dan pemahaman akuntabilitas aparatur, pengaturan mekanisme, sistem dan prosedur ketatalaksanaan yang tidak berbelit-belit, dan penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas. Di samping itu reformasi birokrasi dilaksanakan secara komprehensif dalam semua aspek pemerintahan termasuk perbaikan bisnis proses pelayanan masyarakat dan penataan tata laksana serta manajemen organisasi.
2. Menyediakan pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.
Peningkatan pelayanan publik yang prima pada hakekatnya merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik prima ditujukan untuk memberikan bentuk layanan yang mampu memberikan kepuasan bagi pelanggannya dengan biaya yang terjangkau serta meningkatkan motivasi pelanggan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan prima. Peningkatan pelayanan publik prima di Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas bentuk pelayanan publik yang dapat dijangkau seluruh masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan perangkat birokrasi, penguasaan aspek teknis secara profesional, kemampuan manajerial dan kepemimpinan, peningkatan keterampilan dalam menghadapi perubahan dalam bisnis pelayanan dan penguasaan teknologi. Untuk itu peningkatan kapasitas sumberdaya manusia merupakan aspek penting dalam peningkatan pelayanan publik prima.
3. Menyediakan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkualitas.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan

secara profesional dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan lembaga. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengembangan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan etos kerja aparat, pengembangan sistem manajemen pengetahuan di lingkungan birokrasi, pembinaan sistem karier yang jelas dan pembentukan nilai kepercayaan (*trust*) aparatur sebagai pelayan politik.

4. Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan dalam kerangka *good governance*.

Peningkatan kapasitas pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berkualitas merupakan prasyarat utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan publik yang berkualitas juga mendorong terwujudnya penyediaan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis pengetahuan didukung data dan informasi yang relevan dan akurat dalam suatu proses pengambilan keputusan yang inklusif. Di samping itu peningkatan kualitas penyusunan kebijakan pembangunan dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan, pengembangan basis data dan informasi pembangunan yang akurat dan mutakhir, pengembangan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan akuntabel, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan yang konsisten.

5. Mewujudkan peningkatan kerjasama antar daerah dan antar kota dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama antar daerah merupakan isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas yurisdiksi wilayah Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan kerjasama antar daerah diarahkan pada penyelesaian masalah pelayanan publik yang memberikan eksternalitas melewati batas wilayah administrasi agar mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kerjasama antar daerah dilakukan melalui fasilitasi kebijakan pemerintah pusat untuk mendorong kerjasama antara daerah, pemberian insentif dan disinsentif untuk daerah yang telah melakukan dan juga daerah yang gagal melakukan kerjasama, membangun kepercayaan dan komunikasi antar daerah serta mekanisme kerjasama yang lebih jelas. Di samping itu kerjasama antar daerah dilakukan tidak saja dalam lingkup nasional, namun juga dalam bentuk kerjasama internasional antar kota dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif setiap daerah.

6. Mewujudkan pengelolaan pembiayaan pembangunan yang efisien, efektif dan maju.

Pembiayaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang semakin meningkat kebutuhannya di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan pembiayaan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif serta menggali sumber-sumber pembiayaan baru non konvensional sehingga dapat membantu peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pengelolaan pembiayaan pembangunan dilakukan melalui pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efisien, pengembangan potensi sumber-sumber pembiayaan non konvensional, peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan kota dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menggali sumber pembiayaan pembangunan non konvensional dibutuhkan penatakelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kredibel.

7. Mewujudkan penguatan dukungan pendanaan Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penguatan dukungan khususnya pendanaan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggarkan dalam APBN. Penguatan pendanaan tersebut dilakukan melalui peningkatan fasilitasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang, penyiapan peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang urusan pemerintahan yang bersifat khusus, pengembangan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Swasta ataupun Lembaga Keuangan Luar Negeri dalam rangka sumber pendanaan alternatif.

5.1.6 Misi 6 : Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah

Inovasi dan kreativitas merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi serta dalam rangka pengembangan daya saing daerah. Inovasi daerah didasari atas terjadinya pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*). Pengembangan inovasi dalam hal ini meliputi cara berpikir strategis dan konsisten dengan kerangka pembangunan jangka panjang. Untuk meningkatkan daya saing daerah, pengembangan inovasi berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah, dan menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional.

Sasaran-sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
2. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan kluster industri unggulan.
3. Terwujudnya dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas daerah.
4. Terwujudnya pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif.
5. Terwujudnya pengembangan daya inovasi dan kreasi masyarakat Jakarta yang berdaya saing global.
6. Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan berdaya saing.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pengembangan jaringan inovasi dan kreativitas merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan sistem inovasi daerah. Pengembangan jaringan tersebut dititikberatkan pada melibatkan semua pemangku kepentingan di daerah meliputi unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka memanfaatkan berbagai produk pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan daerah. Di samping itu pengembangan jaringan inovasi dilakukan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta media komunikasi yang dapat diakses secara reguler oleh semua pemangku kepentingan.

2. Mewujudkan pengembangan daya inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan klaster industri unggulan.
Pengembangan inovasi dan kreativitas usaha mikro-kecil dan klaster industri unggulan diarahkan pada peningkatan kelembagaan usaha kecil yang lebih mandiri, perluasan jaringan pasar dan peningkatan proses produksi usaha kecil. Di samping itu pengembangan inovasi dan kreativitas usaha mikro kecil perlu didukung oleh proses pembelajaran secara menerus untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produksi yang dihasilkan.
3. Mewujudkan dukungan kelembagaan dan regulasi yang mendukung pengembangan inovasi dan kreasi daerah.
Pengembangan kelembagaan dan regulasi ditujukan untuk mendorong terwujudnya pengembangan inovasi dan kreativitas daerah agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kelembagaan dan regulasi diarahkan pada penyusunan peraturan perundangan sebagai landasan hukum bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan berinovasi dan berkreaitivitas, peningkatan peran pemerintah daerah dalam fasilitasi pengembangan inovasi dan kreativitas di berbagai sektor pembangunan, dan peningkatan dukungan pembiayaan dan prasarana dalam menunjang proses inovasi dan kreativitas di daerah.
4. Mewujudkan pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif.
Pengembangan kewirausahaan baru yang inovatif dan kreatif ditujukan untuk mendorong kemandirian masyarakat dan pelaku usaha dalam meningkatkan derajat kehidupannya agar terwujud masyarakat Jakarta yang produktif dan sejahtera. Pengembangan kewirausahaan baru tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen usaha, perluasan pasar dan transfer teknologi, penyediaan pelayanan usaha untuk mempermudah transfer informasi dan pengetahuan, pengembangan *event* dan forum kewirausahaan inovatif dan kreatif sebagai *learning by-doing center* bagi para pelaku usaha dan peningkatan akses pada sistem pembiayaan yang memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan.
5. Mewujudkan pengembangan daya inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta yang berdaya saing global.
Pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta diarahkan pada peningkatan kelembagaan, jaringan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Di samping itu pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat Jakarta diarahkan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya agar terwujudnya Kota Jakarta yang berdaya saing global.
6. Mewujudkan pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat dan berdaya saing.
Pengembangan kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi bertujuan untuk memberikan wahana kepada masyarakat yang seluas-luasnya agar mampu memperoleh hasil yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu hasil penelitian, penciptaan dan inovasi diarahkan untuk dapat memberikan manfaat ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.2 Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta 2005-2025, serta mencapai sasaran-sasaran pokok sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Penyusunan tahapan pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 merupakan suatu upaya sistematis dalam mewujudkan wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang berdaya saing global. Untuk itu, maka prioritas dan tema pembangunan untuk tiap tahapan pembangunan sejalan dengan upaya menciptakan kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai visi tersebut. Berdasarkan tahapan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan Provinsi DKI Jakarta yang berdaya saing global, maka secara garis besar, pentahapan pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tahap Ke-1 (Periode 2005-2007), adalah periode untuk mengembangkan landasan pembangunan kota Jakarta sebagai ibukota negara yang aman, nyaman dan berkelanjutan dengan menekankan pada pengembangan sarana dan prasarana kota yang efisien dan efektif, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan kota dan mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tahap Ke 2 (Periode 2007-2012), adalah periode untuk menata kembali pembangunan kota Jakarta sebagai ibukota negara yang aman, nyaman dan berkelanjutan dengan fokus utama pada memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan pelayanan prima, memantapkan sarana dan prasarana kota, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.

Tahap Ke-3 (Periode 2013-2017), adalah periode untuk meningkatkan pembangunan Kota Jakarta yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, dan ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam.

Tahap Ke-4 (Periode 2018-2022), adalah periode untuk memantapkan pembangunan kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA.

Tahap Ke-5 (Periode 2023-2025), adalah periode untuk mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global dengan fokus utama mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 5.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

JAKARTA: IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG AMAN, NYAMAN, SEJAHTERA, PRODUKTIF, BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING GLOBAL				
Periode 2005-2007	Periode 2007-2012	Periode 2013-2017	Periode 2018-2022	Periode 2023-2025
Mengembangkan landasan pembangunan Kota Jakarta sebagai ibukota negara yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Menata kembali pembangunan Kota Jakarta sebagai ibukota negara yang aman, nyaman dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan Kota Jakarta yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global	Memantapkan pembangunan Kota Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global	Mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing Global
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sarana dan prasarana kota yang efisien dan efektif • Memperhatikan keberlanjutan lingkungan • Meningkatkan kualitas kehidupan kota • Mendorong penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik • Meningkatkan pelayanan prima • Memantapkan sarana dan prasarana kota • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat • Meningkatkan kualitas lingkungan kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, dan ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pembangunan kota dengan menekankan pada peningkatan daya saing global, kapasitas inovasi dan kreasi daerah dan memantapkan kapasitas sarana dan prasarana kota, tata kelola pemerintahan yang baik, dan perekonomian yang kuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta efisiensi pemanfaatan SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencapai Kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5.2.1 RPJMD ke-1 (2005 - 2007)

Periode 2005-2007 adalah periode awal dimana tema utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada periode ini adalah pemantapan landasan pembangunan Kota Jakarta sebagai ibukota negara yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Pokok-pokok kebijakan pada periode ini meliputi: penegakan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan, aset dan usaha daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah, percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, penguatan basis ekonomi kota, peningkatan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pengendalian penduduk dan sumberdaya tenaga kerja, perluasan jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan,

peningkatan infrastruktur sosial, peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kota dalam rangka peningkatan dan daya dukung kota. Pada tahap ini pembangunan diarahkan pada :

1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah merupakan salah satu fokus prioritas pertama dari misi meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah. Guna mendukung serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dilakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas penerangan jalan dan tempat umum, serta jaringan utilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam hal pengembangan transportasi dan pengurangan kemacetan diupayakan dengan meningkatkan kinerja sistem transportasi, pos dan telekomunikasi melalui pemanfaatan secara optimal jaringan transportasi, pos dan telekomunikasi serta perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan, dengan prioritas mengoptimalkan ruas jalan dan jembatan yang ada termasuk fasilitas pejalan kaki (pedestrian, halte, zebra cross, jembatan penyeberangan orang); memperbaiki kualitas pelayanan dan pengembangan angkutan umum massal, koordinasi dengan daerah-daerah berbatasan; serta meningkatkan pelayanan angkutan dari dan ke Kepulauan Seribu.

Terkait dengan penganggulangan banjir dan genangan diprioritaskan dengan melanjutkan pembangunan sarana pengendali banjir dan drainase kota sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya, melalui optimalisasi saluran drainase yang ada serta memperbanyak situ atau waduk untuk menampung air hujan atau air kiriman dari daerah lain; dan meningkatkan pengawasan serta ketertiban di bantaran kali, pelebaran sungai dan pengerukan kali serta meneruskan pembangunan Banjir Kanal Timur dengan pendekatan pada Pemerintah Pusat.

Dalam menciptakan kota yang bersih, bebas dari polusi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, dengan prioritas meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam penanganan masalah sampah, pelayanan dan fasilitas kebersihan, serta menyediakan lokasi TPA baru. Selain itu juga meningkatkan kemampuan penanganan limbah B3, serta mengupayakan teknologi hemat lahan dalam pengelolaan sampah.

Pengembangan fasilitas perumahan dan permukiman dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau, diupayakan dengan prioritas mengoptimalkan pembangunan rumah susun sederhana, menata permukiman padat di Kepulauan Seribu, mengantisipasi pertumbuhan fisik lingkungan kumuh dan permukiman di bantaran sungai.

2. Pengembangan dan pengendalian stabilitas ekonomi wilayah merupakan salah satu fokus prioritas dari misi meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya dilakukan dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber potensial dalam penciptaan pendapatan masyarakat, penyerapan lapangan kerja dan penerimaan daerah serta wahana pelestarian sumber daya pariwisata potensial yang menjadi andalan perekonomian Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pengembangan sektor industri dilakukan dengan menjadikan usaha industri yang sehat, berteknologi tepat guna, mandiri dan tahan terhadap globalisasi, ramah lingkungan dalam suatu kawasan industri yang mampu memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas sumber daya termasuk investasi serta meningkatkan ekspor. Sedangkan untuk perdagangan, menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan efisien, adil dan dinamis bagi semua skala usaha, serta mengembangkan jaringan distribusi produk industri dan perdagangan.

Pengembangan investasi dilakukan juga dengan meningkatkan profesionalisme dan kinerja pengelolaan usaha daerah sehingga mampu tumbuh, berkembang dan bersaing secara

sehat di era globalisasi serta menjadi sumber penerimaan daerah. Di samping itu perlu meningkatkan iklim kondusif bagi berkembangnya investasi dan usaha-usaha swasta secara lebih efektif, efisien dan produktif. Sedangkan untuk koperasi, dengan mendorong tumbuhnya koperasi serba usaha yang secara nyata dibutuhkan masyarakat, dan memperluas jaringan sehingga mampu mengisi mata rantai kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat, serta menjadikan koperasi sebagai gerakan masyarakat.

3. Pembangunan ketahanan sosial dan budaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan DKI Jakarta yang berdaya saing global. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga Provinsi DKI Jakarta menuju terciptanya manusia yang berkualitas tinggi, serta dapat meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sektor kesehatan dikembangkan dengan meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga paramedis dan tenaga medis, sehingga dapat saling mendukung dalam memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi masyarakat, serta dapat memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana dalam bidang medis dan tersedianya obat yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Kesejahteraan dan keadilan sosial juga dikembangkan dengan menciptakan iklim kehidupan yang layak berdasarkan atas asas kemanusiaan yang adil, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan anak terlantar, memantapkan penanganan PMKS, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial, serta memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat dalam permasalahan pemukiman.

Dan dalam pengembangan budaya, beberapa prioritas dilakukan dengan mengembangkan kebebasan berkebudayaan dalam berkesenian dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama, serta tetap melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan Betawi serta kebudayaan daerah lainnya. Serta melakukan pembinaan dan pengembangan museum serta peninggalan sejarah dan cagar budaya yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata daerah.

4. Pembangunan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam di wilayah Provinsi DKI Jakarta juga merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan DKI Jakarta yang berdaya saing global. Dalam optimalisasi daya dukung dan daya tampung, hal awal yang perlu dilakukan adalah mengelola sumber daya alam (SDA) dan memelihara daya dukung serta upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam yang menerapkan teknologi ramah lingkungan, dengan prioritas mengoptimalkan upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan sumber daya pertambangan, energi dan air melalui sosialisasi penghematan, kepedulian dan kesadaran masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antar unit atau instansi terkait dalam pengelolaan dan penegakan hukum.

Penyeimbangan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan diupayakan dengan prioritas meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, menyediakan RTH di permukiman padat dan kumuh sebagai ruang interaktif, mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan taman, serta penegakan hukum yang tegas dalam penanganan sumber pencemaran lingkungan.

Selanjutnya penataan ruang dikembangkan menjadi berkualitas dan partisipatif berdasarkan prinsip adil, efisien dan berkelanjutan, dengan prioritas meningkatkan dan melengkapi instrumen penataan ruang, meningkatkan kerjasama penataan ruang antar

daerah dengan kabupaten dan kota se-Bodetabek, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan berkelanjutan.

5. Peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang handal juga merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan DKI Jakarta yang berdaya saing global. Pengembangan kapasitas dan kualitas pemerintahan tersebut diupayakan dengan menciptakan sistem dan fungsi pemerintahan untuk setiap wilayah yang efektif dan efisien terutama dalam rangka pengembangan otonomi daerah dengan merumuskan kebijakan dan kewenangan wilayah administrasi kota/kabupaten yang bermanfaat dalam mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan pemerintahan wilayah serta menata kembali peraturan dan administrasi pertanahan sehingga tidak terjadi adanya duplikasi sertifikasi dan pertentangan kepentingan.

Selain itu, dilakukan pengembangan profesionalisme pegawai yang bebas KKN, proaktif, serta mampu mengelola kekayaan daerah secara transparan dalam lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat sehingga fungsi kontrol dan proses pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan yang dilakukan masyarakat akan lebih mudah dan efektif.

Penerimaan daerah ditingkatkan dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif dengan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik.

Pada akhirnya penciptaan sistem teknologi informasi dan statistik sehingga dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai basis pembangunan daerah, serta meningkatkan profesionalisme dalam statistik dan teknologi informasi.

6. Peningkatan kapasitas dan kualitas inovasi dan kreativitas daerah Provinsi DKI Jakarta juga dikembangkan. Pembangunan kapasitas dan kualitas inovasi merupakan salah satu upaya khusus yang dikembangkan Provinsi DKI Jakarta guna mendukung perwujudan visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta sebagai wilayah yang berdaya saing global. Selain itu, dilakukan juga dengan mendorong berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sehat, dinamis serta mengurangi hambatan usaha sehingga UKM dapat menjadi pilar perekonomian Jakarta dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan ekspor.

5.2.2 RPJMD ke-2 (2007 - 2012)

Periode 2007-2012 adalah periode kedua dimana tema utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada periode ini adalah pemantapan pembangunan Kota Jakarta yang aman, nyaman dan berkelanjutan. Fokus pembangunan pada tahap ini adalah membangun tata pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah *Good Governance*, meningkatkan pelayanan masyarakat melalui prinsip pelayanan prima, memberdayakan masyarakat melalui pelibatan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada periode ini pembangunan diarahkan pada :

1. Penataan prasarana dan sarana wilayah, beberapa prioritas pembangunan meliputi pengembangan jalan dan jembatan di sentra primer timur dan sentra primer barat, pembangunan simpang tidak sebidang khususnya pada persimpangan jalan dengan kereta

api lingkaran Jakarta, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan jalan, meningkatkan kapasitas ruas dan simpang jalan; dan membangun ruas jalan layang, meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima dan berstandar internasional, menerapkan kebijakan perhubungan yang menyeluruh dan terpadu, meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan angkutan umum dan mengintegrasikan antar moda angkutan umum, dan melakukan pemberdayaan masyarakat dan komunitas profesional perhubungan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan.

Perhatian khusus juga dilakukan terhadap pengendalian banjir di Provinsi DKI Jakarta dengan membangun sistem polder, memperbaiki dan membangun tanggul untuk mengantisipasi kenaikan pasang laut, melakukan *review* masterplan pengendalian banjir, menertibkan dan menata sempadan sungai, situ, sahiran dan waduk. Upaya lainnya adalah menyelesaikan Banjir Kanal Timur dan menata bantaran Banjir Kanal Barat, melakukan pengerukan muara, badan sungai, dan saluran yang menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta, membangun dan memelihara sarana prasarana drainase. Kerjasama pengendalian banjir dengan Pemerintah Pusat serta Pemda Bodetabekjur juga dikembangkan.

Dalam hubungan dengan regulasi dan pengelolaan air limbah dilakukan dengan meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan; dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (*dunia usaha*) dalam penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dalam kaitan dengan penciptaan Kota Jakarta yang beremisi rendah, distribusi pelayanan BBG di Jakarta juga ditingkatkan dalam rangka konversi penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.

Penataan perumahan permukiman dilakukan dengan menyusun kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan; meningkatkan ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah; mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat; dan memindahkan penghuni bantaran kali/situ/danau dan pemukiman ilegal ke rumah susun.

2. Penguatan stabilitas ekonomi makro wilayah merupakan langkah selanjutnya dari upaya membangun stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Provinsi DKI Jakarta. Pengembangan perekonomian melalui pengembangan industri pariwisata dilakukan dengan melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan; mengembangkan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik; mewujudkan citra Jakarta sebagai destinasi wisata dan salah satu destinasi utama wisata *Meeting, Incentives, Convention, Exhibition (MICE)*; serta meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara udara, dan keamanan sehingga Jakarta mampu memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan.

Sedangkan dalam pengembangan perdagangan dan industri sebagai sektor pengembang ekonomi kota, diupayakan dengan meningkatkan regulasi perdagangan produk tidak hanya hasil industri, tapi juga hasil perikanan, peternakan; membangun iklim yang kondusif dan memfasilitasi diversifikasi pasar ekspor produk yang memenuhi syarat dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan promosi; serta memfasilitasi pembangunan diklat peningkatan kualitas dan kuantitas produk ekspor.

Penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota diantaranya dengan memfasilitasi penyediaan diklat khusus sektor jasa tersier yang lulusannya bersertifikat kompetensi dan memberi insentif bagi usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja spesifik tersebut.

3. Penguatan ketahanan sosial dan budaya di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan langkah selanjutnya dari upaya membangun landasan dasar ketahanan sosial dan budaya di Provinsi DKI Jakarta. Penguatan ketahanan sosial budaya ditekankan pada upaya memperkuat kinerja prasarana sarana, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Peningkatan potensi budaya dilakukan dengan mengembangkan budaya Betawi sebagai bagian dari budaya Jakarta Ibukota Negara yang heterogen, multi etnis dan multikultur; memfasilitasi temu budaya (akulturasi) lokal dengan budaya asing dan mengembangkan pusat belajar bahasa Indonesia bagi warga asing di Jakarta;

Sektor pendidikan dilakukan dengan menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota sedangkan sektor kesehatan melalui penerapan kebijakan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu penyusunan regulasi dan fasilitasi untuk pembinaan kelompok masyarakat dilakukan dalam upaya mencegah timbulnya konflik antar anggota masyarakat.

Pendidikan dan kesehatan juga mendapat perhatian tersendiri dengan mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antara Provinsi DKI Jakarta dengan daerah Bodetabekjur, memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing kota, dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pendidikan.

Kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier juga ditingkatkan dengan didukung dengan memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (*safety*) pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat.

4. Penguatan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam di wilayah Provinsi DKI Jakarta juga merupakan upaya menindaklanjuti prasyarat untuk mewujudkan DKI Jakarta yang berdaya saing global. Pada periode ini prioritas pembangunan meliputi meningkatkan penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia, untukantisipasi masalah kebencanaan dan lingkungan;

Dalam kaitan dengan kebencanaan, regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, *rescue* dan pengelolaan bencana.

Sedangkan dalam penataan lingkungan hidup dilakukan dengan menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota; meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan; meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna); dan meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional; mewujudkan regulasi penataan ruang yang berkualitas dan berbasis pada prinsip berkelanjutan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum;

Selanjutnya penataan ruang juga perlu diintegrasikan dalam optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota dengan mengintegrasikan regulasi tentang pemetaan, pertanahan dan penataan ruang; dan meningkatkan keterlibatan komunitas profesional secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke masa depan; serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH kota; melindungi peruntukan RTH secara konsisten.

5. Penguatan kapasitas dan kualitas pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang handal merupakan prasyarat untuk mewujudkan DKI Jakarta yang berdaya saing global. Beberapa prioritas pembangunan diupayakan dengan menerapkan kaidah *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan; reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi

perangkat daerah untuk lebih berorientasi kepada masyarakat/lapangan; meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum; mengintegrasikan regulasi dan kebijakan perangkat daerah, kepegawaian serta fungsi diklat; regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat lembaga kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat; menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik; menerapkan teknologi informasi pada semua tingkat pemerintahan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan; dan menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (egovernment) yang dimulai dengan proses perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*) dan proses pengadaan barang (*e-procurement*) serta pengawasan.

6. Penguatan kapasitas dan kualitas inovasi dan kreativitas Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya lanjutan dari periode sebelumnya dengan meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM, meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM, dan memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas penyelenggara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyeluruh dan terpadu; sekaligus juga mempermudah proses untuk memulai usaha, kerjasama investasi, promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata.

5.2.3 RPJMD ke-3 (2013-2017)

Pada periode tahun 2013-2017, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 9,6 – 10,5 juta dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 – 7,8 persen dan PDRB per kapita Rp. 121 juta – Rp. 177 juta per tahun. Pada periode ini tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 3,2-3,5 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan (IPM) mencapai 79,9 – 82,1.

RPJMD periode 2013-2017 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan Kota Jakarta melalui peningkatan produktivitas masyarakat sehingga masyarakat lebih sejahtera, aman dan nyaman serta berkelanjutan guna peningkatan daya saing global. Pembangunan pada periode ini diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta pada periode 2013-2017 semakin meningkat. Salah satunya ditandai dengan beroperasinya sistem transportasi untuk mengurangi kemacetan dan efisiensi lalu lintas melalui pengembangan sistem jaringan transportasi berupa pembangunan 3 koridor *Bus Rapid Transit (BRT)*, pembangunan *Light Rapid Transit (LRT)*, beroperasinya *Mass Rapid Transit (MRT) North-South Line* koridor Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia bersamaan dengan dibangunnya koridor lanjutan Bundaran Hotel Indonesia - Ancol, serta persiapan pembangunan *MRT East-West Line* yang saling terintegrasi satu sama lain. Selain itu, ditandai dengan meningkatnya dukungan pengembangan Kereta Lingkar Jakarta melalui peningkatan pembangunan *flyover* dan *underpass*, meningkatnya transportasi pelabuhan, serta dibangunnya jaringan jalan melalui pembangunan jalan tol serta direalisasikannya kerjasama dengan daerah lain dalam pengembangan jaringan jalan di wilayah Jabodetabek. Pada periode ini, ditandai dengan persiapan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* modern, yaitu bertemunya moda transportasi umum.

Dalam mengatasi banjir dan genangan, sistem tata air dan drainase juga ditingkatkan melalui efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur sistem tata air dan drainase melalui pengembangan stasiun pompa dan polder. Selain itu, dilaksanakan pembangunan dan peningkatan daya tampung badan air permukaan (sungai, kanal, waduk, situ, dan saluran) melalui pengembangan revitalisasi sungai, pelaksanaan pengerukan sungai dan saluran.

Kapasitas sistem pengolahan sampah dan limbah ditingkatkan dengan pembangunan sistem pengolahan sampah dan limbah terpadu serta mendorong kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan pemerintah daerah sekitar diantaranya melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah dalam kota atau *Intermediate Treatment Facility (ITF)* dan pengembangan *solid waster treatment and final disposal*. Peningkatan pengolahan sampah berbasis masyarakat juga semakin ditingkatkan dalam mengurangi volume sampah komunal.

Peningkatan penyediaan air bersih melalui perencanaan dan pembangunan sistem jaringan air bersih yang diarahkan untuk menjangkau seluruh kota dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih. Ketersediaan energi juga perlu ditingkatkan melalui efisiensi energi dan pengembangan prasarana dan sarana sumber energi baru dan terbarukan. Dukungan juga dilakukan bagi pengembangan pembangkit listrik di sekitar Jakarta. Selanjutnya kebijakan pembangunan dan pengendalian hunian vertikal, perbaikan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam rangka mengurangi hunian kumuh merupakan prioritas dalam penyediaan hunian layak bagi seluruh warga Jakarta. Dan dalam rangka meningkatkan perekonomian kota, dilakukan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana perdagangan diantaranya pengembangan terminal argo untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang berkualitas, dan pengembangan pelabuhan.

2. Perekonomian Jakarta ditandai dengan pertumbuhan yang semakin meningkat, dan merata serta berkeadilan. Struktur ekonomi lebih kokoh yang ditandai meningkatnya peranan sektor jasa dan dengan dukungan produktivitas masyarakat yang lebih berkualitas dalam artian penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan lebih meningkat sehingga mampu menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Selain itu, ditandai dengan konsumsi masyarakat yang semakin cerdas.

Laju inflasi terkendali pada batas-batas toleransi untuk mendukung perekonomian Jakarta, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Hal ini ditandai dengan arus distribusi bahan pangan dan barang strategis Jakarta yang efisien dan efektif, serta meningkatnya ketahanan pangan dalam arti stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas dan keamanan pangan terkelola dengan baik. Bersamaan dengan ini juga dibangun dan dioperasikannya terminal agro.

Selain itu, ditandai juga dengan pematapan persiapan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan terbentuknya lembaga-lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi masyarakat. Dalam hal ini juga tingkat pengangguran terkelola dengan baik sehingga mampu mendukung perekonomian yang sehat.

Investasi semakin meningkat dan selektif serta lebih mengedepankan aspek keseimbangan lingkungan. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya kualitas SDM perijinan dan membaiknya iklim usaha serta regulasi perekonomian yang mendukung investasi. Bersamaan hal tersebut ditandai dengan bertambahnya wirausaha baru, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan kelompok profesional.

Sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan ditandai dengan meningkatnya dukungan fasilitas terhadap aktivitas perekonomian daerah sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan efisiensi sektor keuangan dan mendorong integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian nasional. Pada akhirnya diharapkan hal ini mampu mendukung daya saing daerah.

Peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan daya saing sumber daya manusia bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu dilakukan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah diarahkan untuk dapat menjadi wadah kepentingan masyarakat yang ditandai dengan terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang maju dan modern, mempunyai akses permodalan yang mandiri serta penataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan detail tata ruang kota yang nyaman dan ramah lingkungan. Selain itu dilakukan usaha penguatan perlindungan konsumen sebagai prasyarat mutlak dalam mewujudkan perekonomian yang sehat melalui keseimbangan antara perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

3. Peningkatan dan pengembangan ketahanan sosial dan budaya, dilakukan peningkatan akses pendidikan bagi warga Jakarta yang berkualitas, terjangkau dan relevan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter warga Jakarta yang berahlak mulia. Bersamaan dengan hal tersebut dilakukan melalui perumusan kebijakan pengarusutamaan gender dan anak, pengurangan kemiskinan, dan meningkatnya kinerja program keluarga berencana. Kondisi ini ditandai juga dengan peningkatan pembangunan bidang kesehatan melalui kegiatan preventif serta peningkatan kesehatan masyarakat serta kesehatan lingkungan sehingga pembangunan manusia Jakarta terus meningkat. Pengembangan harmonisasi budaya masyarakat dengan memperhatikan budaya multikultur sehingga tidak terjadi konflik horizontal.
4. Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam pada periode 2013-2017 diupayakan semakin meningkat. Penciptaan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat dan berkualitas dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana pengendalian pencemaran udara, air dan tanah. Peningkatan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai kesepakatan internasional juga dilakukan diantaranya melalui peningkatan penerapan kebijakan *green building* dan strategi pengembangan area pesisir Jakarta melalui persiapan pengembangan *Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS)* untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut.

Pada periode ini, daya dukung lingkungan dan daya tampung kota dioptimalisasikan melalui regulasi efisiensi pemanfaatan sumber daya seperti energi dan air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya kebijakan efisiensi energi dan pengendalian pengambilan air tanah dan mulai dikonversi melalui penggunaan air olahan ataupun sistem tadah hujan (*rain water harvesting*). Dalam rangka menuju kota yang berketahanan energi, penyusunan dan pelaksanaan regulasi terkait efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan ditingkatkan. Selain itu, pembinaan kepada masyarakat terkait penghematan energi dan air tanah juga ditingkatkan. Pengelolaan energi kota juga mencapai pada tingkat efisiensi yang cukup tinggi melalui kebijakan penggunaan energi terbarukan pada sarana transportasi umum dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada seluruh gedung-gedung.

Pelestarian lingkungan alam yang merupakan elemen penting dalam daya dukung kota seperti perlindungan kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan air juga ditingkatkan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem kota untuk mengurangi risiko degradasi lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitas air sungai dengan mengurangi sampah dan limbah yang dibuang ke sungai. Upaya mitigasi bencana juga ditingkatkan dengan peningkatan *response time* dan manajemen pasca bencana baik rehabilitasi sosial maupun lingkungan fisik.

5. Peningkatan kualitas organisasi pemerintah dalam melayani masyarakat dilakukan dengan pemberian kewenangan dan penyusunan ketatalaksanaan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Hal ini didukung oleh struktur birokrasi dan aparatur yang berkualitas. Bersamaan dengan hal tersebut dilakukan peningkatan sinergitas antar lembaga termasuk BUMD dan swasta secara sistematis dan holistik sehingga mampu mengurangi kolusi, korupsi dan nepotisme, mengurangi ekonomi biaya tinggi dan konflik kepentingan.

6. Peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara luas dan menyeluruh dengan memanfaatkan jaringan regional dan global sehingga dapat meningkatkan manfaat ekonomi dan mampu mensejahterakan masyarakat.

Peningkatan kapasitas daerah untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. Bersama dengan hal ini diusahakan untuk selalu meningkatkan keunggulan komparatif Jakarta menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan dengan penerapan teknologi serta melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk pemuda. Demikian juga, peningkatan apresiasi terhadap hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta.

5.2.4 RPJMD ke-4 (2018 - 2022)

Pada periode tahun 2018-2022, proyeksi jumlah penduduk mencapai 10,6 - 11 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6 - 8,2 persen dan PDRB per kapita Rp.195 juta - Rp.280 juta per tahun. Kondisi ini diproyeksikan mampu mengendalikan tingkat kemiskinan sebesar 2,7-3,1 persen. Selain itu, pada periode ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan mencapai 82,5 - 84,1.

Tujuan RPJMD periode 2018-2022 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013- 2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global. Pembangunan periode ini diarahkan pada :

1. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi berfungsi dengan baik dalam meminimalkan kemacetan dan efisiensi mobilitas kota melalui peningkatan sistem jaringan transportasi terpadu berupa berfungsinya 15 koridor *Bus Rapid Transit (BRT)* dan *Light Rapid Transit (LRT)* secara mantap, efektif dan efisien, berfungsinya *Mass Rapid Transit (MRT) North-South Line* koridor Lebak Bulus - Ancol secara optimal, dibangunnya *MRT East-West Line* koridor Kembangan - Ujung Menteng, yang kesemuanya terintegrasi juga dengan Kereta Lingkar Jakarta dan sistem transportasi pelabuhan. Peningkatan dan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* modern sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat secara efektif dan efisien. Sedangkakan untuk menghindari banjir dan mengurangi/mengendalikan genangan dilakukan dengan cara pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal dari sampah dan limbah, serta menjaga luasan badan air permukaan waduk dan situ.

Dalam pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah, dilakukan pengembangan *Intermediate Treatment Facility (ITF)* dengan teknologi yang lebih modern dan pemantapan sistem pengolahan sampah dan limbah terpadu berupa *solid waste treatment and final disposal* serta pengembangan sistem sanitasi (*sewerage system*) kota dengan area cakupan seluruh kota. Penguatan kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan pemerintah daerah sekitar juga dilakukan dalam menciptakan sistem pengolahan sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.

Pada periode ini, seluruh warga Jakarta diharapkan dapat menikmati air bersih melalui pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota. Ketersediaan energi juga perlu ditingkatkan melalui penguatan kebijakan efisiensi energi serta prasarana dan sarana sumber energi baru dan terbarukan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energi kota.

Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, dilakukan pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota serta penciptaan lingkungan kota yang

bebas kumuh merupakan prioritas dalam pembangunan permukiman di Jakarta. Dan dalam rangka meningkatkan perdagangan, dilakukan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana perdagangan diantaranya pemantapan pengembangan pelabuhan dan berfungsinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara efektif dan efisien yang mampu meningkatkan pengembangan ekonomi.

2. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas. Struktur ekonomi semakin terdiversifikasi sehingga menjadi semakin kokoh dan mantap. Produk masyarakat semakin berkualitas karena semakin berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksinya. Selain itu dalam melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat semakin mampu dalam menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif.

Daya beli masyarakat terkelola dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena terkendalinya laju inflasi ekonomi Jakarta sebagai akibat dari sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat Jakarta yang semakin mantap. Ketahanan pangan semakin mantap yang ditandai dengan berfungsinya lembaga ketahanan pangan secara profesional sehingga dapat meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas dan keamanan pangan. Selain itu, ditandai dengan berfungsi secara mantap kawasan ekonomi.

Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi masyarakat. Tingkat pengangguran pada tingkat yang masih dalam batas tertentu sehingga masih mampu mendukung kegiatan produksi sehingga perekonomian tetap sehat dan mantap. Investasi semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya sehingga perekonomian terus tumbuh berkelanjutan. Bersamaan dengan hal ini, ditandai dengan wirausaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta kelompok kelas profesional semakin mantap dan berkualitas.

3. Pemantapan ketahanan sosial budaya yang ditandai dengan pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta untuk pendidikan yang kualitas dan mampu bersaing. Selain itu kualitas pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut warga Jakarta diarahkan untuk menjadi warga yang lebih berbudaya dan dalam lingkungan multikultur termasuk kelompok pemuda melalui revitalisasi kelembagaan pemuda. Pemantapan pengarusutamaan gender dan anak melalui kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran dengan mengedepankan proses partisipatif. Derajat kesehatan warga Jakarta semakin mantap ditandai dengan prasarana dan sarana yang mencukupi dan memadai serta kebijakan kesehatan yang komprehensif. Harmonisasi hubungan masyarakat dalam budaya multikultur semakin mantap.

4. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam diupayakan semakin diperkuat menuju lingkungan kota yang berkelanjutan. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan menjadikan lingkungan perkotaan menjadi lebih bersih, sehat dan berkualitas. Bersamaan dengan itu, berbagai kebijakan dan rencana aksi diterapkan dalam memperkuat antisipasi perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembangunan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) terus dilaksanakan dan dikembangkan.

Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah diperkuat dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya melalui penguatan kebijakan efisiensi energi dan pengurangan

pemanfaatan air tanah menjadi pemanfaatan air olahan (*recycle*) dan air hujan melalui sistem tadah hujan (*rain water harvesting*).

Dalam rangka menuju kota yang berketahanan energi, pengelolaan efisiensi energi juga menjadi lebih mantap dan efisien melalui penggunaan energi terbarukan pada sebagian besar sarana transportasi umum dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada sebagian besar gedung-gedung bertingkat.

Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung terus dilalukan melalui penguatan kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan air yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota dan mengurangi risiko degradasi lingkungan. Kualitas lingkungan juga meningkat dengan semakin luasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menciptakan badan air permukaan (sungai, kanal, waduk, situ, dan saluran) yang bebas sampah sehingga kualitas air sungai semakin membaik di atas baku mutu lingkungan. Disamping itu juga merupakan upaya mitigasi bencana dan manajemen pengelolaan bencana (*disaster management*) kota.

5. Pematapan kualitas organisasi pemerintah diarahkan mampu melayani masyarakat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, selain itu pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan didukung oleh ketatalaksanaan yang tangguh. Bersamaan dengan ini diikuti dengan semakin mantapnya akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat. Kondisi ini ditandai juga dengan struktur birokrasi dan aparatur yang semakin mantap, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta semakin kokoh sehingga menghilangkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mengurangi ekonomi biaya tinggi dan konflik kepentingan.
6. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara berkelanjutan dengan memanfaatkan jaringan regional dan global sehingga hasilnya lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pematapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta sehingga hasil lebih berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian akan mendorong kemampuan dan keunggulan kompetitif untuk bersaing secara global sehingga meningkatkan nilai ekonomi daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi pada periode ini diarahkan untuk pematapan apresiasi.

5.2.5 RPJMD ke-5 (2023 - 2025)

Pada periode tahun 2023-2025, proyeksi jumlah penduduk mencapai 11,1 - 11,8 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0 - 8,9 persen dan PDRB per kapita Rp. 315 juta - Rp. 380 juta per tahun. Kondisi ini mampu mengendalikan tingkat kemiskinan sebesar 2,1-2,5 persen. Pada periode ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan mencapai 84,2 - 85,8.

Periode 2023-2025 adalah periode kelima dimana tema utama pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada periode ini adalah mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, sejahtera, produktif dan berdaya saing global. Fokus dan target pembangunan pada tahap ini adalah mencapai kota Jakarta yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi daerah yang terus meningkat. Pembangunan periode ini diarahkan pada :

1. Perwujudan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta yang maju, modern, handal, dan berdaya saing global. Terwujudnya kelembagaan dan layanan sistem transportasi umum

terpadu, modern, dan berstandar internasional melalui berfungsinya 15 koridor *Bus Rapid Transit (BRT)*, *Light Rapid Transit (LRT)* yang berdaya saing, berfungsinya *Mass Rapid Transit (MRT) North-South Line* secara penuh, serta berfungsinya *MRT East-West Line* secara efisien dan efektif dengan dibangunnya koridor lanjutan Kembangan – Balaraja dan Ujung Menteng – Cikarang yang seluruhnya saling terintegrasi, termasuk dengan Kereta Lingkar Jakarta dan transportasi pelabuhan sehingga mampu mengatasi kemacetan dan efisiensi mobilitas kota. Kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* modern dengan fasilitas yang mampu mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga kota secara efisien, efektif dan mantap.

Pada periode ini, Jakarta menjadi kota dengan potensi banjir yang kecil dan bebas genangan melalui perwujudan infrastruktur tata air dan drainase yang maju dan handal, pengembangan kawasan badan air kota yang terpadu dengan penataan ruang Jakarta.

Pengelolaan sampah dan limbah, dilakukan melalui sistem pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah skala kota yang terpadu dengan menggunakan teknologi yang maju dan modern serta perwujudan sistem sanitasi (*sewerage system*) kota yang mampu menjangkau seluruh kota. Selain itu juga diwujudkan sistem pengolahan sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.

Pada periode ini, pengembangan jaringan air bersih telah menjangkau seluruh kota dengan teknologi yang maju dan modern sehingga mampu menjamin ketersediaan air minum yang berkualitas. Selain itu ketersediaan energi juga ditingkatkan melalui penguatan kebijakan efisiensi energi serta parasarana dan sarana sumber energi baru dan terbarukan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energi kota.

Pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota diharapkan dapat mewujudkan pemenuhan hunian bagi seluruh warga kota. Selain itu, peningkatan lingkungan permukiman menjadikan kota Jakarta bebas kumuh. Sektor perdagangan juga semakin maju dan meningkat dengan berfungsinya pelabuhan berskala internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing.

2. Pembangunan perekonomian diarahkan untuk lebih sinergis dengan kebijakan politik serta sesuai dengan perkembangan budaya sehingga mampu mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing global. Produktivitas masyarakat dengan basis IPTEK mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian sehingga mampu berdaya saing global.

Keterampilan masyarakat semakin meningkat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga memberikan peningkatan nilai tambah dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing global. Inflasi dan tingkat pengangguran terkontrol dengan mantap sehingga sistem perekonomian Jakarta mampu bersaing secara global. Kelembagaan ketahanan pangan semakin maju, modern dan handal sehingga stabilitas ketersediaan pangan, aksesibilitas dan keamanan pangan warga Jakarta terjamin dan berkualitas. Kawasan ekonomi dapat berfungsi secara profesional dan mampu bersaing dengan kawasan lainnya.

Investasi dalam perekonomian Jakarta semakin berkualitas dan mampu berdaya saing global. Sistem investasi semakin meningkat sehingga terjadi sinergitas antar pelaku usaha. Kondisi ini ditandai dengan para pelaku usaha Jakarta semakin mampu bersaing dengan pelaku usaha global.

3. Perwujudan akses pendidikan yang merata, berkualitas, berdaya saing bagi seluruh warga Jakarta. Pada periode ini ditandai juga peran pemuda semakin mampu mengaktualisasikan jati diri sebagai warga Jakarta yang berdaya saing dan lembaga kepemudaan menjadi maju dan modern.

Selain itu perwujudan budaya multikultur warga Jakarta menjadi kenyataan sehingga ketentraman, ketertiban yang dinamis terkelola dengan baik bersamaan dengan hal tersebut dilakukan perwujudan pengarusutamaan gender dan anak. Perwujudan pembangunan kesehatan termasuk program keluarga berencana yang merata bagi warga Jakarta yang ditandai dengan tersedianya prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas.

4. Perwujudan lingkungan kota yang berkelanjutan dengan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang memadai. Jakarta menjadi kota berdaya saing global dengan lingkungan yang bersih, sehat dan berkualitas yang ditandai dengan pencemaran udara, air dan tanah terkelola dengan baik sehingga masyarakat Jakarta dapat hidup sehat, nyaman dan berkualitas. Selain itu, Jakarta juga semakin berperan dalam kontribusi pengurangan gas rumah kaca dan antisipasi perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca, serta berfungsinya sistem Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) secara efektif dan efisien dalam mengantisipasi kenaikan muka air laut.

Pada periode ini, daya dukung dan daya tampung kota menjadi semakin efisien dan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah yang maju melalui efisiensi energi pada berbagai sektor dan menjaga konservasi pemanfaatan air tanah di antaranya dengan penerapan kebijakan penggunaan energi terbarukan pada sarana transportasi umum dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada seluruh gedung-gedung serta pemanfaatan air olahan (*recycle*) dan air hujan melalui sistem tadah hujan (*rain water harvesting*) dalam memenuhi kebutuhan kota.

Pengendalian kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan air terlaksana dengan baik dalam rangka pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota dan semakin berkurangnya risiko degradasi lingkungan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin bertambah luasan dan kualitasnya sebagai paru-paru kota. Demikian juga dengan kualitas badan air permukaan yang semakin baik dan bersih sehingga menciptakan ekosistem kota yang berwawasan lingkungan. Manajemen pengelolaan bencana (*disaster management*) kota juga semakin tangguh dan modern dengan didukung pendanaan pasca bencana (*catastrophic bond*).

5. Periode ini ditandai dengan organisasi pemerintah semakin kokoh, maju dan modern, sehingga pelayanan masyarakat di segala aspek lebih cepat, murah, tepat dan sederhana sehingga mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Hal ini ditandai dengan kewenangan dan ketatalaksanaan organisasi yang proporsional dan mampu menjawab tantangan masa depan. Selain itu ditandai dengan terwujudnya hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta yang mampu menjawab tantangan sehingga mampu berdaya saing global.
6. Perwujudan kreativitas dan inovasi warga Jakarta semakin berkualitas mampu berkontribusi bagi masyarakat global. Bersamaan dengan hal ini telah terwujudnya jaringan inovasi masyarakat Jakarta secara global sehingga mampu berdaya saing dan mendorong terwujudnya industri kreatif yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Kreativitas dan inovasi daerah diarahkan untuk perwujudan kreativitas dan inovasi yang mampu bersaing secara global dengan ide-ide yang sesuai dengan nilai budaya Jakarta. Selain itu, dengan memanfaatkan jaringan regional dan global, membentuk ide-ide konstruktif yang dapat berkontribusi pada kekayaan budaya internasional.

Bersamaan dengan kondisi ini, kapasitas dan kualitas sumber daya daerah yang handal dan maju dengan melalui penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sistematis sehingga mampu menghasilkan keluaran yang berdaya saing global dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan. Sehingga apresiasi masyarakat Jakarta terhadap kreativitas dan inovasi semakin mantap dan berkualitas.

BAB VI Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025 merupakan dokumen perencanaan holistik dan komprehensif yang memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan mensyaratkan pentingnya keterpaduan, keselarasan, dan sinkronisasi antarpelaku pembangunan dan peraturan perundangan. Dalam pelaksanaan pembangunan juga harus tetap diperhatikan peran, tanggung jawab, dan tugas yang melekat pada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025 merupakan acuan dan pedoman dalam:

1. Menyusun visi dan misi calon gubernur dan calon wakil gubernur;
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta;
3. Menciptakan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah;
4. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik antarfungsi pemerintahan daerah;
5. Menjadi acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan pembangunan;
6. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

1. Untuk menjaga kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, calon gubernur dan calon wakil gubernur harus memperhatikan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi daerah, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta untuk periode 2013–2017, periode 2018–2022, dan periode 2023–2025.
2. Lembaga eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta dengan didukung oleh instansi vertikal dan masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan di dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025.
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025.
5. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok, dan unggulan pembangunan sesuai

- dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang merupakan penjabaran dari RPJPD untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran RPJPD dan memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Bappeda Provinsi DKI Jakarta bertugas membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang muatan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan, serta mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta;
 8. Dalam rangka menjamin konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 disusun melalui pendekatan partisipatif, teknokratis, politis, *top down* dan *bottom up* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Partisipasi ini dilakukan agar masyarakat, tidak saja sebagai sekadar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek pembangunan belaka, tetapi merupakan subjek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang sentral, strategis dan penting.

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah RPJPD ini akan sangat bergantung pada komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan dan peran aktif masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya secara proaktif dan konstruktif.

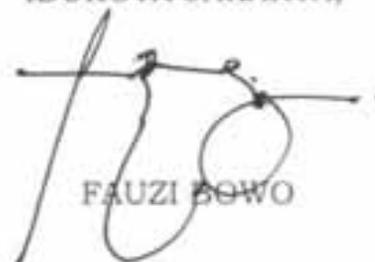
BAB VII PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005--2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005--2025 yang berisi visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang merupakan pedoman di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun 2005--2025. RPJPD ini merupakan pedoman bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD lima tahunan.

Rencana pembangunan jangka panjang ini juga merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan jangka panjang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005--2025 dilakukan melalui perwujudan visi "Jakarta: Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Global" yang perlu didukung oleh (1) meningkatkan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana wilayah; (2) meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas; (3) membangun ketahanan sosial dan budaya; (4) meningkatkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (5) meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan, dan: (6) memperkuat inovasi dan kreativitas daerah.

Pada masa yang akan datang, melalui kerja kepemimpinan yang tangguh, tata pemerintahan yang baik, serta kerja sama dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan, Jakarta akan menjadi sebuah kota yang besar, maju, dan berdaya saing. Jakarta akan merupakan kota yang menjadi pusat Asia Tenggara, memegang peranan penting di Asia, serta kota modern yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO